



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 17 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2014 - 2018**

**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2017**

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 17 TAHUN 2017
TANGGAL : 15 - 12 - 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2014 - 2018**



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2014-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2014-2018.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 1 Seri E) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd

SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 15 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2017 Nomor 14 Seri E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 396-17/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



SAIFUL BAKRI, SH., MH.
Pembina TK I
NIP. 19621020 199003 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2014 - 2018

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai pelaksana ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menyusun RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Namun seiring berjalan waktu, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, membawa konsekuensi mendasar pada pembagian urusan pemerintahan yang baru bagi daerah. Semula terdapat urusan yang menjadi kewenangan kabupaten, berpindah menjadi kewenangan Provinsi/Pusat dan sebaliknya. Akibat lain adalah adanya penyesuaian Perangkat Daerah (PD) dan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di daerah yang mengharuskan adanya pijakan baru dalam dokumen perencanaan utamanya pada RPJMD.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar, yakni adanya

perubahan kebijakan nasional.

Perubahan asumsi makro dan krisis ekonomi global memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional dan regional sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama dan target kinerja pembangunan daerah. Disamping itu perubahan metodologi penghitungan indikator kinerja pembangunan daerah yaitu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi dari menggunakan tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010 juga mengakibatkan capaian target indikator tersebut menjadi meleset, yang diterapkan mulai tahun 2015.

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 tidak sesuai lagi dan perlu direvisi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
1.1 Latar Belakang	I – 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I – 2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I – 4
1.4 Sistematika Penulisan	I – 12
1.5 Maksud dan Tujuan	I – 14
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II – 1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II – 1
2.1.1 Kondisi Geografis	II – 1
2.1.2 Topografi, Hidrologi dan Klimatologi Wilayah Kabupaten Tulungagung	II – 3
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana	II – 8
2.1.4 Kondisi Demografi	II – 15
2.1.5 Penggunaan Lahan	II – 16
2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah	II – 18
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II – 30
2.2.1 Perekonomian	II – 30
2.2.2 Kesejahteraan Sosial	II – 39
2.2.3 Kebudayaan	II – 44
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II – 45
2.3.1 Pendidikan	II – 45
2.3.2 Kesehatan	II – 47
2.3.3 Pekerjaan Umum	II – 51
2.3.4 Perumahan Rakyat	II – 54
2.3.5 Penataan Ruang	II – 55
2.3.6 Lingkungan Hidup	II – 55
2.3.7 Kependudukan dan Catatan Sipil	II – 56
2.3.8 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	II – 57
2.3.9 Ketenagakerjaan	II – 58
2.3.10 Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	II – 59
2.3.11 Penanaman Modal	II – 60
2.3.12 Komunikasi dan Informatika	II – 61
2.3.13 Pariwisata	II – 65
2.3.14 Perdagangan	II – 68
2.3.15 Keuangan	II – 70
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II – 71
2.4.1 Kemampuan Keuangan Daerah	II – 71
2.4.2 Fasilitas Infrastruktur	II – 72
2.4.3 Iklim Investasi	II – 74
2.4.4 Lingkungan Strategis Nasional, Regional dan Global	II – 74

BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	III – 1
	SERTA KERANGKA PENDANAAN	
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III – 1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	III – 2
3.1.2	Neraca Daerah	III – 10
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III – 14
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	III – 15
3.2.2	Analisis Pembiayaan	III – 16
3.3	Kerangka Pendanaan	III – 19
3.3.1	Proyeksi Pendapatan 2018	III – 22
3.3.2	Kebijakan Alokasi Anggaran	III – 23
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	IV – 1
4.1	Permasalahan Pembangunan	IV – 1
4.2	Isu Strategi	IV – 1
4.2.1	Pendidikan	IV – 1
4.2.2	Layanan Kesehatan	IV – 3
4.2.3	Manajemen Pemerintah Daerah dan Pelayan Publik	IV – 4
4.2.4	Infrastruktur	IV – 7
4.2.5	Pertumbuhan Ekonomi	IV – 8
4.2.6	Penanggulangan Kemiskinan	IV – 10
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V – 1
5.1	Visi	V – 1
5.2	Misi	V – 2
5.3	Tujuan dan Sasaran	V – 3
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI – 1
6.1	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Yang Murah dan Berkualitas Serta Pelestarian/ Pengembangan Kebudayaan	VI –1
6.2	Peningkatan Pelayanan di Bidang Kesehatan Yang Murah dan Berkualitas	VI –3
6.3	Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Baik, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Demokratis	VI –3
6.4	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berbasis Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Untuk Mendorong Percepatan Pembangunan Sektor-Sektor yang Lain	VI –5
6.5	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis UKM, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pariwisata Serta Perkebunan Melalui Kegiatan Kewirausahaan	VI –6
6.6	Pengentasan dan Penanggulangan Kemiskinan dengan Pola Terpadu	VI –6

BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII – 1
7.1	Kebijakan Umum	VII – 1
7.2	Program Prioritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	VII – 3
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	VIII – 1
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX – 1
9.1	Indikator Kinerja Utama	IX – 1
9.2	Indikator Kinerja Daerah	IX – 7
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN	X – 1
10.1	Pedoman Transisi	X – 2
10.2	Kaidah Pelaksanaan	X – 4

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
II.1	Potensi Fisik Dasar Kabupaten Tulungagung	II – 2
II.2	Pembagian Wilayah	II – 2
II.3	Luas Lahan Berdasarkan Kemiringan Tanah	II – 5
II.4	Nama Sungai di Kabupaten Tulungagung	II – 6
II.5	Curah Hujan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016	II – 7
II.6	Kawasan Rawan Tsunami Kabupaten Tulungagung	II – 9
II.7	Kawasan Rawan Gerakan Tanah Di Kabupaten Tulungagung	II – 9
II.8	Potensi Gempa Menurut Skala Modified Mercally Intensity (MMI)	II – 10
II.9	Bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016	II – 11
II.10	Jumlah Korban Terdampak Bencana di Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2016	II – 12
II.11	Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Tulungagung	II – 13
II.12	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2016	II – 15
II.13	Pertumbuhan Penduduk Menurut Tahun di Kabupaten Tulungagung	II – 15
II.14	Jumlah Penduduk Per Usia di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016	II – 16
II.15	Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB Kabupaten Tulungagung Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012-2016 (Tahun Dasar 2010)	II – 30
II.16	Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB Kabupaten Tulungagung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 (Tahun Dasar 2010)	II – 31
II.17	Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor Tahun 2012 - 2016 Tahun Dasar 2010 (Persen)	II – 34
II.18	Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2012-2016	II – 36
II.19	Persentase Perubahan IHK/Inflasi (2002 = 100) Tahun 2016	II – 37
II.20	IPM Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Kediri dan Jawa Timur Tahun 2012 – 2016	II – 40
II.21	Penanganan PMKS di Kabupaten Tulungagung	II – 43
II.22	Jumlah Karya Seni Budaya yang Mendapatkan Penghargaan Tahun 2012 – 2016	II – 45
II.23	Seni Budaya yang Dilestarikan Tahun 2012 – 2016	II – 45
II.24	Perkembangan Pembangunan Urusan Pendidikan Tahun 2012 – 2016	II – 46
II.25	Indikator Pendidikan Kabupaten Tulungagung 2012-2016	II – 47

II.26	Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun 2016	II – 47
II.27	Indikator Kesehatan Kabupaten Tulungagung 2012-2016	II – 48
II.28	Perkembangan Pembangunan Urusan Kesehatan Tahun 2012 – 2016	II – 50
II.29	Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016	II – 51
II.30	Jumlah Pelayanan Sistem Jaringan Perpipaan Air Bersih Tersistem	II – 52
II.31	Persentase Keluarga Dengan Kepemilikan Sarana Sanitasi Dasar Tahun 2013	II – 53
II.32	Hasil Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2012-2016	II – 53
II.33	Jumlah Perumahan Rakyat di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016	II – 54
II.34	Perkembangan Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2012 – 2016	II – 55
II.35	Perkembangan Pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2012-2016	II – 57
II.36	Perkembangan Realisasi Program Keluarga Berencana Tahun 2012-2016	II – 57
II.37	Perkembangan Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB Tahun 2012-2016	II – 57
II.38	Perkembangan Pembangunan Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2012 – 2016	II – 58
II.39	Perkembangan Pembangunan Koperasi dan UMKM Tahun 2012 – 2016	II – 59
II.40	Perkembangan Indikator Pembangunan Urusan Penanaman Modal Tahun 2012– 2016	II – 60
II.41	Perkembangan Pembangunan Urusan Pariwisata Tahun 2012 – 2016	II – 66
II.42	Tempat Wisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2016	II – 66
II.43	Perkembangan Ekspor Tahun 2012-2016	II – 69
II.44	Komoditas Perdagangan Antar Daerah di Kabupaten Tulungagung	II – 70
II.45	Pencapaian Penyelenggaraan Pemerintahan	II – 70
II.46	Data Infrastruktur Kabupaten Tulungagung Tahun 2016	II – 72
II.47	Sentra Produk Industri Di Kabupaten Tulungagung	II – 84
III.1	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016	III – 3
III.2	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016	III – 6
III.3	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016	III – 7
III.4	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016	III – 9
III.5	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016	III – 12

III.6	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	III – 16
III.7	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016	III – 17
III.8	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tulungagung 2011-2016	III – 18
III.9	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016	III – 19
III.10	Pengeluaran Wajib, Periodik dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2016	III – 21
III.11	Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018	III – 22
III.12	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018	III – 24
III.13	Kerangka Pendanaan Alokasi Keuangan Daerah	III – 24
V.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran	V – 8
VI.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Tulungagung	VI – 8
VII.1	Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan	VII – 14
VIII.1	Indikasi Rencana Program Prioritas Serta Kebutuhan Pendanaan	VIII – 10
IX.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tulungagung	IX – 6
IX.2	Indikator Kinerja Daerah Pemerintahan Kabupaten Tulungagung 2014-2018	IX – 8

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
I.1 Prosentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Tulungagung	I – 11
I.2 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya	I – 12
II.1 Peta Administrasi Kabupaten Tulungagung	II – 3
II.2 Peta Tematik Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Tulungagung	II – 8
II.3 Peta Kawasan Rawan Bencana Alam	II – 14
II.4 Prosentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Tulungagung	II – 17
II.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012-2016 (%)	II – 33
II.6 Indeks Gini Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012-2016	II – 38
II.7 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012-2016	II – 39
II.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012-2016	II – 40
II.9 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012-2016	II – 44
II.10 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012-2016	II – 48
II.11 Angka Kematian Bayi Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2016	II – 49
III.1 Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kab. Tulungagung Tahun 2011-2016	III – 4
III.2 Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kabupaten Tulungagung 2011-2016	III – 8
III.3 Perbandingan Penerimaan dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016	III – 10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program Bupati terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 yaitu Syahri Mulyo, SE., M.Si. sebagai Bupati Tulungagung dan Drs. Maryoto Birowo, MM. sebagai Wakil Bupati Tulungagung dengan masa jabatan 2014-2018. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, maka visi, misi dan program tersebut dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pasal 50 ayat (1) huruf b dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 282 menyebutkan bahwa perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar, yakni adanya perubahan kebijakan nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, membawa konsekuensi mendasar pada pembagian urusan pemerintahan yang baru bagi daerah. Semula

terdapat urusan yang menjadi kewenangan kabupaten, berpindah menjadi kewenangan Provinsi dan sebaliknya. Akibat lain adalah adanya penyesuaian Perangkat Daerah (PD) dan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di daerah yang mengharuskan adanya pijakan baru dalam dokumen perencanaan utamanya pada RPJMD.

Perubahan asumsi makro dan krisis ekonomi global memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional dan regional sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama dan target kinerja pembangunan daerah. Disamping itu perubahan metodologi penghitungan indikator kinerja pembangunan daerah yaitu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi dari menggunakan tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010 juga mengakibatkan capaian target indikator tersebut menjadi meleset, yang diterapkan mulai tahun 2015.

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 tidak sesuai lagi dan perlu direvisi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - k. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - l. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 - q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
 - r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025;

- t. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018; dan
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 sebagai dokumen perencanaan pembangunan disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dalam penyusunannya harus memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019.

RPJMN Tahun 2015-2019, memiliki visi “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka RPJMN menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat berkepribadian dalam kebudayaan.

Dengan berlandaskan pada visi dan misi tersebut, maka agenda pembangunan nasional RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kemudian dalam penyusunannya, RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 juga memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Sehingga penyusunan pada RPJMD Kabupaten Tulungagung dibuat sesuai dengan arah pada RPJMD Provinsi Jawa Timur sehingga bersifat linier. Adapun Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur Periode 2014-2019 adalah "Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak." Dalam mewujudkan visi tersebut, Provinsi Jawa Timur berfokus pada lima misi, yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi;
3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan

ruang;

4. Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik;
5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Berdasarkan penelaahan RPJMD Provinsi Jawa Timur, urgensi pembangunan pada kontekstual Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pusat-pusat pertumbuhan baru;
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
- 3) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
- 4) Pembangunan infrastruktur transportasi;
- 5) Pengembangan potensi sumber daya alam unggulan lokal dalam pengembangan industri kecil dan menengah sebagai pemasok utama pasar regional;
- 6) Perluasan produk dan peningkatan ekonomi masyarakat;
- 7) Pengembangan potensi sumber daya alam unggulan lokal dalam pengembangan pariwisata;
- 8) Peningkatan SDM dengan fokus pada sektor agrobisnis, khususnya inovasi riset untuk keunggulan komparatif pada sektor unggulan;
- 9) Peningkatan kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong pembangunan sektor-sektor unggulan;
- 10) Menciptakan iklim investasi yang kondusif dari segi tatanan peraturan/regulasi, keamanan, stabilitas sosial, penyediaan infrastruktur, serta kesiapan sumber daya manusia;
- 11) Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
- 12) Pengembangan energi baru terbarukan.

Selanjutnya, RPJMD juga merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah sehingga RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 disusun dengan berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025. Dalam Visi Pembangunan Kabupaten Tulungagung yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 sebagai berikut : “Mewujudkan Tulungagung Yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing”.

Makna Visi Pembangunan tersebut adalah mendorong Kabupaten

Tulungagung untuk memiliki kemampuan dan keberdayaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin secara berkeadilan, artinya dilandasi nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia, prinsip-prinsip demokrasi, disertai upaya mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Disamping itu juga mendorong tingkat kemandirian Kabupaten Tulungagung dalam arti memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengatasi berbagai permasalahan menuju keberhasilan pembangunan daerah secara berkesinambungan. Sejalan dengan itu Kabupaten Tulungagung juga terdorong untuk meningkatkan daya saing daerah untuk mengaktualisasikan keunggulan kompetitif dan komparatif dalam rangka memacu pertumbuhan perekonomian daerah.

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 tersebut ditempuh melalui upaya merealisasikan Misi Pembangunan 2005-2025 sebagai berikut :

1. Misi 1

Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Tulungagung yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga berdaya untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah.

2. Misi 2

Memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung secara merata dan berkeadilan, melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri yang berwawasan lingkungan.

3. Misi 3

Mewujudkan kemandirian Kabupaten Tulungagung dalam membangun perekonomian daerah berbasis pengembangan daya saing daerah.

4. Misi 4

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tulungagung yang bersih dan berwibawa berlandaskan azas-azas tata pemerintahan yang baik.

RPJPD 2005-2025 pada tahun RPJM ke-3 (2015-2020), diarahkan dengan tetap berpegang pada capaian kinerja pada RPJMD ke 2. Sesuai dengan hasil implementasi, pencapaian dan sebagai keberlanjutan

RPJM ke-2, maka pada RPJM ke-3 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian berbasis agribisnis dan agroindustri berlandaskan keunggulan sumberdaya manusia yang berkualitas serta peningkatan kemampuan ilmu dan teknologi.

Selanjutnya fokus arah pembangunan pendidikan serta pelestarian atau pengembangan kebudayaan dilakukan dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan kualitas sebagai kelanjutan dari program pembangunan pada tahap sebelumnya, yaitu (a) dengan meningkatkan pembangunan pendidikan anak usia dini untuk mendukung keberlanjutan program pendidikan dasar 9 tahun; (b) pelaksanaan program pendidikan dasar 12 tahun; (c) peningkatan akses pelayanan pendidikan bagi semua masyarakat; (d) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat; (e) peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang tanggap terhadap teknologi; (f) meningkatnya kompetensi tenaga pengajar dengan berbekal Iptek; serta (g) peningkatan pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya Kabupaten Tulungagung.

Dalam upaya mempertahankan dan terus meningkatkan kesehatan masyarakat, fokus pengembangan, pemantapan dan peningkatan pelayanan kesehatan melalui: (a) peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang telah ada (RS, Puskesmas dan jejaringnya); (b) peningkatan kualitas tenaga kesehatan secara proporsional; (c) perluasan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terpadu sampai pada tingkat lingkungan; dan (d) meningkatkan kualitas lingkungan sehat dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mendorong pemberdayaan masyarakat.

Pada sisi pembangunan ekonomi, tahapan pembangunannya difokuskan pada peningkatan daya saing daerah yang antara lain meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sistem produksi, standarisasi, pengujian dan pengendalian kualitas produk (SNI, ISO) dan meningkatkan iklim investasi untuk mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah sehingga menumbuhkembangkan agrobisnis maupun agroindustri sehingga pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan

agroindustri dapat mensinergikan berbagai sektor baik primer ataupun sekunder, serta sinkronisasi peran sektor lainnya secara terpadu. Pada pengembangan UMKM diarahkan pada revitalisasi dan peningkatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung. Selain itu perlu juga peningkatan UMKM dalam hal SDM, permodalan, teknologi, pemasaran dan dukungan kebijakan pemerintah.

Dalam bidang pariwisata difokuskan dengan terus meningkatkan pembangunan pariwisata yang telah berkembang dan menggali potensi pariwisata baru yang potensial khususnya ekowisata, dengan memanfaatkan dan memperhatikan keterpaduan antara sumberdaya yang ada dimiliki, meningkatkan kualitas SDM pariwisata yang profesional dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan, serta meningkatkan sosialisasi dan promosi keberadaan pariwisata di Kabupaten Tulungagung secara regional, nasional bahkan internasional.

Pada tahap ketiga ini, pembangunan infrastruktur lebih difokuskan dengan tetap mempertahankan kemandirian pembangunan infrastruktur sebelumnya yang ditindaklanjuti dengan upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur yang telah memadai guna peningkatan ekonomi, layanan pendidikan dan kesehatan, antara lain melalui: (a) peningkatan dan pengembangan infrastruktur transportasi; (b) peningkatan jaringan irigasi setengah teknis menjadi irigasi teknis; (c) menjaga pemenuhan kebutuhan energi terhadap masyarakat dan dunia usaha yang diikuti dengan persiapan energi alternatif/energi terbarukan; serta (d) perluasan areal TPA diikuti dengan penambahan sarana dan prasarana penunjang dan adanya pembangunan TPS di seluruh kecamatan.

Pembangunan bidang pemerintahan pada tahap ketiga difokuskan untuk lebih memantapkan kembali tata pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan pelayanan kepada masyarakat yang semakin prima di semua penyelenggara pelayanan oleh pemerintahan dengan peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur, pemanfaatan teknologi, sarana prasarana yang baik dan proporsional, penegakan hukum dan penghormatan terhadap HAM, demokrasi politik seimbang dengan budaya politik, keamanan dan ketertiban semakin terjaga, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan

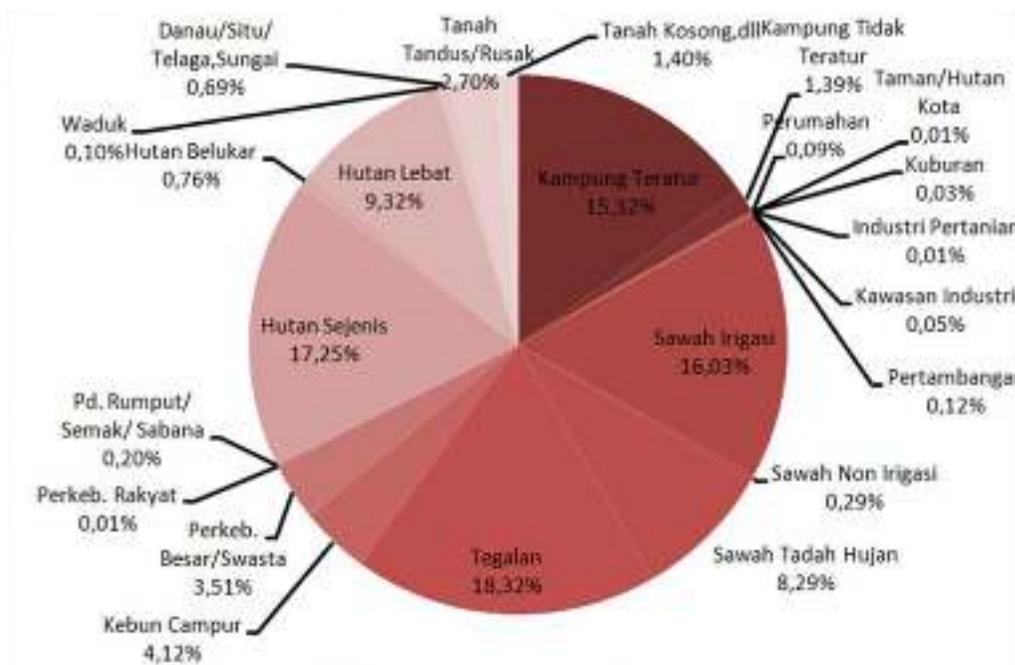
semakin meningkat.

Pembangunan aspek penataan ruang pada tahap ini difokuskan dengan lebih meningkatnya implementasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tulungagung sesuai dengan tata ruang yang ada, baik pembangunan infrastruktur, industri, perdagangan, jasa dan perumahan. Pengelolaan Lingkungan Hidup difokuskan pada peningkatan proporsi pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada setiap kawasan di Kabupaten Tulungagung, melalui peran pemerintah dan partisipasi Stakeholders disertai dengan penegakan aturan yang tegas tentang pengelolaan lingkungan.

Kemudian, RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung memiliki luas wilayah sebesar 1.055,65 km² (105.565 Ha) atau sekitar 2,2% dari seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi 19 kecamatan, 257 desa, dan 14 kelurahan. Kabupaten Tulungagung juga termasuk dalam lingkup Wilayah Pengembangan (WP) Kediri dan sekitarnya berdasarkan RTRW Propinsi Jawa Timur dengan sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan sebagai kegiatan andalan dan faktor pendorong bagi pembangunan Wilayah Pengembangan (WP) Kediri dan sekitarnya.

Adapun prosentase penggunaan lahan di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 1.1
Prosentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Tulungagung



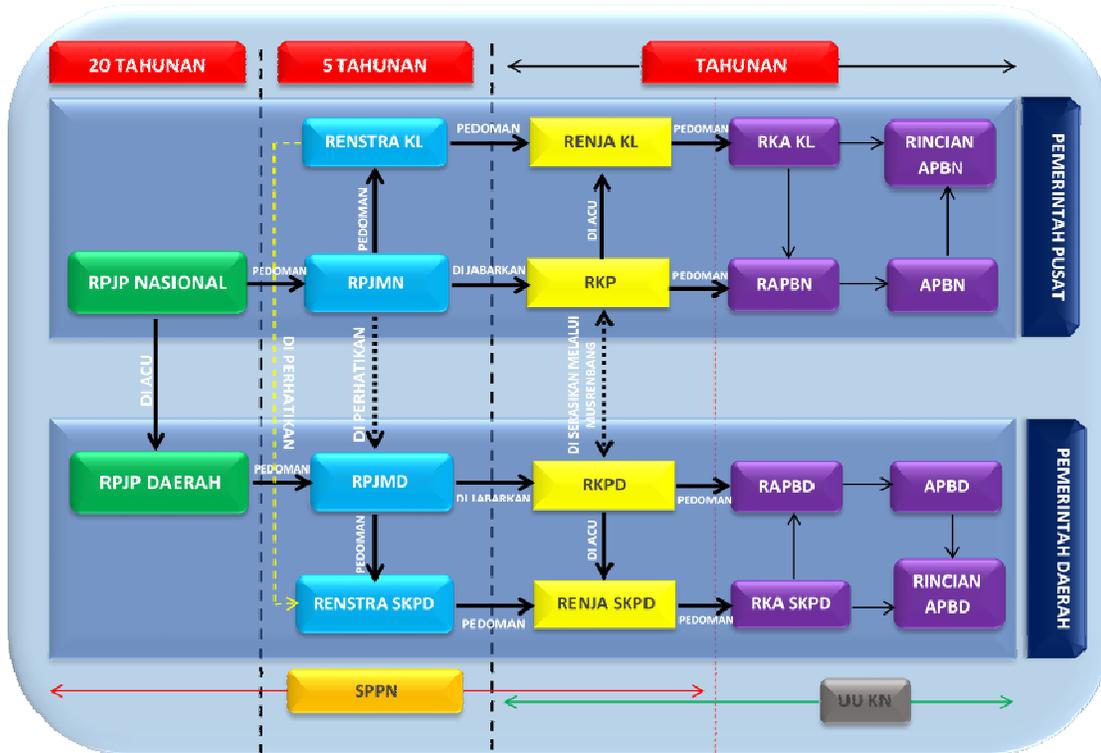
Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032.

Selain memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Timur, berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Tulungagung, penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen lainnya seperti Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Kemudian, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD. Secara diagramatis hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2
Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 terdiri dari 10 (sepuluh) bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, serta maksud dan tujuan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini memaparkan gambaran umum kondisi Kabupaten Tulungagung yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi. Yang meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah.

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan

Bagian ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan di masa

lalu seperti kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu seperti proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; dan kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.

Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis

Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis yang dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bagian ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2014-2018 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan, dan hubungannya dengan isu strategis daerah.

Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Bagian ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

Bab VII Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bagian ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, beserta kebutuhan pendanaannya.

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Bagian ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan

perangkat daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Bagian ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan, dengan menggambarkan akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Bagian ini menguraikan RPJMD sebagai pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Bupati periode berikutnya.

1.5. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2014-2018 dimaksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan sinergi dan keberlanjutan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam kurun 2014-2018. Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2014 - 2018 adalah :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan hasil pembangunan dan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Tulungagung;
2. Merumuskan dan menetapkan visi, misi, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah jangka menengah;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang meliputi Renstra PD, RKPD dan Renja PD;
4. Menyediakan rancangan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap PD;

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan terukur;
6. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Tulungagung.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah secara keseluruhan. Pelaksanaannya mengutamakan keterlibatan seluruh stakeholder pembangunan daerah, dengan memperhatikan posisi geografi dan potensi demografi, memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta mengoptimalkan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya. Pembangunan di Kabupaten Tulungagung selama ini telah menunjukkan pencapaian yang menggembirakan yang ditandai dengan meningkatnya berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Akan Tetapi Kabupaten Tulungagung juga menghadapi permasalahan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perlu disusun perencanaan pembangunan Kabupaten Tulungagung, dengan memperhatikan seluruh potensi dan tantangan yang dimiliki.

2.1 Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1 Kondisi Geografis

Kondisi Kabupaten Tulungagung dilihat dari aspek fisik wilayah dapat diidentifikasi atas beberapa kriteria fisik. Kriteria fisik tersebut yang akan menentukan ciri-ciri wilayah yang ada diberbagai kawasan Kabupaten Tulungagung. Secara geografis wilayah administratif Kabupaten Tulungagung memiliki luas wilayah sebesar 1.055,65 km² yang terletak diantara 111°43' – 112° 07' Bujur Timur dan 7°51' – 8°18' Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kabupaten Tulungagung dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Kediri
- Sebelah Timur : Kabupaten Blitar
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek

Wilayah Kabupaten Tulungagung dibagi kedalam beberapa wilayah administratif yang lebih kecil didalamnya berupa 19 kecamatan, 257 desa dan 14 kelurahan.

Tabel II.1
Potensi Fisik Dasar Kabupaten Tulungagung

No.	Potensi Fisik Dasar	Keterangan
1	Luas Wilayah	1.055,65 km ² atau 105.565 Ha
2	Titik Koordinat	111°43'BT - 112°07' BT dan 07°51 LS' - 08°18' LS
3	Batas-batas	
	- Sebelah Utara	Kabupaten Kediri
	- Sebelah Timur	Kabupaten Blitar
	- Sebelah Selatan	Samudera Indonesia
	- Sebelah Barat	Kabupaten Trenggalek
4	Wilayah Pemerintahan	
	- Kecamatan	19 Kecamatan
	- Kelurahan	14 Kelurahan
	- Desa	257 Desa

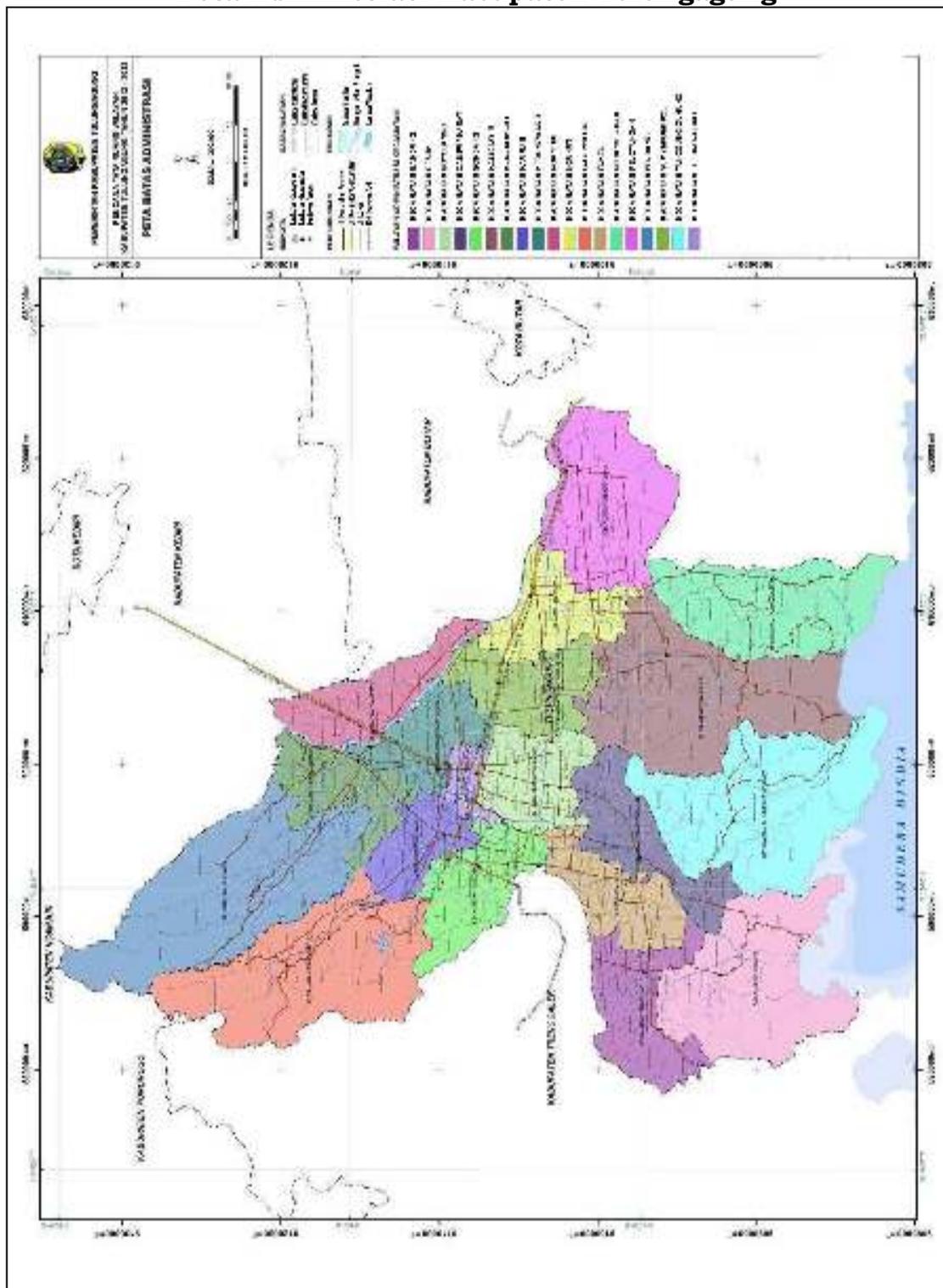
Sumber: Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2017

Tabel II.2
Pembagian Wilayah

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Dusun	RW	RT
1.	Besuki	10	21	44	226
2.	Bandung	18	43	95	333
3.	Pakel	19	45	89	316
4.	Campurdarat	9	29	78	334
5.	Tanggunggunung	7	37	76	168
6.	Kalidawir	17	56	135	443
7.	Pucanglaban	9	24	47	166
8.	Rejotangan	16	46	146	480
9.	Ngunut	18	37	149	443
10.	Sumbergempol	17	46	121	372
11.	Boyolangu	17	45	107	463
12.	Tulungagung	14	-	93	331
13.	Kedungwaru	19	46	131	499
14.	Ngantru	13	43	116	361
15.	Karangrejo	13	39	72	264
16.	Kauman	13	33	90	311
17.	Gondang	20	49	105	390
18.	Pagerwojo	11	37	64	228
19.	Sendang	11	53	98	281
	Jumlah	271	730	1.856	6.409

Sumber : Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2017

Gambar II.1
Peta Administrasi Kabupaten Tulungagung



2.1.2 Topografi, Hidrologi dan Klimatologi Wilayah Kabupaten Tulungagung

a. Topografi

Luas Wilayah Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan sebesar 105.565 ha dengan kondisi topografi bervariasi, yang meliputi:

- Kawasan seluas ± 35.353,72 ha atau 33,49% dari wilayah Tulungagung berketinggian 0-100 meter di atas permukaan air laut.

- Kawasan seluas ± 58.926,38 Ha atau 55,82% dari wilayah Tulungagung berketinggian 100-500 meter diatas permukaan air laut.
- Kawasan seluas ± 8.096,84 Ha atau 7,67% dari wilayah Tulungagung berketinggian 500-1.000 meter diatas permukaan air laut.
- Kawasan seluas ± 3.188,06 Ha atau 3,02% dari wilayah Tulungagung berketinggian lebih dari 1.000 meter diatas permukaan air laut.

Kabupaten Tulungagung memiliki wilayah dataran rendah, sedang, dan tinggi dengan konfigurasi datar, perbukitan, dan pegunungan. **Dataran rendah** merupakan daerah dengan ketinggian di bawah 500 m dari permukaan laut. Daerah ini hampir di semua wilayah Kabupaten Tulungagung, kecuali di Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Sendang yang dataran rendahnya hanya 4 desa. **Dataran sedang** dengan ketinggian 500 – 700 m dari permukaan laut meliputi Kecamatan Pagerwojo sebanyak 6 desa dan Kecamatan Sendang 5 desa. **Dataran tinggi** dengan ketinggian di atas 700 m dari permukaan laut terdiri dari 1 desa di Kecamatan Pagerwojo dan 2 desa di Kecamatan Sendang.

Secara garis besar wilayah Kabupaten Tulungagung ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yakni :

- a. Bagian Utara (Barat Daya) merupakan daerah pegunungan yang relatif subur, yang merupakan bagian tenggara dari pegunungan Wilis; mencakup areal seluas ± 25 %;
- b. Bagian Selatan merupakan daerah pegunungan yang relatif tandus, namun kaya akan potensi hutan dan bahan tambang, yang merupakan bagian dari pegunungan kapur selatan Jawa Timur; mencakup areal seluas ± 40 %;
- c. Bagian Tengah merupakan dataran rendah yang subur, yang dilalui oleh Sungai Brantas dan Kali Ngrowo (Parit Agung) beserta cabang-cabangnya, meliputi areal seluas ± 35 %.

Secara umum luasan yang merupakan dataran rendah berada di tengah kabupaten, sedangkan dataran tinggi dengan kondisi tanah

bergelombang ataupun bukit/pegunungan berada di sebelah barat laut dan selatan.

Kemiringan tanah dapat dinyatakan dalam bentuk prosentase (%). Pernyataan untuk setiap 1% kemiringan tanah (kelerengan) berarti terdapat perbedaan tinggi sebesar 1 meter dari dua tempat berjarak 100 meter. Kabupaten Tulungagung memiliki kelas kelerengan yang beragam. Jika diklasifikasi, setidaknya terdapat enam kelas wilayah kemiringan tanah, sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.3
Luas Lahan Berdasarkan Kemiringan Tanah

No.	Wilayah	Kelerengan (%)	Luasan (hektar)	Prosentase
I	Datar	0 – 2	43.070,52	40,8
II	Datar – landai	2 – 8	5.172,69	4,9
III	Landai – berombak	8 – 15	7.600,68	7,2
IV	Berombak – bergelombang lemah	15 – 25	14.567,96	13,8
V	Bergelombang lemah – kuat	25 – 40	21.113,00	20,0
VI	Bergelombang kuat	> 40	14.040,15	13,3

Sumber : RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032

b. Hidrologi

Di wilayah Kabupaten Tulungagung terdapat beberapa sungai yang memiliki aliran sepanjang tahun. Beberapa sungai tersebut memiliki daerah pengaliran sungai yang cukup luas dan membentuk suatu Daerah Aliran Sungai (DAS). Kabupaten Tulungagung termasuk dalam DAS Brantas dimana terdapat sungai - sungai kecil yang bermuara di Kali Brantas. Selain dialiri oleh sungai - sungai tersebut diatas keadaan hidrologi juga ditentukan oleh adanya waduk, dam, mata air, pompa air dan sumur bor. Air permukaan merupakan air tawar yang terdapat pada sungai, saluran, danau/telaga, rawa, empang dan sebagainya.

Tabel II.4
Nama Sungai di Kabupaten Tulungagung

No	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (km)
1	Besuki	Keboireng	10
		Karangtuwo (batas wilayah)	-
		Parit Raya	3
		Parit Agung	1,8
2	Bandung	Parit Agung	3,3
		Karangtuwo	18
		Parit Raya	7
3	Pakel	Parit Agung	4,4
		Ngasinan Lama	5,5
4	Campurdarat	Tlogo Buret	5,2
		Parit Agung	7,5
6	Kalidawir	Kalidawir	20,5
8	Rejotangan	Rowo Remang	15
		Kali Brantas	8,5
		Kali Kandung	6,15
9	Ngunut	Kali Brantas	7,15
10	Sumbergempol	Kali Brantas	2,75
		Kali Dawir	7,1
11	Boyolangu	Kali Dawir	9,4
		Parit Agung	6,8
12	Tulungagung	Parit Agung	7
		Kali jenes	3,5
		Song	1,5
13	Kedungwaru	Kali Brantas (batas wilayah)	-
		Ngrowo	6
		Parit Agung	2
		Wudu	2,5
		Kali Jenes	2,5
14	Ngantru	Kali Brantas	18,85
		Boto	33
15	Karangrejo	Kali Brantas (batas wilayah)	-
		Catut	6
		Klantur	10,5
		Babaan	5,6
		Bajal Picisan	7,25
		Wudu (batas wilayah)	-
16	Kauman	Song	10,7
		Wudu	10,9
17	Gondang	Ngasinan Kanal	4,25
		Blendis	14
		Sengon	12,55
		Gondang	11,4
18	Pagerwojo	Song	30,3
		Gondang /Bodeng	18,6
19	Sendang	Babaan	17,4

No	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (km)
		Bajal Picisan	13
		Klantur	16
		Catut	8

Sumber : Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2017

c. **Klimatologi**

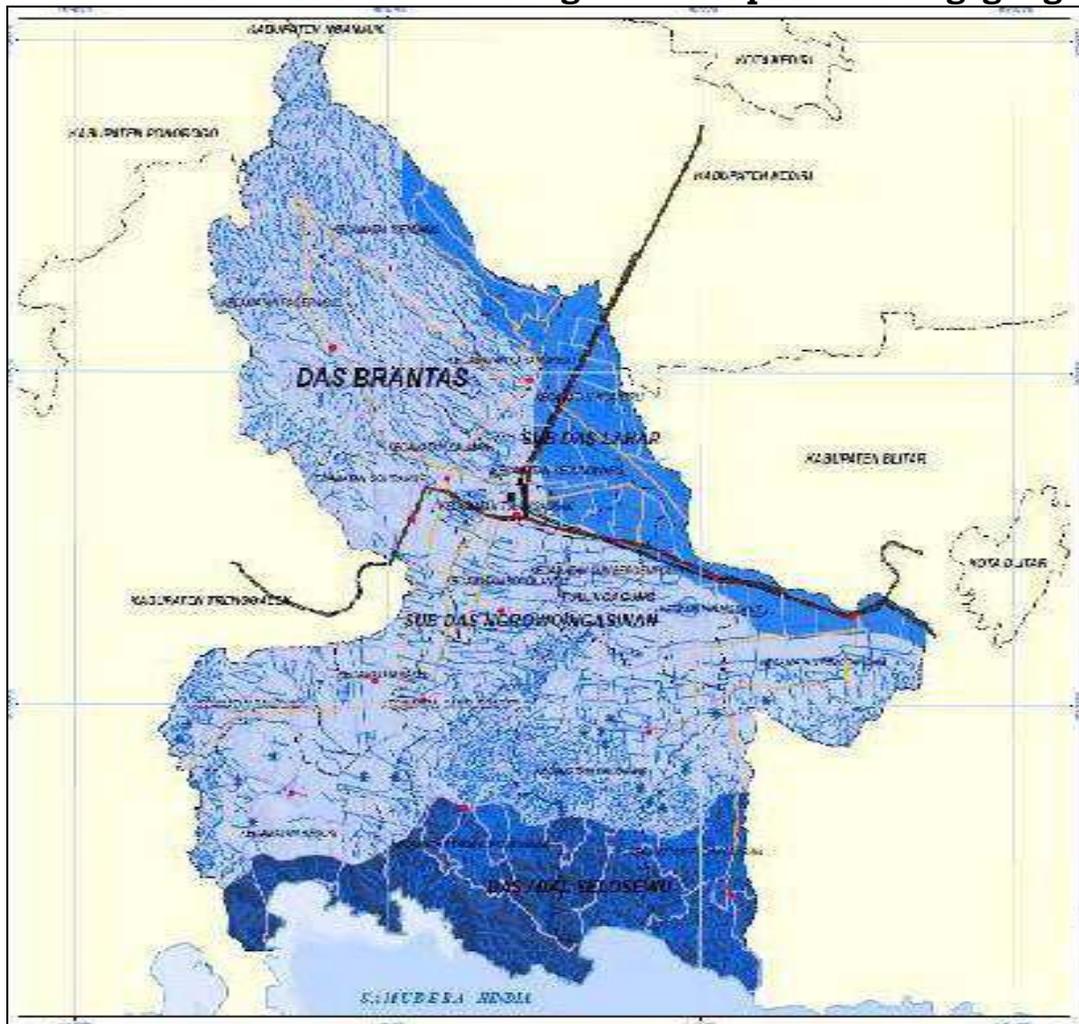
Tipe iklim Kabupaten Tulungagung secara umum termasuk tipe iklim hujan tropis bermusim. Tipe hujan dicirikan oleh turunnya hujan bermusim (bulan Nopember sampai April), dan adanya musim kemarau pada bulan Mei sampai Oktober. Suhu rata-rata mencapai 27°C dengan suhu terendah 24°C dan suhu tertinggi 30°C. Kelembaban udara berkisar antara 74 - 77% dan curah hujan tahunan rata-rata berkisar 2.155 - 3.292 mm.

Tabel II.5
Curah Hujan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016

No	Kecamatan	Bulan											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	Besuki	100	549	169	261	153	309	86	342	508	452	474	263
2	Bandung	145	348	151	199	96	141	68	243	244	414	352	316
3	Pakel	106	392	51	399	45	149	79	59	94	290	387	211
4	Campurdarat	106	392	51	399	45	149	79	59	94	290	387	211
5	Tanggung-gunung	122	273	203	168	131	139	108	200	133	305	515	231
6	Kalidawir	131	347	207	246	84	118	45	32	125	225	273	228
7	Pucanglaban	131	347	207	246	84	118	45	32	125	225	273	228
8	Rejotangan	302	252	387	458	162	84	50	140	97	279	445	195
9	Ngunut	243	449	306	376	83	148	50	157	148	271	363	301
10	Sumber-gempol	261	477	215	297	156	244	54	204	120	154	423	190
11	Boyolangu	206	460	345	405	96	78	77	126	99	197	556	192
12	Tulungagung	261	477	215	297	156	244	54	204	120	154	423	190
13	Kedungwaru	261	477	215	297	156	244	54	204	120	154	423	190
14	Ngantru	123	221	121	196	80	176	59	186	68	127	379	260
15	Karangrejo	284	438	177	222	132	236	108	199	146	235	670	199
16	Kauman	266	398	114	312	108	202	132	156	170	249	562	197
17	Gondang	320	422	118	326	127	193	167	140	160	256	539	193
18	Pagerwojo	266	367	236	158	187	231	174	335	281	249	731	254
19	Sendang	302	386	320	229	302	258	221	412	463	467	921	391
	Jumlah	3936	7472	3808	5491	2383	3461	1710	3430	3315	4993	9096	4440
	Rata-rata	207.2	393.3	200.4	289	125.4	182.2	90	180.5	174.5	262.3	478.8	233.7

Sumber : Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2017

Gambar II.2
Peta Tematik Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Tulungagung



Sumber : RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032

Perubahan iklim saat ini telah menjadi persoalan global yang melibatkan berbagai negara dan berbagai disiplin ilmu untuk mengatasinya. Dampak perubahan iklim telah mulai dirasakan beberapa tahun terakhir ini termasuk di Kabupaten Tulungagung. Peningkatan suhu udara, musim panas lebih pendek serta musim penghujan lebih panjang dengan curah hujan yang tinggi dan angin kencang merupakan dampak yang nyata.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah peka atau rawan bencana dan wilayah kritis di Kabupaten Tulungagung khususnya untuk wilayah rawan banjir terjadi karena adanya wilayah yang mempunyai ketinggian kurang dari 25 meter diatas permukaan air laut dengan kelerengan 2-15%, selain itu karena terdapatnya faktor pembatas alam berupa bentuk-

bentuk batuan dalam tanah yang relatif sulit menyerap air (tanah clay). Berdasarkan keadaan tersebut diatas dapat diindikasikan beberapa kawasan yang juga mempunyai kecenderungan terjadinya erosi akibat dari penggerusan oleh air terutama air hujan dengan curah hujan yang lebat. Berikut merupakan tabel kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Tabel II.6
Kawasan Rawan Tsunami Kabupaten Tulungagung

No	Nama Pantai	Lokasi		Panjang (Km)
		Desa	Kecamatan	
1	Nglarap, Klatak, Bayeman	Keboireng	Besuki	± 6.90
2	Brumbun, Gerangan	Ngrejo	Tanggunggunung	± 8.25
3	Sine	Kalibatur	Kalidawir	± 7.20
4	Sidem, Popoh	Basole	Besuki	± 6.45

Sumber: Surat Keputusan Bupati Tulungagung No. 854 Tahun 2002

Tabel II.7
Kawasan Rawan Gerakan Tanah Di Kabupaten Tulungagung

No	Nama	Lokasi	Kemiringan	Keterangan
1	Zone Kerentanan gerakan tanah sangat rendah	Daerah Tulungagung, Kauman, sekitar Bandung, sebelah utara Besuki. Sebelah utara Kalidawir, Karangrejo, Ngantru, Sumbergempol, Gondang dan Kedungwaru	<5%	<ul style="list-style-type: none"> - Lereng dibentuk oleh Aluvium (Qa) - terjadi di daerah sekitar sungai
2	Zone Kerentanan gerakan tanah rendah	Daerah Besuki, Campurdarat, Tanggunggunung, Kalidawir, Pucanglaban, Rejotangan, Gondang, Kauman, Sendang, Pagerwojo	5-15%	<ul style="list-style-type: none"> - umumnya dibentuk oleh tanah pelapukan batuan - terjadi pada tebing lembah sungai (alur)
3	Zone Kerentanan gerakan tanah menengah	Daerah Besuki, Campurdarat, Tanggunggunung, Kalidawir, Pucanglaban, Rejotangan, Gondang, Kauman, Sendang, Pagerwojo, Bandung, Karangrejo, Boyolangu	(5-15%)- (50-70%)	<ul style="list-style-type: none"> - vegetasi penutup kurang - umumnya terjadi pada perbatasan lembah sungai, peralihan litologi, atau tebing jalanyang disebabkan oleh curah hujan tinggi - Dibentuk oleh pelapukan batuan
4	Zone Kerentanan gerakan tinggi	Daerah Besuki, Tanggunggunung, Kalidawir, Gondang, Sendang, Pagerwojo	Agak Terjal (30-50%) sampai sangat terjal (>70%)	<ul style="list-style-type: none"> - Zona ini sering terjadi gerakan tanah akibat curah hujan intensitas tinggi - Dibentuk oleh tanah pelapukan pada batuan dasar bersifat gembur - Vegetasi umumnya relatif kurang

Sumber: Surat Keputusan Bupati Tulungagung No. 854 Tahun 2002

Gempa bumi yang terjadi umumnya berskala kecil, sehingga tidak menyebabkan kerusakan. Gempa bumi yang kuat mampu

menyebabkan kerusakan berupa retakkan pecah (*fault rupture*), getaran bumi (gegaran) banjir disebabkan oleh tsunami, lempengan pecah, berbagai jenis kerusakan muka bumi kekal seperti tanah runtuh, tanah lembik, dan kebakaran atau perlepasan bahan beracun. Kriteria kawasan rawan gempa menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII *Modified Mercally Intensity* (MMI).

Tabel II.8
Potensi Gempa Menurut Skala *Modified Mercally Intensity* (MMI)

Skala	Keterangan
I	Sangat jarang /hampir tidak ada orang dapat merasakan. Tercatat pada alat seismograf
II	Terasa oleh sedikit sekali orang terutama yang ada di gedung tinggi, sebagian besar orang tidak dapat merasakan
III	Terasa oleh sedikit orang, khususnya yang berada di gedung tinggi. Mobil parkir sedikit bergetar, getaran seperti akibat truk yang lewat
IV	Pada siang hari akan terasa oleh banyak orang dalam ruangan, diluar ruangan hanya sedikit yang bisa merasakan. Pada malam hari sebagian orang bisa terbangun. Piring, jendela, pintu, dinding mengeluarkan bunyi retakan, lampu gantung bergoyang.
V	Dirasakan hampir oleh semua orang, pada malam hari sebagian besar orang tidur akan terbangun, barang-barang diatas meja terjatuh, plesteran tembok retak, barang-barang yang tidak stabil akan roboh, pandulum jam dinding akan berhenti.
VI	Dirasakan oleh semua orang, banyak orang ketakutan/panik, berhamburan keluar ruangan, banyak perabotan yang berat bergeser, plesteran dinding retak dan terkelupas, cerobong asap pabrik rusak
VII	Setiap orang berhamburan keluar ruangan, kerusakan terjadi pada bangunan yang desain konstruksinya jelek, kerusakan sedikit sampai sedang terjadi pada bangunan dengan desain konstruksi biasa. Bangunan dengan konstruksi yang baik tidak mengalami kerusakan yang berarti.
VIII	Kerusakan luas pada bangunan dengan desain yang jelek, kerusakan berarti pada bangunan dengan desain biasa dan sedikit kerusakan pada bangunan dengan desain yang baik. Dinding panel akan pecahan lepas dari framenya, cerobong asap pabrik runtuh, perabotan yang berat akan terguling, pengendara mobil terganggu.
IX	Kerusakan berarti pada bangunan dengan desain konstruksi yang baik, pipa pipa bawah tanah putus, timbul retakan pada tanah.
X	Sejumlah bangunan kayu dengan desain yang baik rusak, sebagian besar bangunan tembok rusak termasuk fondasinya. Retakan pada tanah akan semakin banyak, tanah longsor pada tebing tebing sungaidan bukit, air sungai akan melimpas di atas tanggul.
XI	Sangat sedikit bangunan tembok yang masih berdiri, jembatan putus, rekahan pada tanah sangat banyak/luas, jaringan pipa bawah tanah hancur dan tidak berfungsi, rel kereta api bengkok dan bergeser.
XII	Kerusakan total, gerakan gempa terlihat bergelombang diatas tanah, benda benda berterbangan keudara.

Sumber : BPBD Kabupaten Tulungagung

Bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Tulungagung adalah bencana tanah longsor, angin puting beliung dan banjir. Untuk

lebih jelasnya mengenai wilayah-wilayah yang pernah terkena dampak bencana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.9
Bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Tulungagung
Tahun 2012-2016

Tahun/Bencana/Lokasi
Tahun 2012
Bencana tanah longsor di Dsn Tumpak Nongko Ds. Samar Kec. Sendang, Desa Picisan Kec. Sendang, Ds. Krosok Kec. Sendang, Ds.Karanganom,Ds.Kates dan Ds.Kl.bret Kecamatan Kauman, Ds. Wonorejo Kec. Pagerwojo, Ds. Sidomulyo Kec. Gondang, Ds. Mulyosari Kec. Pagerwojo, Desa Tugu Kec. Sendang, Desa Moyoketen Kec. Boyolangu, Ds. Sawo Kec. Campurdarat, dsn Boto RT.03/RW.02 Ds./ Kec. Pagerwojo, usun Bantengan RT.01/RW.05 Ds. Mulyosari Kec.Pagerwojo, Dsn Tambak RT.02/RW.02 Desa Krosok Kecamatan Sendang, Ds. Penjor Kec. Pagerwojo,
Bencana banjir di Ds. Serut Kec. Boyolangu, Ds.Tanjungsari Kec. Boyolangu, Desa Moyoketen Kec. Boyolangu, Ds. Sawo Kec. Campurdarat, Desa Pakel Kec.Pakel, Ds. Babadan Kec. Karangrejo, Ds. Bolorejo Kec. Kauman
Bencana angin puting beliung di Ds. Sidomulyo Kec. Gondang, Dsn Duwet Ds. Wates Kec. S.gempol, ds. Tenggur dan Ds. Tegalrejo Kec.Rejotangan, Desa Tiudan Kec. Gondang, Ds. Blendis Kec. Gondang, Ds. Buntaran Kec. Rejotangan, Ds. Sumberagung Kec. Rejotangan, Ds. Bolorejo Kec. Kauman, Ds. Gesikan Kec. Pakel, Ds. Wates Kec. Campurdarat, Dsn. Cluwok Ds. Gondosuli Kec. Gondang, Dusun Sanan Ds. Pucangan Kec. Kauman, ds. Ngantru Kec. Ngantru, Ds. Bendosari Kec. Ngantru.
Tahun 2013
Bencana tanah longsor di Desa Picisan Kec. Sendang, dsn Berak Rt 03/Rw. 01 Ds. Bungur Kec.Karangrejo, Ds. Nyawangan Kec.Sendang, Ds. Sidomulyo Kec. Pagerwojo
Bencana angin puting beliung di Desa Manding Kec. Pucanglaban, Desa Pulosari Kecamatan Ngunut, Desa Pojok Kecamatan Campurdarat, Desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol, Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol
Bencana banjir di Desa Domasan, Desa Tunggangri, dan Desa Salak Kembang Kecamatan Kalidawir.
Tahun 2014
Bencana Tanah longsor di Dusun Cerme RT.01/RW.02 Ds. Nglutung Kec. Sendang, Ds. Sidem Dsn. Pucung Kec. Gondang, Ds. Sendang Mbedog Ds. Samar Kec. Pagerwojo, Kec. Karangrejo, Kec. Besuki, Kec. Tanggunggunung, Kec. Bandung, Kec. Kalidawir
Bencana Angin Puting Beliung di Ds. Kasreman Kec. Pakel, Ds. Kendalbulur Kec. Boyolangu,Ds. Kalibatur Kec. Kalidawir, Ds. Ngrejo Kec. Pucanglaban, Kec. Bandung, Kec. Besuki, Kec. Gondang
Bencana Banjir di Ds. Sembon Kec. Karangrejo, Ds. Kalidawir Kec. Kalidawir, Kec. Bandung
Bencana Kebakaran di Kec. Pakel dan Kec. Sendang
Tahun 2015
Bencana Tanah longsor di Kec. Rejotangan, Kec. Pagerwojo, Kec. Karangrejo, Kec. Sendang, Kec. Pucanglaban
Bencana Angin Puting Beliung di Ds. Jeli Kec. Karangrejo, Ds. Ngrance Kec. Pakel, Ds. Junjung Kec. Sumbergempol, Kec. Gondang, Kec. Boyolangu, Kec. Bandung, Kec. Tanggunggunung, Kec. Ngunut, Kec. Campurdarat, Kec. Rejotangan, Kec. Besuki, Kec. Sendang, Kec. Kalidawir, Kec. Kedungwaru.
Bencana Banjir di Ds. Joho dan Ds. Pakisaji Kec. Kalidawir, Ds. Nglampir Kec. Besuki, Ds. Jengglongharjo Kec. Tanggunggunung, Kec. Rejotangan, Kec. Pucanglaban, Kec. Bandung, Kec. Pakel.
Tahun 2016
Bencana Tanah Longsor di Ds. Krosok Kec. Sendang, Ds. Pagerwojo Kec. Pagerwojo, Ds. Kalibatur Kec. Kalidawir.
Bencana Angin puting beliung di Ds. Gedangsewu Kec. Boyolangu, Ds. Pojok Kec. Campurdarat, Ds. Gesikan Kec. Pakel, Kec. Tulungagung.

Tahun/Bencana/Lokasi
Bencana Banjir di Ds. Tanggung Kec. Campurdarat, Ds. Waung Kec. Boyolangu, Ds. Sukowidodo Kec. Karangrejo, Kec. Besuki, Kec. Bandung, Kec. Kalidawir, Kec. Gondang, Kec. Kauman, Kec. Rejotangan, Kec. Ngantru.
Bencana Kebakaran di Kec. Tulungagung dan Kec. Boyolangu.

Sumber : BPBD Kabupaten Tulungagung

Tabel II.10
Jumlah Korban Terdampak Bencana di Kabupaten Tulungagung
Tahun 2014-2016

No	Jenis Bencana	Kecamatan	Desa	Jumlah Korban Terdampak Bencana
Tahun 2014				
1	Longsor	Karangrejo	3	33 kk, badan jalan
		Pagerwojo	4	26 kk, jalan
		Gondang	1	5 kk
		Besuki	1	tebing sungai
		Sendang	4	15 kk, jembatan,
		Tanggunggunung	1	Tebing
		Bandung	1	1 kk
		Kalidawir	1	6 kk
2	Puting beliung	Pakel	8	600 kk dan rumah ibadah
		Boyolangu	2	35 kk, sekolah
		Kalidawir	1	2 kk
		Bandung	1	5 kk
		Pucanglaban	1	20 kk
		Besuki	1	2 kk
		Gondang	2	8 kk
3	Banjir	Karangrejo	1	Tebing sungai
		Bandung	2	56 kk
		Kalidawir	1	Sawah
4	Kebakaran	Pakel	1	Rumah penduduk
		Sendang	1	Rumah penduduk
Tahun 2015				
1	Longsor	Rejotangan	1	Lahan pertanian
		Pagerwojo	5	59 kk, badan jalan
		Karangrejo	3	6 kk
		Sendang	6	21 kk
		Pucanglaban	1	20 kk
2	Angin Puting Beliung	Karangrejo	1	3 kk
		Gondang	3	83 kk
		Pakel	2	3 kk
		Boyolangu	2	58 kk dan kandang ternak
		Sumbergempol	3	12 kk
		Bandung	1	6 kk
		Tanggunggunung	1	4 kk
		Ngunut	2	3 kk
		Campurdarat	1	151 kk dan 1 Sekolah SD/TK
		Rejotangan	4	170 kk dan 1 Sekolah SMP
		Besuki	1	6 kk
		Sendang	2	38 kk
		Kalidawir	1	2 kk
Kedungwaru	1	22 kk		
3	Banjir	Kalidawir	1	Lahan sawah
		Rejotangan	1	Sawah
		Kalidawir	1	170 ha sawah, 7.000 ekor ternak ikan, 270 kk
		Besuki	5	70 Ha Sawah
			2	195 kk
		Tanggunggunung	1	2 orang hanyut 1 orang meninggal
		Pucanglaban	1	6 kk
		Bandung	1	51 kk dan jembatan putus
pakel	2	31 kk		

No	Jenis Bencana	Kecamatan	Desa	Jumlah Korban Terdampak Bencana
Tahun 2016				
1	Longsor	Pagerwojo	11	35 kk
		Sendang	9	11 kk
2	Banjir	Besuki	5	3 ha lahan sawah
		Bandung	4	3 ha lahan sawah
		Kalidawir	7	5 ha sawah
		Gondang	2	6 ha sawah
		Kauman	2	Pemukiman
		Karangrejo	3	6 ha sawah
		Boyolangu	3	8 ha sawah dan pemukiman
		Rejotangan	2	7 ha sawah
		Ngantru	4	5 ha sawah
3	Puting Beliung	Tulungagung	2	24 kk
		Pakel	13	2600 kk
		Boyolangu	3	120 kk
		Campurdarat	5	282
4	Kebakaran	Tulungagung	6	4 rumah dan 2 toko
		Boyolangu	3	2 rumah dan 2 toko

Sumber : BPBD Kabupaten Tulungagung

Tabel II.11
Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Tulungagung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah desa tangguh bencana	1	2	3	4	5
2	Prosentase desa tangguh bencana di kawasan rawan bencana	0,7	1,4	2,1	2,8	3,5

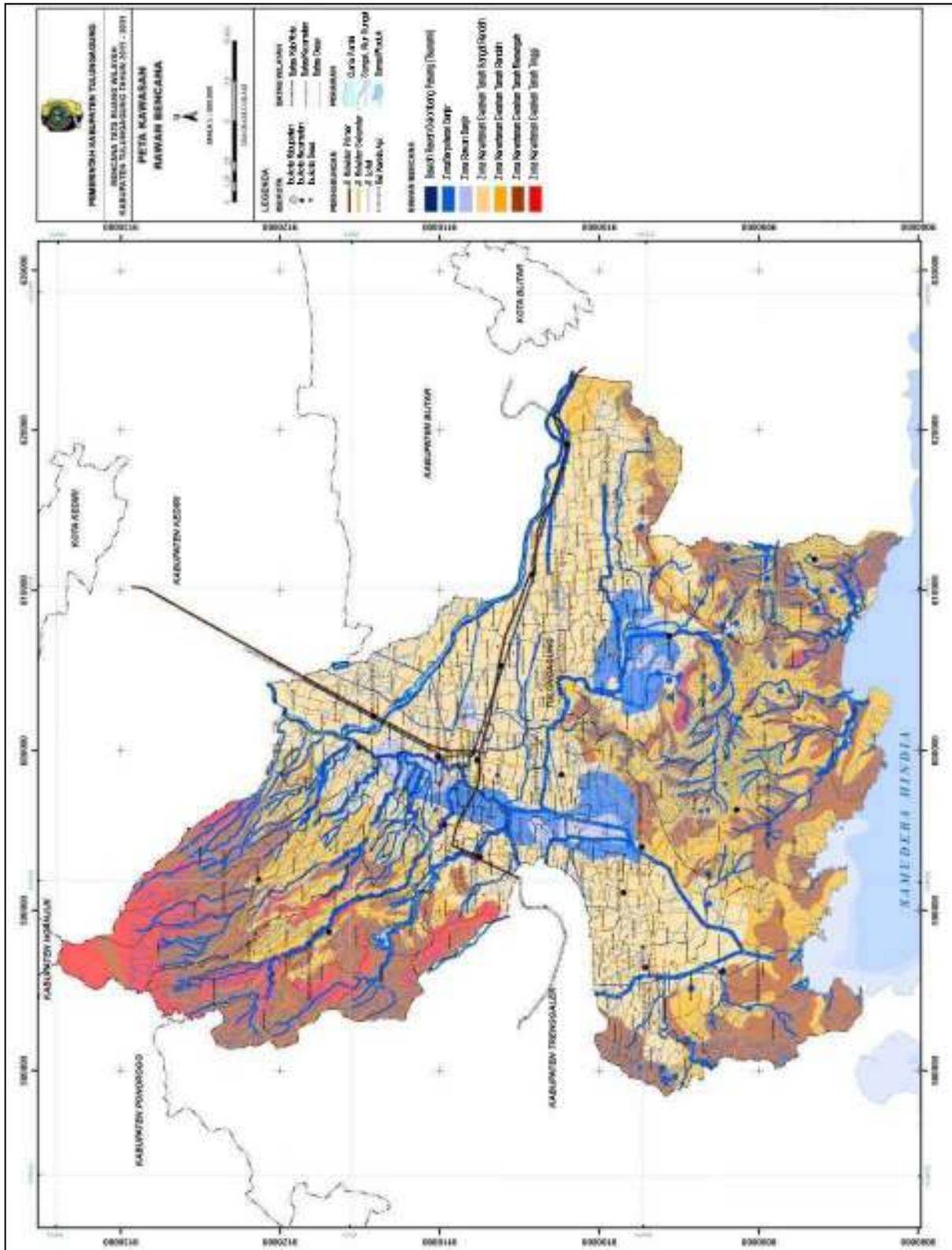
Sumber : BPBD Kabupaten Tulungagung

Bentuk kewaspadaan yang harus dilakukan terkait dengan kejadian bencana adalah sebagai berikut :

- a. Menghindari kerugian pada individu, masyarakat, daerah maupun wilayah melalui tindakan dini (sebelum bencana terjadi). Tindakan ini termasuk ke dalam tindakan pencegahan. Oleh karenanya, tindakan menghindari ini efektif sebelum bencana itu terjadi, atau untuk mengantisipasi bencana yang bisa terjadi di kemudian hari.
- b. Meminimalisasi kerugian pada individu, masyarakat, daerah maupun wilayah berupa kerugian yang berkaitan dengan orang, fisik, ekonomi, dan lingkungan bila bencana tersebut terjadi.
- c. Meminimalisasi penderitaan yang ditanggung oleh individu dan masyarakat yang terkena bencana. Tujuan utamanya adalah untuk membantu individu dan masyarakat yang terkena bencana supaya bisa bertahan hidup dengan cara melepaskan penderitaan yang langsung terjadi pada mereka yang terkena bencana.
- d. Memperbaiki kondisi sehingga individu dan masyarakat dapat mengatasi permasalahan akibat bencana, diutamakan untuk perbaikan infrastruktur, penyediaan air bersih, dll.

- e. Mempercepat pemulihan kondisi sehingga individu dan masyarakat bangkit ke kondisi sebelum bencana, atau bahkan mengejar ketertinggalan dari individu atau masyarakat lain yang tidak terkena bencana.

Gambar II.3
Peta Kawasan Rawan Bencana Alam



Sumber : RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032

2.1.4 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung tahun 2016 sebanyak 1.095.271 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sejumlah 548.759 jiwa atau sebesar 50,1% dan penduduk perempuan sejumlah 546.512 jiwa atau sebesar 49,9%. Jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Kedungwaru dengan jumlah 91.811 jiwa atau sebesar 8,38%, sedangkan Kecamatan Pucanglaban merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu sebesar 25.490 jiwa atau 2,33% dari total jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung. Sedangkan kepadatan penduduk mencapai 1.038 jiwa/km². Selanjutnya berdasarkan distribusi penyebaran penduduk tiap kecamatan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel II.12
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Orang/Km ²)
1	Besuki	19.410	18.990	38.400	467
2	Bandung	23.901	23.941	47.842	1.140
3	Pakel	26.878	27.084	53.962	1.496
4	Campurdarat	29.196	28.812	58.008	1.466
5	Tanggunggunung	12.816	12.845	25.661	218
6	Kalidawir	37.250	37.519	74.769	764
7	Pucanglaban	12.699	12.769	25.490	307
8	Rejotangan	40.574	40.302	80.876	1.216
9	Ngunut	41.686	41.459	83.145	2.205
10	Sumbergempol	36.279	35.914	72.193	1.838
11	Boyolangu	41.596	41.104	82.700	2.151
12	Tulungagung	33.361	34.080	67.441	4.933
13	Kedungwaru	46.086	45.725	91.811	3.087
14	Ngantru	29.094	28.576	57.670	1.557
15	Karangrejo	22.351	22.091	44.442	1.250
16	Kauman	26.447	26.374	52.821	1.713
17	Gondang	29.852	30.011	59.863	1.360
18	Pagerwojo	15.902	15.650	31.552	358
19	Sendang	23.381	23.244	46.625	483
Jumlah		548.759	546.512	1.095.271	1.038

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penduduk Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 meningkat sebesar 4,46% jika dibandingkan dengan tahun 2012.

Tabel II.13
Pertumbuhan Penduduk Menurut Tahun di Kabupaten
Tulungagung

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
2016	1.095.271	1.038

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
2015	1.021.190	967
2014	1.015.974	962
2013	1.053.276	998
2012	1.048.472	993

Sumber: BPS dan Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung

Dengan luas wilayah 1.055,65 Km², kepadatan penduduk pada tahun 2016 sebesar 1.038 jiwa per kilometer persegi, hal ini berarti bahwa setiap satu kilometer persegi dihuni sekitar 1.038 orang. Kepadatan tertinggi berada pada Kecamatan Tulungagung, yaitu 4.933 orang per kilometer persegi, sedangkan terendah terdapat di Kecamatan Tanggunggunung sebesar 218 orang per kilometer persegi. Kepadatan tahun 2016 meningkat sebesar 7,34% dari tahun 2015.

Tabel II.14
Jumlah Penduduk Per Usia di Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016

No.	Keterangan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4 tahun	41.672	39.689	81.361
2	5 - 9 tahun	41.693	39.870	81.563
3	10 - 14 tahun	40.988	39.395	80.383
4	15 - 19 tahun	37.327	36.561	73.888
5	20 - 24 tahun	32.795	35.230	68.025
6	25 - 29 tahun	34.238	37.697	71.935
7	30 - 34 tahun	35.976	40.453	76.429
8	35 - 39 tahun	37.147	41.661	78.808
9	40 - 44 tahun	38.831	42.412	81.243
10	45 - 49 tahun	36.971	39.441	76.412
11	50 - 54 tahun	31.426	33.443	64.869
12	55 - 59 tahun	28.386	28.945	57.331
13	60 - 64 tahun	20.843	19.871	40.714
14	65 +	41.898	51.242	93.140
TOTAL		500.191	525.910	1.026.101

Sumber: Kabupaten Tulungagung Dalam Angka Tahun 2017

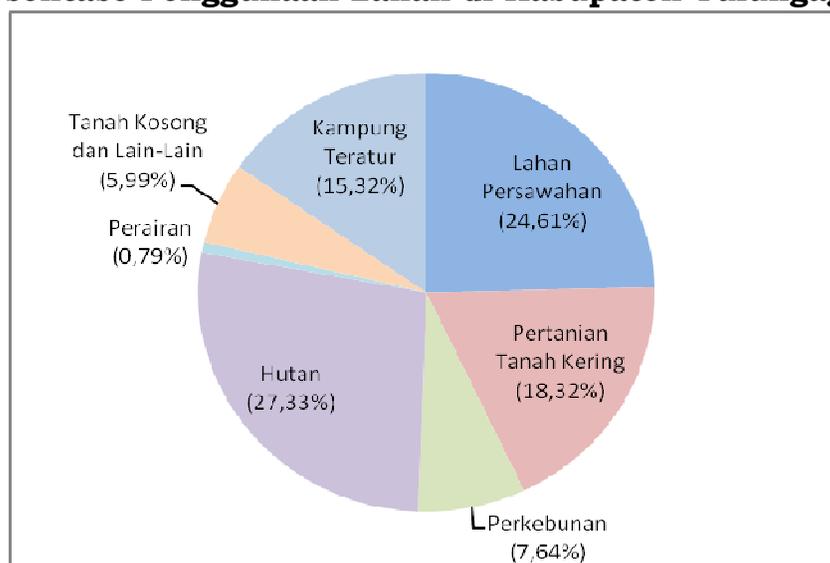
2.1.5 Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan merupakan salah satu faktor yang mencerminkan aktivitas manusia. Dalam aktivitas ini tercermin tindakan manusia yang terbaik terhadap sebidang lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik sebagian maupun keseluruhan. Pola penggunaan lahan pada hakekatnya adalah gambaran ruang dari hasil jenis usaha dan tingkat teknologi, jumlah manusia dan keadaan fisik daerah, sehingga pola penggunaan lahan di suatu

daerah dapat mencerminkan kegiatan manusia yang berada di daerah tersebut.

Penggunaan lahan bersifat dinamis, artinya penggunaan lahan dapat berubah tergantung dari dinamika pembangunan yang ada. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan atau yang sekarang kita kenal dengan rencana umum tata ruang perlu diperhatikan fakta wilayah yang ada diantaranya adalah penggunaan lahan yang saat ini ada. Hal ini dimaksudkan agar alokasi kegiatan yang direncanakan sesuai dengan potensi dan daya dukung wilayah. Penggunaan lahan di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar II.4
Prosentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Tulungagung



Sumber : RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032, diolah kembali

a. Lahan Persawahan

Secara umum lahan persawahan terdapat di bagian tengah Kabupaten Tulungagung dengan luas kurang lebih 24,61 %. Lahan ini merupakan lahan yang tergolong sangat baik atau subur dengan permukaan rata-rata datar dengan kelerengan 0-3 %. Tanah tidak peka terhadap erosi, tekstur lempung dan mudah diolah.

b. Pertanian Tanah Kering

Pertanian tanah kering adalah pertanian kering semusim, dengan jenis tanaman umur pendek saja. Di Kabupaten

Tulungagung lahan pertanian tanah kering mempunyai luasan kurang lebih 18,32%.

c. Perkebunan

Perkebunan adalah areal yang ditanami jenis tanaman keras. Di Kabupaten Tulungagung perkebunan menempati areal seluas kurang lebih 7,64%.

d. Hutan

Di Kabupaten Tulungagung hutan menempati areal seluas 27,33 % menempati sebagian daerah lereng Tenggara Gunung Wilis dan sebagian menempati daerah pegunungan selatan.

e. Perairan

Perairan adalah areal lahan yang tergenang yang berfungsi untuk perikanan air tawar. Di Kabupaten Tulungagung menempati areal seluas 0,79 %.

f. Kampung Teratur

Kampung teratur adalah lahan yang dimanfaatkan untuk permukiman penduduk dengan luas 15,32%.

g. Tanah Kosong dan Lain-Lain

Tanah kosong dan lain-lain adalah areal yang belum dimanfaatkan dengan luas 5,99%.

2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

Perkembangan wilayah yang semakin meningkat pada dasarnya diimbangi oleh adanya perkembangan ekonomi di semua sector oleh semua stakeholders pembangunan. Dalam rangka perkembangan wilayah terdapat paradigma pembangunan yang semakin berkembang yang mengantarkan kepada suatu pemikiran baru mengenai pembangunan yang lebih komprehensif, sebagaimana telah tertuang pada RTRW Kabupaten Tulungagung 2012-2032 telah memuat sistem perkotaan yang meliputi:

a. Penetapan pusat perkotaan;

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Perkotaan Tulungagung;
2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi:
 - PKLp Perkotaan Karangrejo;
 - PKLp Perkotaan Ngunut; dan

- PKLp Perkotaan Campudarat.
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi:
- Perkotaan Boyolangu;
 - Perkotaan Kauman;
 - Perkotaan Gondang;
 - Perkotaan Sendang;
 - Perkotaan Ngantru;
 - Perkotaan Pagerwojo;
 - Perkotaan Pakel;
 - Perkotaan Bandung;
 - Perkotaan Sumbergempol;
 - Perkotaan Besuki;
 - Perkotaan Rejotangan;
 - Perkotaan Kalidawir;
 - Perkotaan Pucanglaban; dan
 - Perkotaan Tanggunggunung.
- b. Rencana fungsi pusat pelayanan meliputi :
1. PKL yang berada di Perkotaan Tulungagung dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, olah raga, perdagangan, dan jasa;
 2. PKLp yang berada di Perkotaan Karangrejo dengan fungsi pusat pelayanan sebagai kawasan agropolitan, penyangga perkotaan, pariwisata, industri, dan kawasan lindung atau konservasi;
 3. PKLp yang berada di Perkotaan Ngunut dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat pengembangan kawasan pertanian, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, dan jasa; dan
 4. PKLp yang berada di Perkotaan Campurdarat dengan fungsi pusat pelayanan sebagai penyangga perkotaan, industri, perikanan, dan pariwisata.
- c. Pengembangan fasilitas kawasan perkotaan meliputi :
1. PKL Perkotaan Tulungagung direncanakan dikembangkan sebagai fasilitas perkotaan berupa pusat pemerintahan Kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala regional,

pusat pendidikan skala regional, pusat kesehatan skala regional, pusat pelayanan pariwisata, terminal penumpang tipe A, pusat pelayanan transportasi skala kabupaten, dan peribadatan;

2. PKLp Perkotaan Karangrejo direncanakan dikembangkan sebagai fasilitas perkotaan berupa perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, olah raga, terminal tipe C, terminal barang, industri, dan peribadatan;
 3. PKLp Perkotaan Ngunut direncanakan dikembangkan sebagai fasilitas perkotaan berupa pasar, pendidikan, industri, kesehatan, terminal tipe C, olah raga, dan peribadatan; dan
 4. PKLp Perkotaan Campurdarat direncanakan dikembangkan sebagai fasilitas perkotaan berupa pasar, pendidikan, kesehatan, terminal tipe C, olah raga, industri, dan peribadatan.
- d. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri ditetapkan dengan kriteria berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri, tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau tidak mengubah lahan produktif.

Kawasan peruntukan industri terbagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu industri mikro dan kecil, industri menengah, dan industri besar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, bahwa batasan industri kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri dengan kekayaan bersih Rp.50.000.000,00 – Rp.500.000.000,00 diluar tanah dan bangunan. Sedangkan industri menengah adalah kegiatan ekonomi produktif dengan kekayaan bersih sebesar Rp.500.000.000,00 – Rp.10.000.000.000,00 diluar tanah dan bangunan. Selibhnya diatas ketentuan tersebut dikategorikan industri besar. Sedangkan dibawah ketentuan industri kecil adalah usaha mikro.

Selain itu juga terdapat kelompok non sentra industri yang juga tersebar di seluruh kecamatan yang didominasi (83%) oleh industri rumah tangga. Lebih jelasnya persebaran industri di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

Kawasan peruntukan industri besar meliputi:

- Kecamatan Kauman;
- Kecamatan Kedungwaru;
- Kecamatan Besuki;
- Kecamatan Sumbergempol;
- Kecamatan Campurdarat;
- Kecamatan Ngunut; dan
- Kecamatan Ngantru.

Kawasan peruntukan industri menengah terdiri atas:

➤ Industri menengah berbagai jenis terdapat di:

- Kecamatan Besuki;
- Kecamatan Ngunut;
- Kecamatan Kedungwaru;
- Kecamatan Tulungagung;
- Kecamatan Ngantru
- Kecamatan Karangrejo; dan
- Kecamatan Kauman.

Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro terdiri atas:

➤ Kawasan sentra industri kecil marmer dan onix meliputi:

- Kecamatan Campurdarat; dan
- Kecamatan Besuki;

➤ Kawasan sentra industri makanan dan minuman meliputi:

- Kecamatan Tulungagung;
- Kecamatan Boyolangu; dan
- Kecamatan Kedungwaru.

➤ Kawasan sentra tembakau meliputi:

- Kecamatan Gondang;
- Kecamatan Boyolangu;
- Kecamatan Pakel ; dan
- Kecamatan Campurdarat

➤ Kawasan sentra industri batik meliputi:

- Kecamatan Kedungwaru; dan
- Kecamatan Kauman.
- Kawasan sentra industri konveksi meliputi:
 - Kecamatan Tulungagung;
 - Kecamatan Kedungwaru; dan
 - Kecamatan Boyolangu.
- Kawasan sentra industri kelapa meliputi:
 - Kecamatan Rejotangan;
 - Kecamatan Kalidawir;
 - Kecamatan Pucanglaban;
 - Kecamatan Ngunut;
 - Kecamatan Tanggunggunung; dan
 - Kecamatan Bandung.

Subsektor yang memberikan sumbangan terbesar dalam aktivitas industri di Kabupaten Tulungagung dalam lima tahun terakhir adalah makanan, minuman dan tembakau; tekstil, barang kulit dan alas kaki, dan bahan galian non logam; kayu dan sejenisnya; serta kertas, percetakan dan penerbitan. Untuk subsektor makanan, minuman, dan tembakau merupakan subsektor yang memberikan sumbangan sebesar 39% untuk sektor industri. Dalam waktu mendatang subsektor tersebut akan semakin menjadi subsektor andalan bagi perkembangan ekonomi Kabupaten Tulungagung.

Salah satu industri makanan minuman yang dapat dikembangkan adalah industri pengolahan kelapa dengan penerapan industri simbiosis dimana semua hasil dari kelapa dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai macam produk. Pada umumnya kelapa tumbuh di wilayah pesisir pantai, demikian pula halnya dengan wilayah Kabupaten Tulungagung. Batang, daun, buah, tempurung, sabut dan air kelapa, semuanya merupakan bahan yang sangat berguna dan dapat dijadikan bahan baku industri berbagai produk baik keperluan lokal maupun ekspor. Selain itu juga terdapat potensi budidaya di wilayah lainnya.

Rencana pengelolaan kawasan industri dan perdagangan, yaitu :

- Pengembangan kawasan sentra industri rumah tangga terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan;
- Pengembangan fasilitas perekonomian berupa koperasi pada setiap pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan;
- Pengembangan ekonomi dan perdagangan dengan pengutamaan UMKM; dan
- Penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan kemudahan dalam berinvestasi dan Penjelasan tentang kepastian hukum yang menunjang investasi.

e. Kawasan Industri

Sedangkan arahan pengembangan kawasan industri yang direncanakan di Kecamatan Ngantru dan Sumbergempol adalah sebagai berikut:

- Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis, memperhatikan daya dukung lahan dan tidak mengkonversi lahan pertanian secara besar-besaran.
- Pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi bawahan
- Pengembangan kegiatan industri harus didukung oleh sarana dan prasarana industri
- Pengembangan kegiatan industri berbasis sumberdaya lokal yang berkelanjutan
- Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial; serta
- Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan, dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.

f. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kabupaten Tulungagung merupakan wilayah potensial untuk pengembangan pariwisata sebagai salah satu alternatif daerah tujuan wisata unggulan Jawa Timur maupun Nasional, karena keanekaragaman obyek wisata yang dimilikinya.

Proses perencanaan dan pengembangan sektor Pariwisata Kabupaten Tulungagung menggunakan analisis *cluster* obyek wisata. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kawasan perencanaan yang mencakup beberapa obyek wisata sehingga mempermudah dalam proses perencanaan dan pengembangannya. Penetapan pusat pengembangan didasarkan kepada pertimbangan sebagai berikut:

- Kemudahan aksesibilitas
Aksesibilitas merupakan salah satu faktor perkembangan suatu wilayah maupun kawasan. Semakin mudah pencapaian/akses suatu tempat, maka semakin besar peluang berkembangnya suatu wilayah/kawasan tersebut.
- Jarak antara obyek wisata
Obyek-obyek wisata yang ada di wilayah perencanaan tersebar di seluruh wilayah. Karena pertimbangan jarak dari obyek yang satu dengan obyek yang lain maka perlu dilakukan pembagian berdasarkan cluster. Salah satunya dilihat dari kedekatan/jarak antara obyek wisata yang ada.
- Banyaknya pergerakan
Pola pergerakan wisatawan adalah kegiatan/perjalanan wisatawan ke obyek-obyek yang akan maupun telah dikunjungi. Pada umumnya wisatawan memiliki kecenderungan untuk berkunjung ke obyek wisata lain dengan jarak yang dekat dengan lokasi obyek wisata yang telah dikunjungi dan memiliki kegiatan/ragam wisata yang berbeda dan variatif.
- Arahkan oleh rencana tata ruang
Didalam arahan rencana tata ruang dalam pengembangan kawasan dilakukan dengan menumbuhkan embrio-embrio pertumbuhan baru. Embrio-embrio ini diletakkan pada daerah-daerah yang belum berkembang. Adanya embrio ini akan dilengkapi dengan sarana prasarana. Pembagian cluster salah

satunya menjadikan obyek sebagai magnet penarik pertumbuhan. Harapan adanya pembagian cluster ini adanya penyebaran sarana prasarana berdasarkan kebutuhan.

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Tulungagung terdiri atas:

- Kawasan wisata alam terdiri atas:
 - daya tarik wisata goa
 - daya tarik wisata air
 - daya tarik wisata pantai
 - agrowisata berada di Desa Sendang Kecamatan Sendang
- Kawasan wisata budaya terdiri atas:
 - daya tarik wisata peninggalan sejarah dan purbakala
- Kawasan wisata buatan sebagaimana terdiri atas:
 - pesanggrahan Argowilis berada di Kecamatan Sendang.

g. Kawasan Peruntukan Permukiman

Pengembangan permukiman di Kabupaten Tulungagung terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan pada kawasan permukiman perkotaan, dan permukiman pedesaan, secara faktual Kabupaten Tulungagung masih didominasi wilayah pedesaan. Luas kawasan permukiman di Kabupaten Tulungagung seluas 20.709,19 Ha.

Secara umum, kawasan permukiman di Kabupaten Tulungagung memiliki kecenderungan berkembang secara linier atau memanjang (*ribbon development*). Pola perkembangan seperti ini menunjukkan ketidakmerataan perembetan areal kekotaan di semua bagian sisi-sisi luar dari pada daerah kota utama. Perkembangan terjadi di sepanjang jalur transportasi yang ada, khususnya yang bersifat menjari (*radial*) dari pusat kota. Perkembangan linier ini juga dikarenakan adanya lahan pertanian yang menjadi penghalang bagi pertumbuhan permukiman. Di bagian selatan terdapat areal pertambangan dan hutan yang menyebabkan perkembangan permukiman hanya berkembang di sekitar jalur transportasi yang ada.

Hal ini menyebabkan adanya inefisiensi dalam pemerataan fasilitas dan utilitas, karena perkembangan yang linier tersebut

menyebabkan pola perkembangan fasilitas dan utilitas mengikuti pola jaringan jalan yang ada.

Didalam pengembangan permukiman harus disesuaikan dengan kebutuhan dan pangsa pasar. Dengan demikian diharapkan perumahan yang telah dikembangkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, maka didalam penyediaan perumahan diarahkan untuk masyarakat berpendapatan menengah kebawah, yaitu berupa rumah sederhana. Dengan komposisi perbandingan luas kapling yang akan dikembangkan antara kapling besar, sedang, dan kapling kecil adalah 1:3:6.

h. Peruntukan Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan adalah merupakan pusat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi perkotaan, jumlah penduduk yang padat menduduki lahan yang relatif sempit dan dinamika kehidupan yang relatif tinggi dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya. Penggunaan lahan perkotaan (urban) termasuk didalamnya penggunaan lahan untuk perumahan/permukiman, kegiatan perdagangan/jasa, perusahaan/industri dan fasilitas sosial yang terletak di kota kabupaten maupun kota-kota kecamatan.

Kawasan permukiman perkotaan adalah merupakan pusat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi perkotaan, jumlah penduduk yang padat menduduki lahan yang relatif sempit dan dinamika kehidupan yang relatif tinggi. Penggunaan lahan perkotaan (urban) termasuk didalamnya penggunaan lahan untuk perumahan / permukiman, kegiatan perdagangan / jasa, perusahaan/industri dan fasilitas sosial yang terletak di kota kabupaten maupun kota-kota kecamatan. Permukiman perkotaan diarahkan sebesar 8.448 Ha dikembangkan pada :

1. Kecamatan Tulungagung
2. Kecamatan Kedungwaru
3. Kecamatan Boyolangu
4. Kecamatan Ngunut

5. Kecamatan Bandung
6. Kecamatan Sumbergempol
7. Kecamatan Ngantru
8. Kecamatan Campurdarat
9. Kecamatan Kauman

Untuk pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Tulungagung dengan arahan kebijaksanaan yang ditetapkan mengacu pada :

- Memperhitungkan kecenderungan perkembangan pembangunan permukiman baru
- Memperhitungkan daya tampung perkembangan penduduk dan fasilitas/prasarana yang dibutuhkan
- Penggunaan lahan eksistingnya

Berdasarkan acuan-acuan tersebut di atas pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Tulungagung lebih diarahkan pada penggunaan lahan non produktif dengan kebijaksanaan penataan ruang secara rinci meliputi:

- Pemenuhan kebutuhan perumahan dengan penambahan luas kawasan permukiman perkotaan di lahan yang tingkat produktivitasnya rendah, yaitu lahan pertanian kering (tegalan, perkebunan, dll)
- Tindakan preventif terhadap dampak bencana yang terjadi di kawasan rawan bencana alam.
- Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan permukiman dengan memperhatikan proporsi ketersediaan ruang terbuka hijau dan infrastruktur penunjang permukiman terhadap luas total sebesar 40%.

Permukiman lahan perkotaan berdasarkan deliniasi rencana kawasan perkotaan meliputi Kecamatan yang merupakan daerah pusat pengembangan kegiatan pelayanan. Selain itu perkembangan permukiman perkotaan di arahkan pada lokasi-lokasi yang disusun dalam perencanaan IKK.

i. Peruntukan Permukiman Perdesaan

Kawasan permukiman perdesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan dan lahan kosong

serta aksesibilitas umumnya kurang, jumlah sarana dan prasarana penunjang juga terbatas atau hampir tidak ada, kawasan dengan ciri dan karakteristik sifat serta karakteristik lingkungan permukiman yang masih mencirikan tata dan lingkungan kehidupan rural. Interaksi pergerakan di lingkungan permukiman masih rendah dan sangat dipengaruhi oleh interaksi hubungan eksternal.

Secara fisiografis permukiman perdesaan di Kabupaten Tulungagung terletak di pergunungan dan dataran tinggi, dataran rendah, dan di pesisir. Setiap lokasi memiliki karakter tersendiri dan memerlukan penanganan sesuai karakter masing-masing.

Kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada wilayah pegunungan dan dataran tinggi kegiatan, pengembangan permukiman diarahkan pada pertanian tanaman keras, perkebunan dan sebagian hortikultura, dan pariwisata. Pada kawasan ini perkembangan permukiman harus diarahkan membentuk *cluster* dengan pembatasan pengembangan permukiman pada kawasan lindung.

Kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada dataran rendah, umumnya memiliki kegiatan pertanian sawah, tegal, kebun campur, termasuk peternakan dan perikanan darat. Sebagian besar permukiman perdesaan yang terletak pada dataran rendah memiliki kondisi tanah yang subur. Lahan kosong yang terletak pada tengah permukiman dan sepanjang jalan utama merupakan kawasan yang rawan perubahan penggunaan lahan dari kawasan pertanian menjadi kawasan terbangun. Pada kawasan ini diperlukan pembatasan pengembangan untuk kawasan terbangun.

Pada kawasan permukiman perdesaan yang memiliki potensi sebagai penghasil produk unggulan pertanian atau sebagai kawasan sentra produksi akan dilengkapi dengan lumbung desa modern, juga pasar komoditas unggulan. Selanjutnya beberapa komoditas yang memiliki prospek pengembangan melalui pengolahan akan dilakukan pengembangan industri kecil dengan membentuk sentra industri

kecil. Kawasan permukiman perdesaan sebesar 15.033,3 Ha dikembangkan pada:

1. Kecamatan Besuki
 2. Kecamatan Pakel
 3. Kecamatan Tanggunggunung
 4. Kecamatan Kalidawir
 5. Kecamatan Pucang Laban
 6. Kecamatan Rejotangan
 7. Kecamatan Karangrejo
 8. Kecamatan Gondang
 9. Kecamatan Pagerwojo
 10. Kecamatan Sendang
- j. Sosial dan Budaya

Kehidupan sosial budaya masyarakat Kabupaten Tulungagung sebagian besar diwarnai oleh budaya dan bahasa Jawa. Melestarikan budaya masyarakat yaitu Upacara tradisional seperti Siraman Pusaka Kyai Upas, Temanten Kucing, Upacara Adat Ulur-Ulur, upacara adat labuh laut, Lingkungan Budaya seperti makanan dan minuman khas Tulungagung dan pakaian adat Tulungagung, kesenian seperti Jaran Kepang, Tiban, Teater Tradisional seperti ludruk, ketoprak, wayang, teater tutur seperti kentrung, jemblung, Karawitan, dan lain-lain.

Peninggalan budaya di Kabupaten Tulungagung dimana wujudnya berupa Candi Penampihan (Asmara Bangun), Candi Miri Gambar, Candi gayatri, Candi Dadi, Candi Cungkup, Candi Jaho/Ngampel, Situs Mbah Bodho, Situs Rejotangan, Situs pakuwuhan/ Padepokan Aryojeding, Situs Sumberringin, Situs Tulungrejo, Makam Ngadirogo, Makam Mbah Wali, Makam Mbah Jayeng Kusumo, Musium Daerah, makam Srigading, Masjid dan Makam Sunan Kuning, Makam Patih Tulungagung R.M. Ngabei Sastrodimedjo, Makam Surontani, Makam Ngujang, dan Hutan Wisata Kandung.

Kaitannya dengan hari jadi Kabupaten Tulungagung, erat hubungannya dengan Prasasti Lawadan. Pada tahun 1205 M, masyarakat Thani Lawadan di selatan Kabupaten Tulungagung,

mendapatkan penghargaan dari Raja Daha terakhir, Kertajaya, atas kesetiaan mereka kepada Raja Kertajaya ketika terjadi serangan musuh dari timur Daha. Penghargaan tersebut tercatat dalam Prasasti Lawadan dengan candra sengkala "*Sukra Suklapaksa Mangga Siramasa*" yang menunjuk tanggal 18 November 1205 M. Tanggal keluarnya prasasti tersebut akhirnya dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2003.

Berkenaan dengan hal diatas, diperlukan adanya pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Perekonomian

Produk Domestic Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Menurut definisi, PDRB adalah nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Dari data PDRB dapat dilihat tingkat pertumbuhan dan struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya disajikan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan pertumbuhan ekonominya biasanya dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Tabel II.15
Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB
Kabupaten Tulungagung Atas Dasar Harga Konstan Tahun
2012-2016 (Tahun Dasar 2010)

No	Sektor	2012		2013		2014		2015		2016	
		(Rp Juta)	%								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.018.621,09	21,92	4.162.576,77	22,00	4.286.365,46	22,34	4.420.216,52	22,37	4.534.488,25	19,34

No	Sektor	2012		2013		2014		2015		2016	
		(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%
2	Pertambangan dan Pengegalian	786.722,20	3,94	794.168,92	3,70	820.005,49	4,02	832.313,66	3,87	844.179,75	3,60
3	Industri Pengolahan	3.894.067,45	21,00	4.085.892,45	20,62	4.341.579,41	20,49	4.608.090,85	20,67	4.896.607,60	20,88
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9.669,13	0,04	9.884,17	0,04	9.970,95	0,03	10.002,10	0,03	10.231,82	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.625,53	0,09	18.651,34	0,09	18.890,82	0,08	19.825,91	0,08	20.858,84	0,09
6	Konstruksi	1.695.635,03	9,24	1.821.603,76	9,44	1.938.823,96	9,61	1.989.515,74	9,26	2.069.714,19	8,83
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.990.314,75	20,21	4.305.679,99	20,39	4.540.828,85	19,83	4.800.818,48	19,85	5.061.712,58	21,59
8	Transportasi dan Pergudangan	367.546,15	1,82	404.582,06	1,89	443.441,75	1,99	475.891,03	2,06	511.335,92	2,18
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	332.516,26	1,69	356.791,98	1,71	389.266,52	1,81	422.349,11	1,89	454.189,54	1,94
11	Informasi dan Komunikasi	1.129.496,71	5,48	1.262.777,32	5,54	1.355.193,68	5,37	1.453.851,78	5,36	1.563.326,82	6,67
12	Jasa Keuangan dan Asuransi	401.085,37	2,13	453.690,24	2,24	480.459,24	2,27	507.825,20	2,31	537.231,68	2,29
13	Real Estate	391.690,50	1,95	422.755,48	1,98	454.449,46	1,92	478.308,05	1,98	504.258,60	2,15
14	Jasa Perusahaan	66.802,37	0,36	71.588,43	0,37	78.226,82	0,37	82.821,09	0,37	85.691,58	0,37
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	682.490,56	3,80	687.650,19	3,60	690.332,02	3,33	726.298,32	3,28	764.937,39	3,26
16	Jasa Pendidikan	759.816,98	4,08	820.807,48	4,18	886.086,30	4,24	949.087,04	4,27	1.016.760,21	4,34
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	197.566,26	0,98	213.039,64	0,99	244.846,56	1,04	249.721,95	1,04	257.588,19	1,10
18	Jasa lainnya	257.368,55	1,28	272.131,21	1,23	286.426,27	1,26	299.687,80	1,30	313.323,60	1,34
	PDRB	18.999.034,89	100,00	20.164.271,43	100	21.265.193,56	100	22.326.624,63	100	23.446.436,56	100,00

Sumber : Tulungagung Dalam Angka Tahun 2017

Tabel II.16
Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB
Kabupaten Tulungagung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun
2012-2016 (Tahun Dasar 2010)

No	Uraian	2012		2013		2014		2015		2016	
		(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%						
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.606.644	21,92	5.115.666	22,00	5.759.872	22,34	6.356.105	22,37	6.805.465,55	21,86
2	Pertambangan dan Pengegalian	827.736,5	3,94	859.591,1	3,70	1.036.451	4,02	1.098.868	3,87	1.168.850,94	3,76
3	Industri Pengolahan	4.414.253	21,00	4.796.303	20,62	5.281.705	20,49	5.873.824	20,67	6.486.637,81	20,84
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8.939,42	0,04	8.574,913	0,04	8.673,201	0,03	9.645,938	0,03	10.347,88	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan	18.854,52	0,09	20.710,03	0,09	21.622	0,08	23.652,18	0,08	26.031,30	0,08

No	Uraian	2012		2013		2014		2015		2016	
		(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%						
	Sampah, Limbah dan Daur Ulang										
6	Konstruksi	1.941.585	9,24	2.194.799	9,44	2.476.897	9,61	2.629.841	9,26	2.908.095,66	9,34
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.247.533	20,21	4.741.449	20,39	5.111.967	19,83	5.639.286	19,85	6.256.565,55	20,10
8	Transportasi dan Pergudangan	382.751,5	1,82	439.465,3	1,89	513.186,2	1,99	585.563,3	2,06	657.946,98	2,11
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	355.244,6	1,69	398.296,3	1,71	465.435,5	1,81	537.699,7	1,89	612.927,91	1,97
11	Informasi dan Komunikasi	1.151.740	5,48	1.289.062	5,54	1.385.339	5,37	1.524.238	5,36	1.679.168,59	5,39
12	Jasa Keuangan dan Asuransi	447.089,5	2,13	520.695,3	2,24	585.597,7	2,27	656.215,6	2,31	728.908,82	2,34
13	Real Estate	410.157,9	1,95	460.867,4	1,98	494.641,5	1,92	562.633,7	1,98	612.175,26	1,97
14	Jasa Perusahaan	75.455,98	0,36	84.992,46	0,37	94.673,92	0,37	105.122	0,37	113.557,93	0,36
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	799.598,4	3,80	836.099,7	3,60	857.997,3	3,33	931.769,1	3,28	1.026.382,69	3,30
16	Jasa Pendidikan	856.922,5	4,08	971.533,2	4,18	1.093.376	4,24	1.213.864	4,27	1.323.463,28	4,25
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	206.182,5	0,98	230.985,7	0,99	268.989	1,04	296.761,7	1,04	313.752,16	1,01
18	Jasa lainnya	267.990,4	1,28	286.170,6	1,23	324.166,9	1,26	370.206,3	1,30	396.958,49	1,28
	PDRB	21.018.679	100,00	23.255.262	100,00	25.780.590	100,00	28.415.295	100,00	31.127.236,80	100,00

Sumber : Tulungagung Dalam Angka tahun 2017

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu daerah, seperti penambahan jumlah industri, penambahan produksi sektor-sektor ekonomi, penambahan jumlah fasilitas infrastruktur (sekolah, jalan, rumah sakit dan fasilitas umum), penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan perkembangan-perkembangan lainnya.

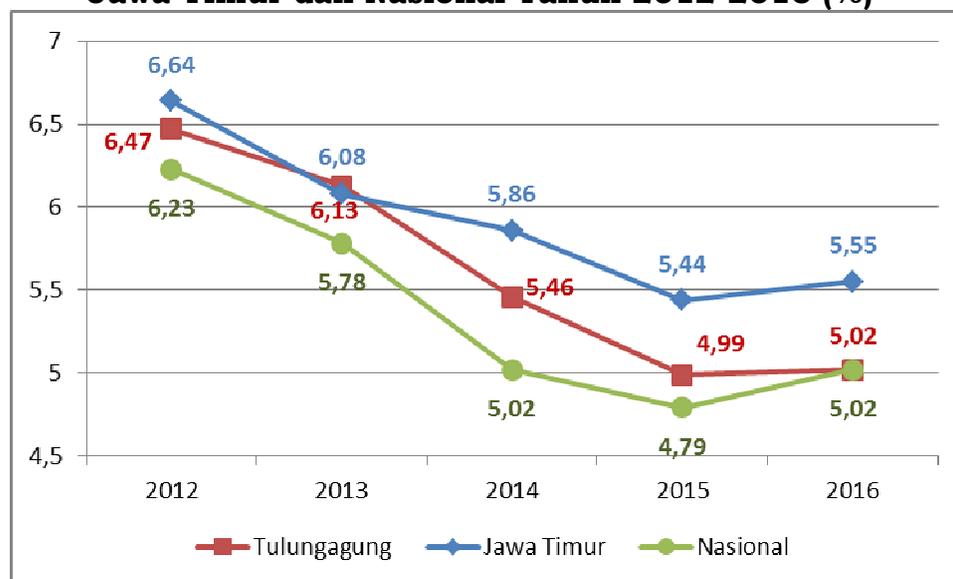
Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat sektoralnya, artinya apabila sebuah sektor mempunyai peranan paling penting dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah sektor mempunyai peranan penting dan pertumbuhannya tinggi, maka

sektor tersebut dapat menjadi lokomotif yang menarik pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga total pertumbuhan ekonomi menjadi besar. Dengan kata lain, gejolak sekecil apapun pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dihitung dari pertumbuhan PDRB Tulungagung yang didasarkan atas dasar harga konstan tahun 2010.

Grafik berikut menyajikan tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional selama kurun waktu tahun 2012-2016 berdasarkan tahun dasar 2010.

Gambar II.5
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012-2016 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung menurut sektor selama kurun waktu lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut :

Tabel II.17
Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor
Tahun 2012 - 2016 Tahun Dasar 2010 (Persen)

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,92	3,58	2,97	3,12	2,59
2	Pertambangan dan Penggalian	1,55	0,95	3,25	1,50	1,43
3	Industri Pengolahan	5,61	4,93	6,26	6,14	6,26
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,7	2,22	0,88	0,31	2,30
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,47	5,82	1,28	4,95	5,21
6	Konstruksi	6,30	7,43	6,44	2,61	4,03
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,49	7,90	5,46	5,73	5,43
8	Transportasi dan Pergudangan	7,15	10,08	9,60	7,32	7,45
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,18	7,30	9,10	8,50	7,54
10	Informasi dan Komunikasi	11,30	11,80	7,32	7,28	7,53
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	12,65	13,12	5,90	5,70	5,79
12	Real Estate	7,11	7,93	7,50	5,25	5,43
13	Jasa Perusahaan	4,28	7,16	9,27	5,87	3,47
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,27	0,76	0,39	5,21	5,32
15	Jasa Pendidikan	8,07	8,03	7,95	7,11	7,13
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,84	7,83	14,93	1,99	3,15
17	Jasa Lainnya	1,95	5,74	5,25	4,63	4,55
Kabupaten Tulungagung		6,47	6,13	5,46	4,99	5,02

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung

Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi kabupaten Tulungagung sebesar 6,13% atau mengalami penurunan sebesar 0,34% dibanding tahun 2012. Sektor penyumbang utama penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2013 ada tiga yaitu: Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri pengolahan; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sedang pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung sebesar 5,46% dengan penyumbang pertumbuhan terbesar adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, yang memberikan sumbangan pertumbuhan sebesar 22,34%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung tahun 2015 sebesar 4,99%, dengan penyumbang penurunan pertumbuhan terbesar adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan sebesar 22,37%. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung sebesar 5,02%, dengan penyumbang

pertumbuhan terbesar adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan sebesar 22,86%.

Selama kurun waktu 5 tahun yaitu mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, pertumbuhan ekonominya selalu menunjukkan tren naik turun terhadap semua sektor Pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Tulungagung semakin bergeser atau bertumpu pada sektor-sektor tersier. Ini berarti bahwa ekonomi daerah tidak bergantung lagi sepenuhnya kepada eksploitasi sumber daya alam, melainkan lebih bertumpu pada nilai tambah yang diperoleh baik dari pengolahan informasi, kapasitas ekonomi kreatif maupun organisasi dan koordinasi antara berbagai pihak.

Struktur Ekonomi dan Pergeserannya

Struktur ekonomi suatu daerah tercermin melalui seberapa besar peranan masing-masing sektor ekonomi/lapangan usaha terhadap jumlah total nilai tambah dari seluruh sektor/lapangan usaha. Struktur ekonomi suatu wilayah biasa disajikan dari PDRB atas dasar harga berlaku. Dari persentase sumbangan masing-masing sektor/lapangan usaha akan terlihat struktur ekonomi suatu daerah sehingga bisa diketahui ciri khas ekonomi, andalan, potensi, hasil pembangunan ataupun perubahan akibat kebijakan publik dari pemerintah daerah. Semakin besar kontribusi suatu sektor/lapangan usaha terhadap PDRB, semakin besar pula dominasi sektor/lapangan usaha tersebut dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Apabila suatu sektor/lapangan usaha yang paling dominan mengalami penurunan nilai tambah, maka struktur ekonomi juga akan mengalami perubahan karena kontribusinya yang cukup besar. Pertumbuhan suatu sektor/lapangan usaha yang lebih lambat jika dibanding sektor/lapangan usaha lain juga dapat menyebabkan pergeseran struktur ekonomi. Struktur ekonomi kabupaten Tulungagung selama kurun waktu tahun 2012 s/d tahun 2016 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel II.18
Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Tahun 2012-2016

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	21,92	22,00	22,34	22,37	22,86
2	Pertambangan dan Penggalian	3,94	3,70	4,02	3,87	3,76
3	Industri Pengolahan	21,00	20,62	20,49	20,67	20,84
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08
6	Konstruksi	9,24	9,44	9,61	9,26	9,34
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,21	20,39	19,83	19,85	20,10
8	Transportasi dan Pergudangan	1,82	1,89	1,99	2,06	2,11
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,69	1,71	1,81	1,89	1,97
10	Informasi dan Komunikasi	5,48	5,54	5,37	5,36	5,39
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,13	2,24	2,27	2,31	2,34
12	Real Estate	1,95	1,98	1,92	1,98	1,97
13	Jasa Perusahaan	0,36	0,37	0,37	0,37	0,36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,74	3,60	3,33	3,28	3,30
15	Jasa Pendidikan	3,90	4,18	4,24	4,27	4,25
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,95	0,99	1,04	1,04	1,01
17	Jasa Lainnya	1,46	1,23	1,26	1,30	1,28
Kabupaten Tulungagung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasanya struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu tahun 2012 - 2016 terjadi pergeseran struktur ekonomi yang mana sektor primer, sekunder dan tersier selama kurun waktu lima tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini bisa dimaklumi karena beberapa faktor seperti faktor luas lahan dan faktor iklim/cuaca.

Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah mengendalikan harga komoditi-komoditi beredar di masyarakat. Dengan melihat data inflasi dapat diketahui apakah

perencanaan program pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.

Inflasi yang tinggi menunjukkan terjadinya kenaikan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari yang cukup tinggi atau dapat juga dikatakan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa tersebut (nilai riil uang menurun).

Data harga yang disajikan meliputi indeks harga konsumen (IHK) dan laju inflasi. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator inflasi yang dihitung setiap bulan berdasarkan perkembangan harga barang-barang dan jasa-jasa yang dikonsumsi di Kabupaten Tulungagung.

Mulai tahun 1999 penghitungan inflasi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dimana inflasi 1 tahun merupakan penjumlahan inflasi 12 bulan, tetapi dihitung point demi point. Dalam penghitungan Inflasi tahun 2012, digunakan tahun dasar 2002. Pada tahun 2012 inflasi sebesar 4,63% terbagi dalam 7 kelompok. Inflasi terbesar pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 6,83% diikuti kelompok makanan yaitu sebesar 5,95% dan pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 5,16%.

Tabel II.19
Persentase Perubahan IHK/Inflasi (2002 = 100) Tahun 2016

Kelompok/Sub Kelompok	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	
1	2	3	4	5	6	7	
Umum	0,57	-0,24	-0,52	-0,52	0,14	0,76	
1. Makanan	0,23	-1,51	-0,63	-0,63	-0,10	2,19	
2. Makanan jadi, minuman, rokok & tembakau	1,24	0,21	0,25	0,29	0,49	0,91	
3. Perumahan	0,44	-0,03	-0,13	0,08	0,14	0,10	
4. Sandang	0,80	0,78	1,48	-0,07	0,21	0,72	
5. Kesehatan	0,30	0,39	0,14	0,38	0,13	0,18	
6. Pendidikan, rekreasi olah raga	0,09	0,05	0,01	0,25	0,09	0,42	
7. Transport, komunikasi dan jasa keuangan	-1,33	0,00	-0,13	-2,25	0,07	0,03	
Lanjutan Tabel							
Kelompok/Sub Kelompok	Juli	Agustus	Sept.	Okt	Nop.	Des.	Inflasi
	8	9	10	11	12	13	14
Umum	0,76	-0,36	0,20	-0,15	0,49	0,39	1,66
1. Makanan	2,19	-2,85	0,40	-1,87	1,48	0,92	0,40
2. Makanan jadi, minuman,	0,91	0,03	-0,14	0,32	0,22	0,65	5,16
3. Perumahan	0,10	0,08	0,17	0,39	0,62	0,14	2,26
4. Sandang	0,72	-0,26	1,19	-0,19	0,02	-0,12	6,55

5. Kesehatan	0,18	0,86	0,04	1,76	0,04	0,07	4,88
6. Pendidikan, rekreasi dan olah raga	0,42	0,31	0,34	0,01	0,01	0,01	1,68
7. Transport, komunikasi dan jasa keuangan	0,03	0,95	0,08	0,18	0,01	0,17	-2,27

Sumber/Source : Kabupaten Tulungagung Dalam Angka Tahun 2017

Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi.

Tingkat pemerataan pendapatan akan terjadi jika semua orang mendapatkan distribusi pendapatan yang sama rata, atau dengan kata lain Rasio Gini-nya sama dengan nol. Artinya distribusi pendapatan yang diterima hampir sama dengan banyak penduduk. Berikut arti nilai dari besaran gini rasio:

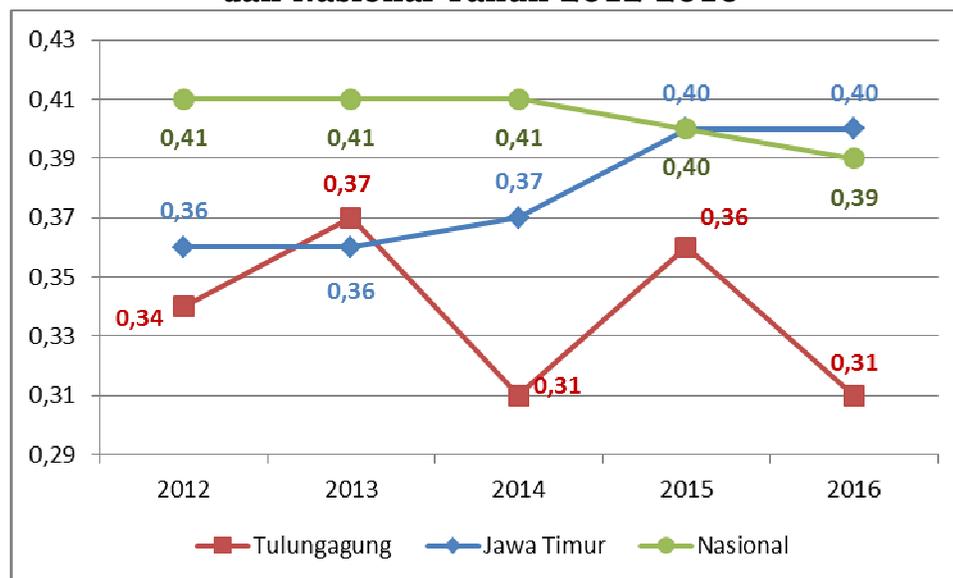
$G < 0.3$ ————— artinya ketimpangan rendah

$0.3 \leq G \leq 0.5$ ————— artinya ketimpangan sedang

$G > 0.5$ ————— artinya ketimpangan tinggi

Menurut kategori tersebut, maka Kabupaten Tulungagung dikategorikan memiliki ketimpangan sedang dan cenderung rendah, yang berarti distribusi pendapatan masyarakat Tulungagung cenderung semakin merata.

Gambar II.6
Indeks Gini Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012-2016



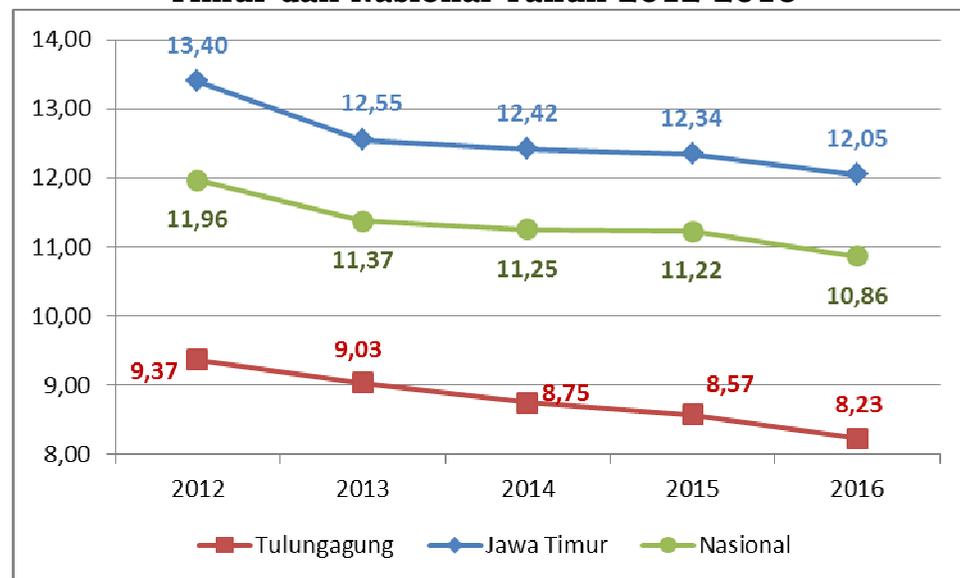
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Tingkat Kemiskinan

Sesuai Amanat Nasional dan Komitmen Pemerintahan Kabupaten Tulungagung bahwa perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Upaya ini telah sesuai dengan substansi pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan pemerataan. Berbagai strategi pembangunan ekonomi yang dilakukan, dengan tetap berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Adapun wujud nyata dari upaya tersebut adalah menurunnya jumlah penduduk miskin.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita perbulan lebih kecil dari Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan adalah suatu garis yang menunjukkan nilai pengeluaran makanan per orang untuk memenuhi kebutuhan dasar 2100 kkal per hari ditambah dengan pengeluaran non makanan selama 1 bulan.

Gambar II.7
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik

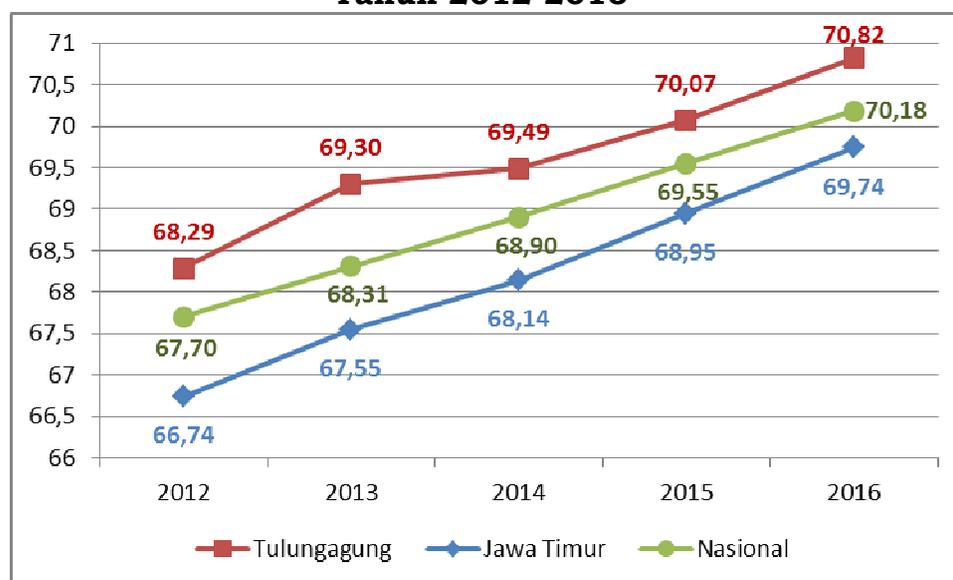
2.2.2 Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah

satu ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan dalam konteks kesejahteraan sosial. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia dan, juga untuk melihat seberapa jauh pertumbuhan ekonomi berdampak pada pembangunan manusia. Dengan mengevaluasi angka IPM, keterbandingan/posisi pembangunan manusia antar kabupaten/kota di Tulungagung dapat diketahui baik dari angka IPM nya sendiri maupun dari tiga komponen pembentuknya (indikator kesehatan, indikator pendidikan dan indikator daya beli). Kontribusi ketiga komponen IPM tersebut juga diperlukan untuk menetapkan prioritas program pembangunan. Data IPM menjadi sangat penting dan bernilai strategis serta dibutuhkan oleh banyak kalangan terutama pemerintah sebagai bahan rujukan dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah.

Gambar II.8
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel II.20
IPM Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Kediri dan Jawa Timur Tahun 2012 - 2016

Kabupaten/ Kota	IPM				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kab. Kediri	67,29	68,01	68,44	68,91	69,87
Kota. Kediri	73,66	74,18	74,62	75,67	76,33
Kab. Nganjuk	68,07	68,98	69,59	69,90	70,50

Kabupaten/ Kota	IPM				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kab. Blitar	66,17	66,49	66,88	68,13	68,88
Kota Blitar	73,53	74,53	75,26	76,00	76,71
Kab. Tulungagung	68,29	69,30	69,49	70,07	70,82
Kab. Trenggalek	65,01	65,76	66,16	67,25	67,78
Jawa Timur	66,74	67,55	68,14	68,95	69,74

Sumber : Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2017

Seperti halnya kabupaten/kota eks. Karesidenan Kediri lainnya, posisi status pembangunan manusia Kabupaten Tulungagung, berdasarkan perspektif kinerja dalam Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016 masih beragam. Perlu diketahui, nilai IPM hanya merupakan nilai besaran IPM setiap kabupaten/kota dalam Provinsi Jawa Timur. Banyak faktor yang mempengaruhi, seperti kekayaan alam, serta potensi lainnya yang dimiliki antar kabupaten/kota yang sebelumnya sudah mendukung (faktor – *endowment*).

Merubah sistim penyaluran dana bantuan sekolah tidak lagi melalui pendekatan sekolah secara menyeluruh, tetapi sebagian dari dana tersebut diperuntukkan pula bagi mereka yang belum pernah sekolah agar dapat memperoleh haknya untuk menjalani pendidikan, serta bagi mereka yang putus sekolah agar dapat kembali kebangku sekolah.

Menurut ukuran *UNDP* refleksi keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan yang paling representatif adalah tercapainya hidup berumur panjang. Menuju kearah ini identik dengan membangun secara kompleks, karena keberhasilan pembangunan dibidang lainnya sangat mempengaruhi upaya-upaya menuju hidup sehat. Setidaknya untuk mempertahankan umur rata-rata penduduk yang relatif lama tersebut, instrumen (fasilitas dan tenaga kesehatan) diujung depan harus tetap eksis, utamanya pada daerah sulit dan terpencil. Seperti bidan desa, posyandu, maupun polindes. Hal ini penting direkomendasikan karena instrumen inilah yang paling dekat dengan masyarakat. Sehingga pertolongan pertama untuk memperoleh layanan kesehatan bagi setiap penduduk, akan dilayani oleh instrumen tersebut.

Tetap membuka kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan secara dini. Seperti, Pekan

Imunisasi Nasional (PIN) dan layanan terhadap ibu hamil. Utamanya diberlakukan terhadap keluarga miskin, agar resiko fatal terhadap balita, ibu hamil dan ibu nifas dapat teratasi secara dini pula.

Kecepatan Pencapaian Pembangunan Manusia

Posisi masing-masing kabupaten/kota yang berkaitan dengan pencapaian pembangunan manusia, dicerminkan oleh besaran IPM dan reduksi *shortfall* per tahun yang dibandingkan dengan reduksi *shortfall* Kabupaten Tulungagung. Dari penghitungan IPM berdasar indeks kesehatan yang dicerminkan oleh besaran angka harapan hidup, dalam usaha meningkatkan nilai indeks kesehatan ini, pemerintah daerah perlu memperhatikan wilayah yang memiliki indeks kesehatan yang masih rendah, antara lain dengan mengupayakan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan pembangunan sarana kesehatan yang memadai.

Dalam perspektif peningkatan derajat kesehatan, karena komponen indeks kesehatan pada penghitungan IPM dicerminkan oleh besaran angka harapan hidup, maka untuk memaksimalkan peningkatan angka harapan hidup yaitu dengan usaha menurunkan tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan harus terus menjadi prioritas. Beberapa faktor yang cukup sensitif terhadap perubahan angka kematian bayi dan ibu seperti pola makanan yang bergizi dan penolong kelahiran/persalinan, perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak terkait. Dari penghitungan komponen kedua pendukung IPM yaitu indeks pendidikan, dari hasil penghitungan indeks kesehatan dan indeks pendidikan, didapat korelasi bahwa sebagian besar wilayah dengan indeks kesehatan rendah juga merupakan daerah yang memiliki indeks pendidikan rendah. Hal ini sesuai dengan teori yang ada yaitu semakin rendah tingkat pendidikan yang dimiliki di suatu wilayah maka tingkat kesehatan masyarakat pun juga semakin rendah.

Rendahnya kedua komponen tersebut, diduga karena pengaruh kultur yang cukup melekat pada masyarakat terhadap

kemampuan memanfaatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini juga dapat diartikan bahwa usaha dalam meningkatkan IPM akan mengalami kesulitan jika dilihat dari segi kesehatan maupun pendidikan, karena kedua komponen tersebut berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang tidak mudah mengalami perubahan, seperti masih banyak ditemukan rumah tangga yang lebih memilih dukun bersalin daripada tenaga medis sebagai penolong kelahiran bayi. Komponen ketiga pendukung angka IPM yang perlu dievaluasi adalah indeks daya beli atau PPP (*Purchasing Power Parity*/daya beli). Variabel ini cukup berpengaruh, karena identik dengan capaian kesejahteraan masyarakat secara ekonomi. Kontribusi PPP ini akan tercapai seiring peningkatan kesejahteraan penduduk sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Seiring menggeliatnya ekonomi di daerah yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat pada tahun 2012 di seluruh kabupaten/kota juga mengalami peningkatan, sehingga mampu mendongkrak IPM.

b. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat serta ketidakmampuan dan keterbatasan masyarakat menjadikan permasalahan PMKS semakin kompleks. Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan beberapa upaya dalam rangka penanganan Masalah PMKS sekaligus menciptakan keterpaduan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan Sosial Anak.

Tabel II.21
Penanganan PMKS di Kabupaten Tulungagung

No	Uraian	2014	2015	2016
1	Prosentase penurunan PMKS	-	-	0,97
2	Prosentase kasus kekerasan anak yang ditangani	100	100	100

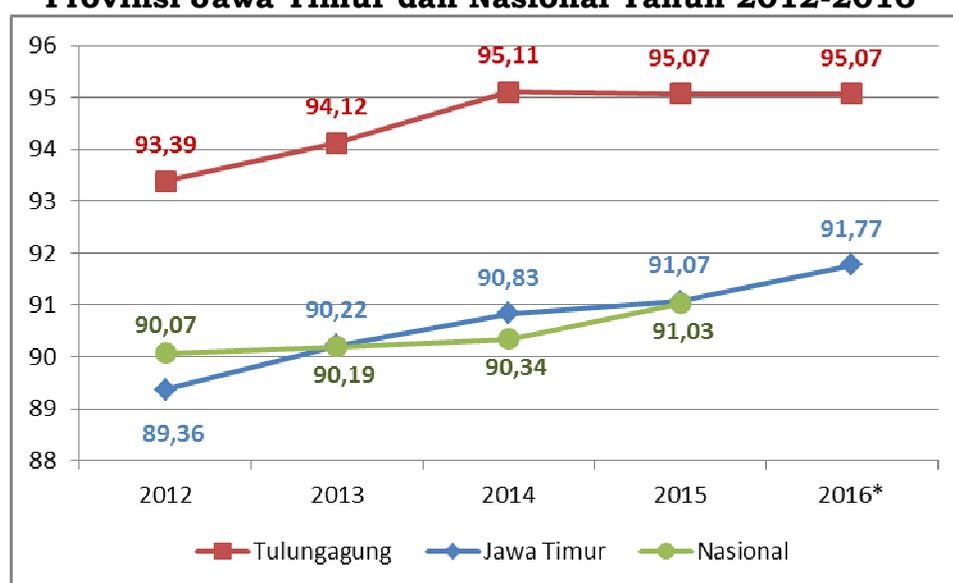
Sumber: Dinsos PPPAKB

c. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan

memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Gambar II.9
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik

2.2.3 Kebudayaan

Seni Budaya adalah suatu segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang mengandung unsur keindahan (estetika) secara turun temurun dari generasi ke generasi. Jumlah karya seni budaya yang mendapatkan penghargaan pada tahun 2016 sebanyak 2 penghargaan. Hal ini mencerminkan karya seni budaya di Tulungagung berkembang dengan pesat.

Tabel II.22
Jumlah Karya Seni Budaya yang Mendapatkan Penghargaan
Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Seni Budaya yang Mendapatkan Penghargaan	2	2	3	3	2

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Cagar budaya yang terdiri dari benda, struktur, situs dan kawasan merupakan warisan yang harus dipelihara sesuai amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2010. Pada tahun 2014 sampai dengan 2016 indikator yang digunakan adalah jumlah situs budaya yang dikelola, tetapi pada kelanjutannya berubah menjadi prosentase seni budaya yang dilestarikan. Adapun jumlah situs budaya yang telah dikelola dengan baik sampai dengan tahun 2014 adalah sebanyak 7 situs, tahun 2015 sebanyak 8 situs dan tahun 2016 sebanyak 8 situs. Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat hal yang lain yang perlu mendapatkan perhatian pada aspek kebudayaan adalah: Semakin lunturnya nilai-nilai budaya di masyarakat; semakin turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah; dan belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya.

Tabel II.23
Seni Budaya yang Dilestarikan Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Prosentase seni budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Pendidikan

Untuk mencermati keberhasilan tingkat pendidikan dapat diukur melalui dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling* (MYS) dan Angka Harapan lama Sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling* (EYS). Indikator rata-rata lamanya sekolah/MYS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung

dalam penghitungan rata-rata sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Angka Harapan Lama sekolah/EYS didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan Lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Tabel II.24
Perkembangan Pembangunan Urusan Pendidikan Tahun 2012 – 2016

No	Variabel Pendidikan	Tahun					Satuan
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Melek huruf (10 tahun ke atas)	94,34	94,92	95,21	95,41	BPS tdk menghitung AMH diganti HLS	%
2	APK SD/MI	103,91	103,93	103,43	104,75	104,79	%
3	APM SD/MI	94,56	95,65	96,09	97,49	98,13	%
4	APK SMP/Mts	97,62	98,85	94,45	99,81	99,58	%
5	APM SMP/MTs	74	75,23	79,40	82,10	83,53	%
6	APK SMA/SMK/MA	69,53	72,42	73,01	77,83	83,54	%
7	APM SMA/SMK/MA	52	55,68	57,34	60,75	61,86	%
8	Angka Partisipasi Sekolah SD	97,13	87,04	93,32	95,32	99,66	%
9	Angka Partisipasi Sekolah SMP	90,62	88,21	95,33	98,99	95,23	%
10	Angka Partisipasi Sekolah SMA	54,44	61,42	63,00	68,40	87,73	%
11	Buta Huruf	5,66	-	-	-	-	-
12	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	0,02	0,03	0,02	0,20	0,03	%
13	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS/Paket B	0,59	0,71	0,54	0,54	0,26	%
14	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	0,81	0,31	0,65	0,50	0,63	%
15	Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A	99,86	100	101	100	100	%
16	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS/Paket B	99,91	99,95	99,96	99,96	100	%
17	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA/Paket C	99,98	99,69	99,87	99,91	100	%
18	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS	99,80	100	100	98,62	99,86	%
19	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	78,40	81,05	62,50	90,93	88,40	%
20	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4	82,58	80,46	86,41	87,17	88,44	%

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Tabel II.25
Indikator Pendidikan Kabupaten Tulungagung 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Indeks Pendidikan	0,58	0,60	0,60	0,61	0,62
Harapan Lama Sekolah/EYS (tahun)	11,93	12,58	12,72	12,73	13,03
Rata-rata lama sekolah/MYS (tahun)	7,41	7,44	7,45	7,72	7,73

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung

Adapun sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2016 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah.

Tabel II.26
Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun 2016

Jenjang	Jumlah Lembaga	Jumlah Siswa	Jumlah Guru	Jumlah Perpustakaan	Jumlah Lab	Jumlah Kantor	Jumlah Ruang Kelas	Kondisi Ruang Kelas		
								Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
TK/RA Neg./Swasta	637	30,234	2,526	87	-	489	1.600	1.345	220	35
SD/MI Negeri dan Swasta	777	98,421	8,371	485	69	470	5,125	3.781	991	353
SMP/MTS Neg. dan Swasta	115	49,187	3.704	92	135	470	1.504	1.289	188	27

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

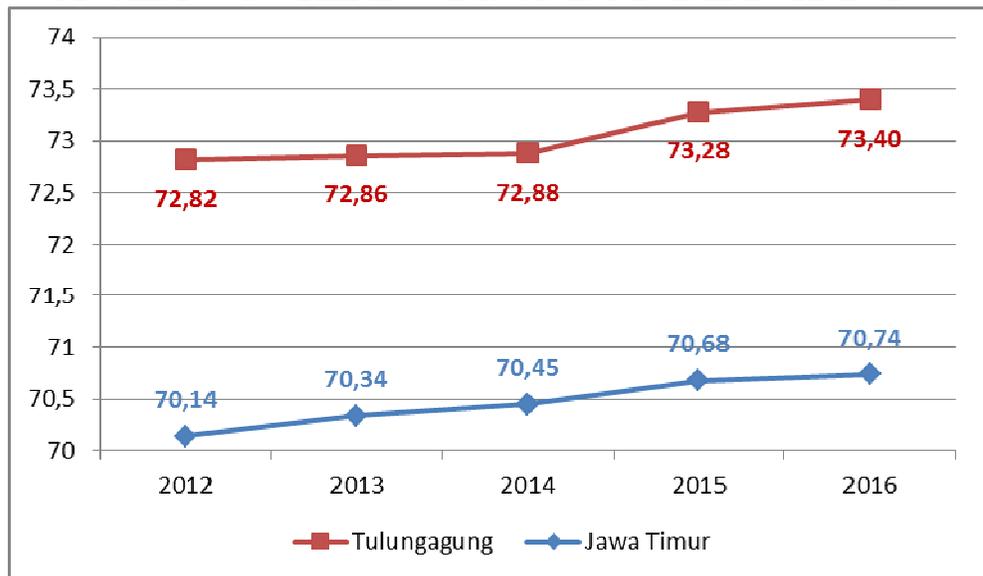
2.3.2 Kesehatan

a. Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2012-2016

AHH adalah salah satu indikator untuk menilai derajat kesehatan masyarakat. Melalui AHH ini evaluasi kinerja pemerintah, dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya, bisa diukur.

AHH sangat berkaitan erat dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi suatu wilayah. Keberhasilan program kesehatan umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup. Bila pembangunan sosial ekonomi semakin baik, maka kecenderungannya AHH akan semakin tinggi, atau sebaliknya. Di bawah ini adalah data series AHH tahun 2012-2016.

Gambar II.10
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Tulungagung,
Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012-2016



Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung

Tabel II.27
Indikator Kesehatan Kabupaten Tulungagung 2012-2016

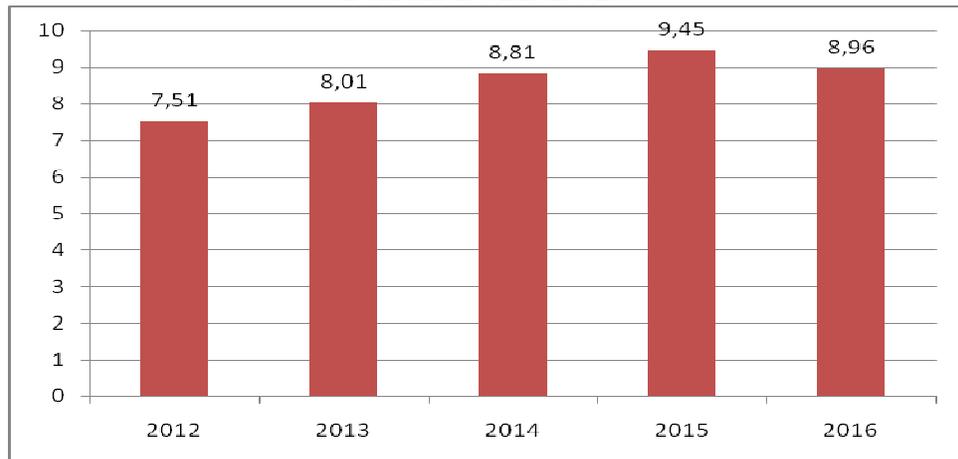
Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Indeks Kesehatan	0,81	0,81	0,81	0,82	0,82
Angka Harapan Hidup	72,82	72,86	72,88	73,28	73,40

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung

b. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Tulungagung Tahun 2012-2016

Salah satu indikator keberhasilan program kesehatan disuatu wilayah dapat dilihat dari tinggi rendahnya besaran AKB pada periode tertentu. AKB didefinisikan sebagai banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Nilai normatif AKB kurang dari 40 sangat sulit diupayakan penurunannya (*hard rock*), antara 40-70 tergolong sedang namun sulit untuk diturunkan (*medium rock*), dan lebih besar dari 70 tergolong mudah untuk diturunkan (*soft rock*). Berikut series AKB periode 2012-2016.

Gambar II.11
Angka Kematian Bayi Kabupaten Tulungagung
Tahun 2012-2016



Sumber : Dinas Kesehatan

Beberapa permasalahan utama yang masih dihadapi Tulungagung terkait dengan angka kematian bayi antara lain : 1) masih memburuknya kualitas air permukaan dan air tanah akibat pencemaran, pemanasan global, rusaknya lingkungan dan tidak tertatanya sistem pembuangan limbah rumah tangga, menyebabkan menurunnya akses air bersih pada masyarakat khususnya masyarakat miskin, 2) distribusi tenaga kesehatan belum merata, lebih terkonsentrasi di daerah perkotaan, dan 3) masih rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan.

c. Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tulungagung Tahun 2016

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memajukan kesehatan masyarakat yang dikelola oleh kader posyandu. Terdapat lima program prioritas dalam posyandu, yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare.

Jumlah posyandu aktif di Tulungagung sebanyak 1.240, yang mana kerja masing-masing posyandu tersebut dibantu oleh puskesmas atau puskesmas pembantu. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan posyandu yaitu dengan meningkatkan kualitas posyandu dan kualitas kader atau kinerja kader posyandu.

d. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Tulungagung Tahun 2016

Besarnya rasio dokter per satuan penduduk di Tulungagung pada tahun 2016 yaitu 12 per 100.000 penduduk. Rasio ini menunjukkan masih sangat rendahnya ketersediaan jumlah dokter jika dibandingkan dengan tingginya jumlah penduduk di Tulungagung.

e. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Tulungagung Tahun 2012 - 2016

Jumlah rumah sakit pemerintah di Tulungagung sebanyak 1 rumah sakit. Sedangkan rumah sakit TNI/Polri sebanyak 1 rumah sakit dan rumah sakit swasta sebanyak 10 rumah sakit.

Tabel II.28
Perkembangan Pembangunan Urusan Kesehatan Tahun 2012 - 2016

No	Variabel Kesehatan	Tahun					Satuan
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Jumlah Kematian Bayi	121	119	135	142	136	Jiwa
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	7,51	8,01	8,81	9,45	8,96	/1000 KH
3	Jumlah kematian Ibu	11	17	16	16	20	Jiwa
4	Angka Kematian Ibu (AKI)	68,29	114,44	104,4	106,53	131,73	/100.000 KH
5	Jumlah Posyandu Balita	1.236	1,239	1,239	1,240	1.240	Pos
6	Jumlah Posyandu Purnama dan Mandiri (PURI)	1.025	1,036	1,092	1,110	1.110	Unit
7	Jumlah Posyandu Lansia	331	331	350	350	350	Unit
8	Jumlah Kader Posyandu Aktif	6180	6,195	6,195	6,200	6.200	Orang
9	Jumlah Puskesmas	31	31	31	31	32	Unit
10	Balita Gizi Buruk	0,13	54	40	46	51	%
11	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	60,72	68,45	82,63	86,35	83,24	%
12	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga kesehatan Yang memiliki Kompetensi Kebidanan	89,57	89,03	92,74	91,50	93,60	%
13	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization	74,17	96,31	91,51	85,24	91,14	%
14	Cakupan Balita Gizi buruk yang mendapat Perawatan	100	100	100	100	100	%
15	Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC	38	34,07	35	32	30,32	%
16	Cakupan penemuan dan penanganan Penderita Penyakit DBD	94,44	100	100	100	100	%
17	Cakupan Pelayanan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	0,54	1,8	15,7	12,4	16,16	%
18	Cakupan kunjungan bayi	94,79	95,72	96,77	97,84	92,69	%

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Iskak

Kemajuan urusan kesehatan dapat diukur dari beberapa indikator diantaranya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dan cakupan pelayanan rujukan pasien masyarakat miskin. Indikator diatas secara umum menunjukkan tren yang positif, dimana cakupan

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tahun 2016 pada angka 93,60% dan cakupan pelayanan rujukan pasien masyarakat miskin tahun 2016 pada angka 16,16%.

Dalam kurun waktu 2012-2016, jumlah puskesmas mengalami penambahan yang tidak terlalu besar. Jika dibandingkan dengan penambahan jumlah penduduk Tulungagung, maka penambahan jumlah puskesmas belum dapat mengimbangnya. Karena kecilnya kenaikan jumlah tersebut, maka rasio puskesmas tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 3 unit untuk setiap 100.000 penduduk.

Tabel II.29
Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Tulungagung
Tahun 2012-2016

No.	Unsur Kesehatan	2012	2013	2014	2015	2016
1	RSUD	1	1	1	1	1
2	Rumah Sakit TNI/Polisi	1	1	1	1	1
3	Rumah Sakit Umum Swasta	6	6	6	6	6
4	Rumah Sakit Khusus Swasta	3	3	4	4	4
5	Puskesmas	31	31	31	31	32
6	Puskesmas Pembantu	67	67	67	67	66
7	Puskesmas Keliling	31	31	31	29	36
8	Posyandu Balita	1.239	1.239	1,239	1.240	1.240
9	Rumah Bersalin	-	-	-	-	-
10	Balai Pengobatan/Klinik	17	17	23	25	23
11	Polindes	178	178	178	178	178
12	Dokter	171	171	171	222	218
13	Perawat Kesehatan	900	900	900	1.083	1386
14	Bidan	228	271	271	608	696

Sumber : Dinas Kesehatan

f. Rasio Bidan Per Satuan Penduduk Tahun 2016

Besarnya rasio bidan per satuan penduduk Tahun 2016 di Kabupaten Tulungagung adalah 36 bidan per 100.000 penduduk.

2.3.3 Pekerjaan Umum

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat guna memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain.

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik mempunyai andil besar terhadap tercapainya perkembangan antar daerah yang seimbang dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan. Utamanya di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Tulungagung adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu perlu adanya upaya penambahan dan perbaikan jalan agar percepatan arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Tulungagung bisa terwujud sebagaimana yang diharapkan.

Tabel II.30
Jumlah Pelayanan Sistem Jaringan Perpipaan Air Bersih Tersistem

No	Kecamatan	Jumlah KK Dilayani Hitpam	Jumlah KK Dilayani PDAM	Jumlah KK Terlayani Air Bersih (Sistem)	Jumlah KK	% Pelayanan
1	Besuki	6.165	-	6.165	8.185	75,28
2	Bandung	4.184	690	4.874	17.575	27,73
3	Pakel	686	-	686	16.186	4,24
4	Campurdarat	515	1.339	1.854	19.289	9,61
5	Tanggunggunung	8.261	-	8.261	9.861	83,77
6	Kalidawir	4.924	-	4.924	18.968	25,96
7	Pucanglaban	6.561	-	6.561	8.661	75,75
8	Rejotangan	1.516	887	2.403	21.947	10,95
9	Ngunut	-	1.318	1.318	26.562	4,96
10	Sumbergempol	-	87	87	21.817	0,40
11	Boyolangu	-	1.838	1.838	20.076	9,16
12	Tulungagung	-	6.464	6.464	21.537	30,01
13	Kedungwaru	-	3.095	3.095	30.203	10,25
14	Ngantru	-	-	-	17.419	0,00
15	Karangrejo	5.667	407	6.074	13.344	45,52
16	Kauman	-	2.119	2.119	17.555	12,07
17	Gondang	474	38	512	17.577	2,91
18	Pagerwojo	8.186	2.052	10.238	10.272	99,67
19	Sendang	12.310	2.3770	14.680	15.592	94,15
Kab. Tulungagung		58.934	22.704	81.638	323.478	25,24

Sumber: Dinas PUPR dan PDAM Kab. Tulungagung

Tabel II.31
Persentase Keluarga Dengan Kepemilikan Sarana Sanitasi Dasar
Tahun 2013

No	Jumlah Keluarga	Jamban							
		Keluarga Diperiksa		Keluarga Memiliki		Sehat Berdasarkan KK Memiliki		Sehat Berdasarkan KK Diperiksa	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
JUMLAH	305.400	305.400	100	246.073	80,57	166.591	67,70	166.591	54,55

Lanjutan tabel:

Tempat Sampah						Pengelolaan Air Limbah					
Keluarga Diperiksa		Keluarga Memiliki		Sehat		Keluarga Diperiksa		Keluarga Memiliki		Sehat	
Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
282.983	92,66	282.983	100	233.793	82,62	241.217	78,98	175.374	72,70	109.425	62,40

Sumber: Dinas PUPR

Tabel II.32
Hasil Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2012-2016

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	Satuan
A	BINA MARGA						
1	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	3	7	11	11	Unit
2	Peningkatan dan Pemeliharaan jalan :						
	a. Jalan Aspal	45	21	69	113,5	95	Km
	b. Jalan Beton	-	-	-	50.500	53.664	M
	c. jalan Paving	-	-	-	410	688	M
3	Peningkatan Turap / Talud / Bronjong	-	-	-	30.100	33.368	M
	Peningkatan Saluran Drainase	-	-	-	5.000	7.162	M
	Peningkatan gorong-gorong						M
	Peningkatan Sarana dan prasarana Kebinamargaan	-	-	1	1	2	Paket
B	TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN						
1	Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemerintah	8	4	6	6	4	Unit
C	P3LAM						
1	Optimalisasi Sarana Air Minum	-	-	-	-	-	
	Pipa Sepanjang	23.196	21.900	22.902	21.600	43.620	M
	Terbangunnya Sarana Sanitasi MCK ++	5	5	6	9	9	Unit
2	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	-	-	-	-	-	
	Jalan Rabat	-	57.559	17.812,25	14.031	-	M2
	Paving Stone	31.906	114.115	15.275,44	10.656	1.460	M2
3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	37	95	61	78	179	Unit
D	Pekerjaan Umum						
1	Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik	47	54	60	66	70	%
2	Prosentase pengurangan luasan kawasan kumuh					47	%
3	Prosentase penduduk pedesaan yang memiliki akses air bersih	65	70	78	81	85	%
4	Prosentase penduduk yang terlayani akses sanitasi	75	80	81	82	84	%
5	Prosentase luasan sawah yang terlayani air irigasi			55	57	59	%

Sumber : Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan SDA

Untuk mengantisipasi risiko terkecil dalam rangka menciptakan keselamatan pengguna jasa transportasi darat, peran *ratio* panjang jalan per jumlah kendaraan menjadi salah satu

ukuran yang sangat obyektif untuk digunakan sebagai indikator keamanan di jalan. Dengan asumsi bahwa semakin pendek *ratio* panjang jalan per jumlah kendaraan, akan semakin berisiko atau tingkat kenyamanan dan keselamatan di jalan akan semakin berkurang.

2.3.4 Perumahan Rakyat

Kebutuhan tempat tinggal yang sehat dan layak huni telah menjadi permasalahan klasik dibidang perumahan. Laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, tidak seimbang dengan ketersediaan lahan yang semakin lama semakin sempit, menjadi salah satu penyebab munculnya permasalahan dibidang perumahan. Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya rumah sehat dan rendahnya tingkat perekonomian masyarakat yang belum bisa mewujudkan rumah yang sesuai dengan standart kesehatan, juga menjadi akar permasalahan dibidang perumahan.

Tabel II.33
Jumlah Perumahan Rakyat di Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Rumah
1.	Besuki	10.807
2.	Bandung	13.893
3.	Pakel	13.983
4.	Campurdarat	15.125
5.	Tanggunggunung	7.716
6.	Kalidawir	20.553
7.	Pucanglaban	7.091
8.	Rejotangan	17.898
9.	Ngunut	20.094
10.	Sumbergempol	17.194
11.	Boyolangu	23.372
12.	Tulungagung	18.796
13.	Kedungwaru	21.285
14.	Ngantru	14.450
15.	Karangrejo	10.936
16.	Kauman	13.104
17.	Gondang	13.526
18.	Pagerwojo	8.403
19.	Sendang	14.235
Jumlah		282.461

Sumber: Dinas PUPR

2.3.5 Penataan Ruang

Sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, kegiatan pemanfaatan ruang harus mengacu pada Rencana Tata Ruang. Rencana Tata Ruang perlu dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar sektor.

Kabupaten Tulungagung telah mempunyai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulungagung tahun 2012-2032 dan telah diterbitkan dalam Peraturan Daerah No. 11 tahun 2012.

Pemahaman dalam setiap proses perencanaan tata ruang bahwa seluruh wilayah yang termasuk dalam lingkup perencanaan mempunyai potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan. Di wilayah Kabupaten Tulungagung, potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan antara lain kegiatan perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan, perikanan darat, kegiatan industri, serta pariwisata.

2.3.6 Lingkungan Hidup

Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup bertujuan untuk mengendalikan pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka mendukung pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah secara serasi, seimbang dan lestari. Hasil pembangunan tersebut terlihat dari capaian indikator sasaran antara lain meningkatnya jumlah mata air yang terlindungi, perusahaan yang memiliki Dokumen UKL, UPL dan AMDAL serta menurunnya kasus pencemaran lingkungan.

Tabel II.34
Perkembangan Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1	Mata air yang mendapatkan perlindungan dengan penanaman pohon (sumber mata air)	38	11	18	13	13
2	Jumlah perusahaan yang menyusun Dokumen Lingkungan (UKL, UPL, AMDAL)	21	34	42	21	12
3	Prosentase penanganan kasus pencemaran	100	100	100	100	100

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
	lingkungan terhadap jumlah kasus yang ada					
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	71,33
	a. Indeks Kualitas Udara	-	-	-	-	87,74
	b. Indeks Kualitas Air	-	-	-	-	48,10
	c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-	-	-	-	76,45

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

2.3.7 Kependudukan dan Catatan Sipil

Kebijakan di bidang kependudukan tidak semata-mata merupakan persoalan *fertility control*, namun memiliki makna cakupan yang lebih luas. Kebijakan kependudukan ditujukan untuk mempengaruhi 3 (tiga) variabel utama demografi yaitu:

- a. Kelahiran atau fertilitas, yang berdampak terhadap bertambahnya jumlah penduduk pada usia muda.
- b. Kematian atau mortalitas, yang mengurangi jumlah penduduk pada usia berapapun. Dalam kebijakan kependudukan, faktor mortalitas yang mendapat perhatian khusus adalah kematian ibu dan anak.
- c. Mobilitas atau migrasi yang menambah atau mengurangi jumlah penduduk.

Untuk itu program kependudukan di arahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan. Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan instansi pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi untuk pelayanan publik. Dasar hukum dalam penataan administrasi kependudukan tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006. Selain itu, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sesuai ketentuan tersebut, secara bertahap telah diterapkan strategi nasional administrasi kependudukan meliputi pemutakhiran data, penerbitan NIK dan penerapan KTP elektronik. Berikut perkembangan pembangunan

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tulungagung selama ini.

Tabel II.35
Perkembangan Pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2012-2016

No	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk wajib KTP (%)	77,38	74,26	81,01	80,34	97
2	Jumlah bayi berakta kelahiran	39.762	20.373	19.165	16.931	17.536
3	Jumlah pasangan berakta nikah non muslim	114	108	83	72	74
4	Jumlah Pemohon Kartu Keluarga	20.453	4.463	51.670	53.221	57.430

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.3.8 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pelaksanaan Program KB melalui Kegiatan Pelayanan KIE direalisasikan dengan memberikan Pembekalan, Baik Pembekalan Bhakti Sosial TNI-KB-Kesehatan Terpadu dan Pembekalan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan. Dalam program ini selama 5 tahun, dilaksanakan 10 kegiatan Pembekalan untuk meningkatkan pencapaian peserta KB Baru. Kegiatan TMKK dan PKK KB Kesehatan dilaksanakan dengan mengadakan pemantauan oleh Tim yang sudah ditetapkan, pengadaan alokon utamanya Implant, kemudian sarana Program KB berupa IUD Kit, Implant Kit, Berikut ringkasan capaian kinerja 5 tahun tersebut.

Tabel II.36
Perkembangan Realisasi Program Keluarga Berencana Tahun 2012-2016

Tolok Ukur Kinerja	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Pasangan Usia Subur	205.680	207.021	202.284	201.047	203.704
Kesertaan ber KB	160.613	159.449	144.684	148.021	153.364
Persentase Kesertaan ber-KB	78,09	77,02	71,53	73,63	75,29

Sumber : Dinas Sosial PPPAKB

Tabel II.37
Perkembangan Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB Tahun 2012-2016

Tolok Ukur Kinerja	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Desa	271	271	271	271	271
Jumlah PPKBD	283	283	283	283	285
Jumlah Sub PPKBD	1.846	1.846	1.846	1.847	1847

Tolok Ukur Kinerja	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah PUS anggota kelompok UPPKS	3.020	3020	2803	2636	2444
Jumlah PUS Anggota Kelompok UPPKS ber-KB	2.697	2.697	2427	2401	2244
Cakupan PUS Anggota Kelompok UPPKS ber-KB (%)	89,30	89,30	86,59	91,08	91,82
Jumlah PUS Anggota Kelompok BKB	19.575	20.547	22.412	20.160	21.094
Jumlah PUS Anggota Kelompok BKB ber-KB	15.112	15.907	16.264	15.409	17.230
Cakupan PUS Anggota Kelompok BKB ber-KB (%)	47,00	77,42	72,57	76,43	81,68
Ratio PPKBD terhadap Jumlah Desa	1,04	1,04	1,04	1,04	1,05

Sumber : Dinas Sosial PPPAKB

2.3.9 Ketenagakerjaan

Sebagai akibat dari krisis ekonomi global yang merambah dalam berbagai strata kehidupan masyarakat dan tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi, ditambah beberapa perusahaan/industri mulai merampingkan atau meliburkan karyawannya tanpa batas waktu yang jelas, maka perekonomian masyarakat di Kabupaten Tulungagung sangat terpengaruh. Menghadapi kenyataan ini, Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah merancang dan melakukan berbagai kegiatan untuk mengatasi berbagai persoalan ketenagakerjaan utamanya tentang pengangguran, dan kemiskinan dengan arah untuk peningkatan, pembentukan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, menciptakan peluang usaha dan memperluas lapangan kerja.

Hal ini diwujudkan melalui program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Adapun perkembangan pembangunan urusan ketenagakerjaan yang telah dilakukan oleh Disnakertrans Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.38
Perkembangan Pembangunan Urusan Ketenagakerjaan
Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah tenaga kerja yang memenuhi ketentuan standar kompetensi kerja (jumlah tenaga kerja yang dilatih)	3.543	1.410	1.250	2.613	3.990
2	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	1.072	3.005	3.419	3.319	3.611

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
3	Kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan terhadap kasus yang ada (%)	100	100	100	100	100
4	UMK (ribu rupiah)	1.007,9	1.107,9	1.273	1.273	1.420
5	Pengangguran (Jiwa)	17.344	14.963	13.671	21.599	21.367
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,18	2,77	2,42	3,95	3,85

Sumber : BPS dan Disnakertrans

2.3.10 Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Koperasi adalah salah satu penggerak perekonomian nasional. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tulungagung memandang gerakan koperasi sangat diperlukan keberadaannya. Pembinaan dan perhatian gerakan koperasi perlu ditingkatkan agar bisa berkembang dan berfungsi dengan baik. Hingga akhir tahun 2016 tercatat 1.143 badan hukum koperasi.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga membina masyarakat agar mempunyai jiwa wirausaha yang tangguh dan mandiri. Prioritas program tersebut adalah meningkatkan dan mengembangkan KUMKM di bidang kelembagaan, mendorong terwujudnya KUMKM yang mampu mengembangkan usaha dan menguasai teknologi informasi pasar, serta mendorong KUMKM yang mempunyai permodalan sehat dan mandiri. Secara umum perkembangan pembangunan koperasi di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.39
Perkembangan Pembangunan Koperasi dan UMKM
Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
A. Koperasi						
1.	Jumlah Koperasi (Badan Hukum)	996	996	1000	1033	1143
2.	Anggota (Orang)	184.589	175.498	178.213	175.343	180.395
3.	Modal Sendiri (Rp.000)	168.300.458	331.893.766	257.784.183	493.380.129	671.548.361
4.	Modal Luar (Rp.000)	317.236.740	398.328.634	416.774.924	262.738.532	327.899.813
5.	Volume Usaha (Rp.000)	463.510.745	786.108.439	429.700.975	495.681.057	544.350.637
6.	SHU (Rp.000)	16.294.523	12.031.956	32.138.734	14.372.110	20.120.094
7.	Asset/Harta (000 Rp)	485.538.198	725.054.981	674.559.107	75.477.254	837.678.221
8.	Prosentase Pertumbuhan Omset	-	6,2%	11,3%	15,3%	9,8%

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
	Koperasi					
B.	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah					
1.	Jumlah (Unit)	38.244	40.948	44.633	48.650	51.569
2.	Modal Usaha (Rp.000)	897.362.887.000	982.152.616.000	1.070.546.350.000	1.166.895.500	1.236.909.252.790
3.	Vol. Usaha (Rp.000)	1.143.472.132.00	1.236.870.875.000	1.348.189.255.000	1.469.526.287.950	1.557.697.865.227
4.	Jmlh Karyawan (org)	180.418	196.183	213.839	233.085	247.070
5.	Prosentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro	-	25%	8,26%	9%	6%

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

2.3.11 Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal adalah salah satu urusan yang menjadi indikator ramahnya suatu Pemerintahan di Daerah terhadap kehendak berusaha bagi warga masyarakat. Iklim yang kondusif suatu daerah tercermin dari dinamika penanaman modal di daerah yang terus berkembang dengan signifikan. Pengembangan penanaman modal bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung selain dalam rangka menggali potensi unggulan daerah sekaligus memperkenalkan dan menawarkan kepada calon investor baik dalam maupun luar negeri, juga mempunyai arti strategis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.

Berikut adalah data tentang kinerja urusan penanaman modal yang berhasil dihimpun melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu. Angka – angka tersebut adalah representasi nilai investasi oleh masyarakat pada saat penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai salah satu proses penerbitan ijin usaha. Ijin usaha yang diterbitkan meliputi keseluruhan jenis ijin usaha dalam berbagai skala unit usaha yang ada.

Tabel II.40
Perkembangan Indikator Pembangunan Urusan
Penanaman Modal Tahun 2012- 2016

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Ijin usaha yang diterbitkan (ijin)	4.662	4.358	4.206	4.032	4.629
2.	Nilai investasi UMKM (Rp.)	907,2 M	440,9 M	312,8 M	167,0 M	360,1M

Sumber : DPMPTSP

2.3.12 Komunikasi dan Informatika

Secara umum, pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, merupakan salah satu aspek penting yang mendorong pembangunan nasional. Selain menjadi faktor produksi dan ekonomi, bidang komunikasi dan informatika juga berperan sebagai *enabler* dalam perubahan sosial budaya kemasyarakatan di berbagai aspek. Aspek-aspek yang dimaksud seperti pengembangan kehidupan politik yang lebih demokratis, pengembangan budaya dan pendidikan, dan peningkatan kapasitas *governance* di berbagai sektor pembangunan.

Perkembangan bidang komunikasi dan informatika menyebabkan terciptanya lalu lintas informasi dan komunikasi bebas hambatan antar negara dan wilayah. Dengan kata lain, keberadaan bidang komunikasi dan informatika mampu menghilangkan berbagai hambatan geografis sehingga terjadi transformasi pola hidup manusia di berbagai bidang menuju masyarakat berbasis ilmu pengetahuan atau *knowledge-based society*.

Adapun manfaat pembangunan bidang komunikasi dan informatika adalah:

1. mendukung perbaikan keamanan dan mempercepat perkembangan kesejahteraan sosial dan ekonomi;
2. mengatasi berbagai kesenjangan antara pusat dan daerah dalam mendukung suatu sistem yang lebih adil dan makmur;
3. meningkatkan akses informasi dan pengetahuan;
4. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (*human capacity building*);
5. mendukung proses demokrasi dan transparansi birokrasi;
6. membentuk masyarakat informasi (*knowledge-based society*).

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Tulungagung ditandai dengan penerapan sistem IT dalam berbagai aspek pemerintahan seperti:

a. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas

implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah bertugas menyelenggarakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) guna menjawab kebutuhan informasi keuangan oleh masyarakat publik, disamping pemerintah daerah wajib menyampaikan data/informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada Pemerintah. SIPKD yang dikembangkan dengan basis teknologi informasi, didesain sedemikian rupa agar bisa menjadi sarana untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan referensi, serta proses komunikasi data/informasi keuangan daerah antara Departemen Keuangan dengan pemerintah daerah dan para pemilik atau pengguna informasi keuangan daerah lainnya.

Pelaksanaan SIPKD berdasarkan pada UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; dan Peraturan Menteri Keuangan No. 46 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan SIPKD dengan tujuan merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal daerah, menyajikan informasi keuangan daerah, merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti dana perimbangan, pinjaman daerah, pengendalian defisit anggaran, melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, serta pinjaman daerah.

Prinsip Dasar pelaksanaan SIPKD adalah kejelasan peranan dan pertanggungjawaban kebijakan fiskal, ketersediaan informasi keuangan bagi masyarakat, keterbukaan dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran, dan adanya jaminan independensi atas kebijakan fiskal yang baik.

Ruang Lingkup pelaksanaan SIPKD adalah informasi keuangan dan non keuangan dari setiap PD. Data keuangan yang utama terdiri dari APBD, dana perimbangan, neraca daerah, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan daerah, laporan keuangan perusahaan daerah, dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Rumusan informasi yang akan ditampilkan dalam SIPKD secara umum meliputi dua hal yaitu informasi umum dan informasi khusus. Informasi umum merupakan informasi yang dapat diakses secara penuh oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan informasi khusus adalah informasi yang disediakan untuk pengambil kebijakan khusus. SIPKD dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat umum sesuai dengan kebutuhannya.

b. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Dalam upaya mendukung Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya Pasal 74 (ayat 1 dan 2) dan Pasal 82 (ayat 1 dan 2) tentang Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar/Menengah yang objektif, transparan, dan akuntabel, maka Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyediakan aplikasi Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *online* dengan modul pendaftaran jenjang SMP, SMA dan SMK, dan juga dilengkapi modul pendaftaran jenjang SD. Ketentuan PPDB *online* Kabupaten Tulungagung meliputi ketentuan umum dan ketentuan khusus yang bisa diakses melalui alamat website yang tersedia.

c. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak

membentuk LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

d. Pelayanan Perijinan secara online di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tulungagung

Guna mendukung pelayanan perijinan secara cepat dan nyata, BPPT Kabupaten Tulungagung melaksanakan pelayanan perijinan secara online. Pelaksanaan perijinan tersebut dapat diakses di portal : *perijinan.tulungagung.go.id*.

Jenis perijinan yang diakomodir oleh BPPT Kabupaten Tulungagung adalah ijin budidaya ikan air payau, ijin budidaya ikan air tawar, Ijin Gangguan (HO), ijin kolam memancing, ijin kursus kecantikan, ijin kursus mengemudi, ijin kursus menjahit, ijin kursus montir, ijin lokasi, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB dan IMB Penertiban), ijin menempati rumah dinas, ijin pemakaian tanah milik pemda, ijin penangkapan ikan, ijin penempatan material di jalan, ijin penggunaan lapangan olahraga, ijin pengolahan ikan, ijin reklame, ijin tempat penitipan kendaraan bermotor, ijin terop, ijin tontonan, ijin trayek, ijin usaha billyard, ijin usaha bioskop, ijin usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air, ijin usaha gedung squash, ijin usaha gedung tenis meja, ijin usaha gelanggang bowling, ijin usaha gelanggang olahraga terbuka, ijin usaha gelanggang olahraga tertutup, ijin usaha gelanggang permainan, ijin usaha gelanggang renang, ijin usaha hotel , ijin usaha industri, ijin usaha jasa konstruksi, ijin usaha kafe/café, ijin usaha karaoke,

ijin usaha klub malam, ijin usaha kolam renang, ijin usaha lapangan bulutangkis, ijin usaha lapangan tenis, ijin usaha padang golf, ijin usaha panggung tertutup, ijin usaha panti mandi uap, ijin usaha pemandian alam, ijin Usaha Pemutaran / Penayangan Film dan Usaha Rental Media Elektronik (SIUPDR), ijin usaha penggilingan padi (*huller*) dan penyosohan beras, ijin usaha pentas pertunjukan satwa, ijin usaha penyelenggaraan fasilitas kesenian, budaya, tontonan/pertunjukan, Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), ijin usaha peternakan, ijin usaha pusat kesegaran jasmani/kebugaran, ijin usaha pusat pasar seni, ijin Usaha salon kecantikan/barber shop, ijin usaha sarana dan fasilitas olahraga, ijin usaha taman satwa, ijin usaha taman/tempat rekreasi, ijin usaha wisata laut, ijin usaha wisata pantai, Surat Ijin Pemakaian Gudang (SIPG), Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

2.3.13 Pariwisata

Pembangunan bidang kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan minat pengunjung baik dari dalam maupun luar daerah Kabupaten Tulungagung dengan meningkatkan pengelolaan obyek daya tarik wisata, sarana dan prasarana pariwisata serta penyedia jasa dan pelaku pariwisata. Hasil pembangunan tersebut dapat terlihat pada capaian indikator sasaran meningkatnya jumlah wisatawan, meningkatnya pengelolaan obyek wisata dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pariwisata.

Sektor pariwisata ditengah perkembangan budaya dan pola hidup masyarakat pada saat ini sudah masuk dalam kategori kebutuhan tersier, atau bahkan untuk kelompok masyarakat tertentu sudah masuk dalam kelompok kebutuhan sekunder. Hal ini menjadi peluang bagi daerah yang memiliki daya tarik wisata, baik yang berbasis alam, kultur/budaya, ataupun bentuk kreatifitas yang lain. Pada tabel berikut disajikan data-data terkait dengan tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan pada obyek-obyek wisata di Kabupaten Tulungagung dan jumlah obyek wisata

yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui kelembagaan yang terkait.

Tabel II.41
Perkembangan Pembangunan Urusan Pariwisata
Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah wisatawan (Jiwa)	203.181	205.583	222.228	218.251	275.104
2	Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	-	1,18	8,10	(1,79)	26,05
3	Jumlah pengelolaan obyek daya tarik wisata (obyek)	2	2	2	2	7

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tabel II.42
Tempat Wisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2016

No.	Nama	Alamat
I. Wisata Alam		
1	Bumi Kandung	Ds. Tanen Kec. Rejotangan
2	Coban Kromo (indah)	Dsn. Jambu, Ds. Pelem Kec. Campurdarat
3	Telaga Buret	Ds. Sawo, Kec. Campurdarat
4	Telaga Baran	Ds. Banyuurip, Kec. Kalidawir
5	Telaga Ngambal	Ds. Winong, Kec. Kalidawir
6	Air Terjun Laweyan	Sendang
II. Wisata Buatan		
1	Bendungan Wonerejo	Ds. Mulyosari Kec. Pagerwojo
2	Pesanggrahan Argo Wilis	Ds. Sendang, Kec. Sendang
3	Taman Kusuma Wicitra	Jl. R.A. Kartini No. 1 Tulungagung
4.	Jogging Track	Kel. Tertek & Kutoanyar
III. Wisata Purbakala (Sejarah/Religi)		
1	Candi Gayatri	Ds. Boyolangu, Kec. Boyolangu
2	Candi Cungkup	Ds. Sraggahan, Kec. Boyolangu
3	Candi Dadi	Ds. Wajak Kidul, Kec. Boyolangu
4	Candi Gambar	Ds. Mirigambar, Kec. Sumbergempol
5	Candi Ampel	Ds. Ngampel, Kec. Sumbergempol
6	Candi Tuban	Ds. Domasan, Kec. Kalidawir
7	Candi Nilosuwarna	Ds. Aryojeding, Kec. Rejotangan
8	Candi Asmoro Bangun	Ds. Geger, Kec. Sendang
9	Makam Mbah Mlinjo	Ds. Ngepoh, Kec. Tanggunggunung
10	Makam Srigading	Ds. Bolo, Kec. Kauman
11	Makam Setono Gedong	Ds. Sukodono, Kec. Karangrejo
12	Makam Sunan Kuning	Ds. Macanbang, Kec. Pakel
13	Makam Patih	Ds. Tiudan, Kec. Gondang
14	Makam Ngadirogo	Ds. Podorejo, Kec. Sumbergempol
15	Makam Petung Ulung	Ds. Bangunmulyo, Kec. Pakel
16	Makam Astonopraloyo	Ds. Ndemuk, Kec. Kalidawir
17	Makam Sengguruh	Ds. Rejotangan, Kec. Rejotangan

No.	Nama	Alamat
18	Makam Soka	Ds.Karangsari, Kec.Rejotangan
19	Kuburan Wangi	Ds.Mulyosari, Kec.Pagerwojo
20	Makam Majan	Ds.Majan, Kec.Kedungwaru
21	Makam Mbedalem	Ds.Besole, Kec.Besuki
22	Makam Surontani I	Ds. Tanggung ,kec.Campurdarat
23	Makam Surontani II	Ds.Wajak Kidul, Kec.Boyolangu
24	Goa Selomangleng	Ds.Sanggrahan, Kec.Boyolangu
25	Goa Tan Tik syu	Ds.Sumber Agung, Kec.Rejotangan
26	Goa Tan Tik syu	Ds.Sendang, Kec.Sendang
27	Goa Banyu	Ds.Banyuurip, Kec.Kalidawir
28	Goa pasir	Ds.Junjung, Kec.Sumbergempol
29	Goa Pasetran Gondomayit	Ds.Kalibatur, Kec.Kalidawir
30	Goa Tritis	Ds.Tanggung,Kec. Campurdarat
31	Situs Mbah Bodho	Ds.Junjung, Kec.Sumbergempol
32	Situs Mbah Bodho	Ds.Kalidawir, Kec.Kalidawir
33	Situs Mbah Bodho	Ds.Gondang, Kec.Gondang
34	Situs Gembrong	Ds.Domasan, Kec.Kalidawir
35	Situs Kanigoro	Ds.Podorejo, Kec.Sumbergempol
36	Situs Lemah Duwur	Ds.Bantengan, Kec.Bandung
37	Situs Alas Kebutan	Ds.Keboireng, Kec.Besuki
38	Situs Watu Garit	Ds.wateskroyo, Kec.Besuki
39	Situs Song Gentong I	Ds.Besole, Kec.Besuki
40	Situs Song Gentong II	Ds.Besole, Kec.Besuki
41	Situs Omben Jago	Ds.Nyawangan, Kec.Sendang
42	Situs Punden Gedong	Ds.Nyawangan, Kec.Sendang
43	Situs Kucur Sanga	Ds.Nyawangan, Kec.Sendang
44	Penemuan Fosil	Ds.Gamping, Kec.Campurdarat
45	Balai penyelamat (Museum Daerah)	Jl.Raya Popoh, Kec.Boyolangu
46	Dwarapala (Reco Pentung)	Ds.Kedungwaru, Jepun, Tamanan, Kutoanyar
47	Monumen Wajakensis	Ds. Gamping Kec. Campurdarat
48	Prasasti Lawadan	Ds. Besole Kec. Besuki
IV. Wisata Pantai		
1	Pantai Sine	Ds.Kalibatur, Kec.Kalidawir
2	Pantai Dlodo	Ds.Rejosari, Kec.Kalidawir
3	Pantai Popoh	Ds.Besuki, Kec.Besuki
4	Pantai Klatak	Ds.Keboireng, Kec.Besuki
5	Pantai Sidem	Ds.Besuki, Kec.Besuki
6	Pantai Nglarap	Ds.Keboireng, Kec.Besuki
7	Pantai Brumbum	Ds.Ngrejo, Kec.Tanggunggunung
8	Pantai Molang	Ds.Pucanglaban, Kec.Pucanglaban
9	Pantai Gerangan	Ds.Ngrejo, Kec.Tanggunggunung
10	Pantai Bayem	Ds.Keboireng, Kec.Besuki
11	Pantai Coro	Ds.Besuki, Kec.Besuki
12	Pantai Sanggar	Kec. Tanggunggunung
13	Pantai Kedung Tumpang	Ds. Pucanglaban, Kec. Pucanglaban
14	Pantai Gemah	Ds. Kebo Ireng, Kec. Besuki
15	Pantai Sioro	Ds. Ngrejo, Kec. Tanggunggunung

No.	Nama	Alamat
16	Pantai Ngalur	Ds. Ngrejo, Kec. Tanggung
17	Pantai Patok Gebang	Ds. Jengglung Harjo. Kec. Tanggung
18	Pantai Banyu Mulok	Ds. Besole, Kec. Besuki
19	Pantai Pucang Sawit	Desa/Kec. Pucanglaban

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2.3.14 Perdagangan

Urusan perdagangan dikembangkan dengan harapan SDM Perdagangan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pelayanan informasi perdagangan menjadi lebih transparan dan mudah di akses, program yang disusun menjadi lebih antisipatif terhadap perkembangan masa depan, masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan serta penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram. Dengan demikian masyarakat dunia industri dapat mengembangkan usahanya dan masyarakat selaku konsumen dapat merasa aman dalam mengkonsumsi barang maupun jasa yang ada di pasaran.

Nilai perdagangan di Kabupaten Tulungagung sesuai data kontribusi sektoral pada PDRB menempati urutan tertinggi. Nilai perdagangan tersebut terdiri dari perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perdagangan dalam negeri terdiri atas perdagangan lokal dan antar daerah. Komoditas perdagangan meliputi hasil industri yang berbasis logam, tekstil (garmen, tenun, konveksi), dan kimia agro. Perdagangan luar negeri mampu memberikan nilai jual produk yang lebih tinggi karena perbedaan nilai tukar rupiah. Peluang ini juga dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha yang memiliki produk potensial untuk tujuan ekspor.

Badan usaha yang telah memiliki izin ekspor adalah sebanyak 7 unit, dengan rincian 1 unit komoditas kertas dengan negara tujuan Malaysia, Mauritius, Singapura, New Zealand, Ethiopia dan Nikaragua, sedangkan 6 industri lainnya bergerak pada komoditi marmer serta berbagai produk kerajinan marmer dengan negara tujuan Taiwan, Singapura, Dubai, Kuwait, Perancis, Jerman, Belanda, Malaysia, Madagaskar, Swedia, Serbia, Italia,

Spanyol, dan Vietnam. Berikut adalah data-data akumulasi kinerja ekspor dan jumlah industri yang tercatat sebagai pelaku ekspor.

Tabel II.43
Perkembangan Ekspor Tahun 2012-2016

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertumbuhan nilai ekspor	9,7 M	11,4 M	11 M	24,2 M	41,04M
2	IKM eskportir	7	8 IKM	9 IKM	10 IKM	11 IKM

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Demikian halnya dengan dinamika perdagangan dalam negeri yang terus berkembang pesat seiring dengan pesatnya arus informasi dan media perdagangan. Perdagangan tidak hanya dilakukan melalui cara-cara yang konvensional, namun peranan perangkat teknologi informasi semakin dominan dan menjadi media utama pendukung perdagangan. Berdagangan tidak mengharuskan pelaku transaksi untuk berinteraksi langsung secara fisik, akan tetapi teknologi sudah memfasilitasi fungsi tersebut sehingga transaksi itu berjalan sempurna, termasuk didalamnya tata cara pembayaran dan pengiriman barang. gambaran perdagangan seperti ini juga telah banyak digunakan oleh pelaku usaha perdagangan di Kabupaten Tulungagung.

Kabupaten Tulungagung memiliki beberapa komoditas perdagangan yang tidak hanya mampu memberikan kontribusi pada peningkatan daya saing daerah, namun secara nyata juga mampu memberikan peningkatan pendapatan masyarakat. Komoditas yang dihasilkan bervariasi dan memiliki karakteristik unik dan spesifik sebagai wujud dari berkembangnya tingkat kreatifitas dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tulungagung.

Komoditas dibidang garmen menghasilkan barang-barang konveksi mulai dari baju dalam berbagai jenis, ukuran dan kegunaan hingga barang-barang untuk keperluan khusus termasuk didalamnya barang kerajinan pengolahan limbah hasil konveksi yang secara keseluruhan tersebar di wilayah Kecamatan Tulungagung, Boyolangu, Kedungwaru dan Sumbergempol. Selain hal tersebut juga terdapat produk tenun webbing set yang memproduksi peralatan perbekalan militer telah mampu bekerja

sama dengan Kementerian Pertahanan RI, bahkan beberapa item produknya telah dipakai oleh beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dan Organisasi Pertahanan (NATO).

Selain itu masih banyak komoditas perdagangan antar daerah yang berbasis industri logam, kimia, agro dan hasil hutan sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah, yang dapat memberikan ilustrasi tentang beberapa komoditi potensial perdagangan antar daerah.

Tabel II.44
Komoditas Perdagangan Antar Daerah di Kabupaten Tulungagung

NO.	KOMODITAS	BIDANG USAHA	LOKASI
1.	Marmar, produk kerajinan marmar, onyx, genteng, batu alam	Industri bahan bangunan	Kec. Campurdarat, Kec. Boyolangu, Kec. Gondang dan Kec. Ngantru
2.	Konveksi, tenun webbing set dan garmen	Industri sandang	Kec. Tulungagung, Kec. Boyolangu, Kec. Kedungwaru dan Kec. Ngunut
3.	Peralatan rumah tangga, dan peralatan pertanian	Industri logam	Kec. Gondang, Kec. Ngunut, dan Kec. Kauman
4.	Kerajinan kayu	Industri kerajinan	Kec. Kedungwaru, Kec. Sumbergempol, Kec. Ngantru dan Kec. Boyolangu
5.	Aneka kripik, krupuk dan kacang sanghai	Industri pangan	Kec. Campurdarat, Kec. Tulungagung, Kec. Ngantru, Kec. Ngunut, Kec. Sendang dan Kec. Boyolangu

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.3.15 Keuangan

Pencapaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Tulungagung dapat diukur salah satunya berdasarkan opini BPK dan penilaian kinerja daerah. Pencapaian penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu tahun 2012-2016 dapat diketahui berdasarkan tabel berikut :

Tabel II.45
Pencapaian Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
2	Nilai SAKIP	57,34	55,41	52,90	62,42	70,03
3	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	68
4	Predikat Wahana Tata	WTN	WTN	WTN	WTN	WTN

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
	Nugraha					
5	Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat unit pelayanan	-	-	74,79	75,23	77,82
6	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu/pilkades	-	-	74,02	82,00	0
7	Prosentase peningkatan penyelesaian pelanggaran Perda/Perbup	1	1	1	1	1
8	Prosentase perlindungan/pemeliharaan terhadap potensi konflik SARA	-	-	85	85	90

Sumber : BPKAD, Bag. Organisasi, Dishub, Bag. Adm. Pemerintahan, Satpol PP, Bakesbangpol

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Kemampuan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas, melakukan investasi pembangunan jangka panjang, dan sebagainya.

Dari hasil analisis yang sudah dilakukan dapat diperoleh informasi sebagai berikut :

- Nilai rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah sebesar 16,19%
- Derajat Desentralisasi Kabupaten Tulungagung adalah sebesar 8,67%. Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.
- Rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Tulungagung, yaitu sebesar 87,66%. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total penerimaan daerah.

2.4.2 Fasilitas Infrastruktur

Pemeliharaan dan pembangunan berbagai infrastruktur, serta peningkatan kapasitas dan fasilitas baru akan menyerap biaya yang sangat besar, sehingga tidak dapat dipikul oleh pemerintah daerah sendiri. Dilihat dari tipologinya, infrastruktur dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu infrastruktur sosial, infrastruktur publik, dan infrastruktur komersial. Pembagian ini sekaligus menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab penyediaan masing-masing infrastruktur. Infrastruktur sosial menghasilkan barang dan jasa non-pasar, dengan tingkat *cost recovery* yang sangat rendah, maka penyediaannya mutlak menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang pelaksanaannya disesuaikan kemampuan pendanaan pemerintah. Untuk itu perlu adanya sinkronisasi penanganan program melalui APBN dan APBD. Infrastruktur sosial meliputi subsektor jalan, fasilitas keselamatan transportasi, sumber daya air, fasilitas persampahan dan sanitasi. Penyediaan infrastruktur publik yang menghasilkan barang dan jasa publik, seperti pelabuhan, air minum, perumahan, pos, listrik, dan telekomunikasi, dapat dilakukan bekerja sama antara pemerintah (BUMN) dan pihak swasta. Sedangkan infrastruktur komersial, yang menghasilkan barang dan jasa privat, seperti pembangkit listrik dan telekomunikasi dapat disediakan secara murni oleh pihak swasta. Dengan demikian percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kewenangan dan tanggung jawab sesuai tipologi infrastrukturnya.

Tabel II.46
Data Infrastruktur Kabupaten Tulungagung Tahun 2016

1	JENIS DATA	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Total panjang jalan kabupaten	2.007,176	Km	SK Bupati (proses usulan kepada Gubernur Jawa Timur)
2	Jalan aspal :			
	A. Baik	162,643	Km	Merupakan total panjang jalan Status Kabupaten dalam kondisi Baik. Kriteria Baik adalah nilai kerusakan jalan $\leq 11\%$
	B. Sedang	975,728	Km	Kriteria Sedang adalah nilai kerusakan jalan $11 < 16\%$
	C. Rusak	255,134	Km	Kriteria Rusak adalah nilai kerusakan jalan $16 - 23\%$
	D. Rusak berat	79,996	Km	Kriteria Rusak Berat adalah nilai kerusakan jalan $\geq 23\%$
3	Jalan beton / paving :			
	A. Baik	15,834	Km	Merupakan total panjang jalan Status Kabupaten dalam kondisi Baik. Kriteria Baik adalah nilai kerusakan jalan $\leq 11\%$

1	JENIS DATA	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
	B. Sedang	23,499	Km	Kriteria Sedang adalah nilai kerusakan jalan 11-<16 %
	C. Rusak	6,731	Km	Kriteria Rusak adalah nilai kerusakan jalan 16 - 23 %
	D. Rusak berat	-	Km	Kriterian Rusak Berat adalah nilai kerusakan jalan \geq 23 %
4.	Jalan makadam	68,631	Km	-
5.	Jalan tanah	418,980	Km	-
	Data prasarana irigasi			
1	Total luas daerah irigasi kabupaten	9.358,00	Ha	Merupakan total luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten
2	Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	4.602,77	Ha	Merupakan total luas daerah irigasi dalam kondisi baik yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten (mengacu pada Permen PU No. 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman OP Jaringan Irigasi)
3	Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Rusak	4.755,23	Ha	Merupakan total luas daerah irigasi dalam kondisi rusak yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten (mengacu pada Permen PU No. 32/PRT/M/2007)
7	Luas Area Tanam pada Musim Kemarau			
	A. Kondisi saat ini	14.632,00	Ha	Merupakan luas areal tanam di musim kemarau pada tahun berjalan (n)
	B. Sesudah rehabilitasi	14.640,00	Ha	Merupakan luas areal tanam setelah adanya penanganan rehabilitasi di musim kemarau pada tahun berikutnya (n+1)
8	Produktivitas sawah	6,00	Ton/Ha	Merupakan produktivitas sawah (d disesuaikan dengan data yang dikeluarkan oleh instansi terkait)
9	Rencana Pengembangan Pengelolaan Irigasi (RP2I)	1	Dokumen	Merupakan dokumen RP2I yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah
DATA PRASARANA AIR MINUM KABUPATEN				
1	Jumlah desa/ kelurahan di Kabupaten	271	desa/ kelurahan	Merupakan total jumlah desa/ kelurahan di Kabupaten tersebut
2	Jumlah Desa/ Kelurahan terlayani oleh Pelayanan Air Minum	215	desa/ kelurahan	Merupakan jumlah desa/ kelurahan yang sudah terfasilitasi pelayanan air minum melalui PDAM/Pamsimas di Kabupaten yang bersangkutan
3	Rencana induk sistem pengembangan air minum (rispam)	Proses Usulan	Dokumen	Merupakan dokumen RISPAM yang dikeluarkan oleh kepala daerah
DATA PRASARANA SANITASI KABUPATEN				
1	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Sanitasi	205	desa/ kelurahan	Merupakan total jumlah desa/ kelurahan di Kabupaten yang tidak memiliki sarana dan prasarana sanitasi
2	Jumlah Desa/Kelurahan yang terlayani oleh Prasarana Sanitasi	9	desa/ kelurahan	Merupakan total jumlah desa/ kelurahan di Kabupaten yang terlayani oleh prasarana sanitasi melalui PDPAL/ Sanimas
3	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Jamban	266.978	rumah tangga	Merupakan total jumlah rumah tangga yang memiliki jamban di kabupaten
4	Jumlah Rumah Tangga dengan Jamban yang dilengkapi Septictank	200.235	rumah tangga	Merupakan total jumlah rumah tangga yang memiliki jamban dilengkapi dengan septiktank di kabupaten tersebut
5	Jumlah Timbunan Sampah	390,68	m ³ /hari	Merupakan total jumlah timbunan sampah per hari yang dihasilkan dari Kabupaten
6	Jumlah Sampah Terangkut	233	m ³ /hari	Merupakan total jumlah sampah per hari yang dapat terangkut ke TPA di Kabupaten
7	Panjang Saluran Drainase	Terbuka : 6.000 Tertutup : 52.000	M M	Merupakan panjang saluran drainase di Kabupaten
8	Panjang Saluran Drainase dalam Kondisi Rusak	12.550,00	M	Merupakan panjang saluran drainase dalam kondisi rusak (tersumbat, bocor, dll) di kabupaten
9	Strategi Sanitasi Kota (SSK)	1	Dokumen	Merupakan dokumen SSK yang dikeluarkan oleh kepala daerah

Sumber : Dinas PU dan PR serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Sumber Daya Air

2.4.3 Iklim Investasi

Penciptaan iklim investasi yang kondusif sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan perkembangan perekonomian dan dunia usaha, serta sangat berpengaruh terhadap peningkatan lapangan kerja. Salah satunya melalui menyederhanaan regulasi dan birokrasi perizinan usaha, yaitu dengan pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang di Kabupaten Tulungagung bernama Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT). Kebutuhan terhadap regulasi tersebut menuntut adanya peningkatan kinerja/pelayanan PTSP sehingga tidak hanya eksis dari sisi formalitas kelembagaan, tetapi juga mampu berfungsi efektif dalam mendorong perbaikan iklim usaha di daerah. Di Kabupaten Tulungagung, dinamisasi ekonomi ditinjau dari survei Kabupaten/Kota Terbaik di Indonesia untuk Bidang Penanaman Modal (BKPM dan KPPOD, 2009) menunjukkan Kabupaten Tulungagung berada di ranking 52 dari 217 kabupaten yang disurvei.

2.4.4 Lingkungan Strategis Nasional, Regional, dan Global

Kawasan Strategis Nasional

Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Berdasarkan RTRW Nasional, kawasan strategis nasional di Kabupaten Tulungagung adalah Wilayah Sungai (WS) Brantas.

Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Propinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Propinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan yang merupakan kawasan strategis propinsi di Kabupaten Tulungagung berupa Kawasan Agropolitan Wilis. Dalam sistem Agropolitan Wilis, Kabupaten Tulungagung memiliki peran sebagai daerah pemasok atau hinterlandnya.

Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang memberikan kontribusi secara lokal, regional maupun nasional, serta mempunyai pengaruh yang cukup penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap pengembangan ekonomi, sosial, budaya atau lingkungan. Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

1. Tata ruang di wilayah sekitarnya;
2. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan strategis wilayah kabupaten ditetapkan berdasarkan:

1. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
2. Memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis wilayah provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
3. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, maupun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
4. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:
 - a) potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - b) sektor unggulan yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
 - c) potensi ekspor;
 - d) dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - e) kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 - f) fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
 - g) fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau

- h) kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten.
5. Kawasan yang memiliki nilai strategis sosial budaya di wilayah kabupaten, antara lain kawasan yang merupakan:
- a) tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
 - b) prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
 - c) aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - d) tempat perlindungan peninggalan budaya;
 - e) tempat yang memberikan perlindungan terhadap keaneka ragaman budaya; atau
 - f) tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.
6. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten, antara lain kawasan yang memiliki:
- a) peruntukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;
 - b) sumber daya alam strategis;
 - c) fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembanagn antariksa;
 - d) fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
 - e) fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.
7. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain merupakan:
- a) tempat perlindungan keaneka ragaman hayati;
 - b) kawasan lindung yang ditetapkan sebagai perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punahatau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - c) kawasan yang memberi perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;

- d) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - e) kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - f) kawasan rawan bencana alam; atau
 - g) kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
8. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembagunan spasial wilayah kabupaten;
9. Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

Kawasan yang termasuk kawasan strategis diantaranya adalah kawasan lindung, kawasan perkotaan dengan perkembangan dinamis, lokasi industri strategis, kawasan sepanjang jalan arteri primer dan jalur regional, kawasan sepanjang pantai selatan, serta kawasan perkebunan (hortikultura), yang perkembangannya akan dapat memberikan imbas positif pada sektor perhubungan, perdagangan, hotel dan restoran serta industri kecil/kerajinan. Beberapa kawasan strategis yang ada di Kabupaten Tulungagung ini kemudian dikelompokkan berdasarkan jenisnya yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Adapun jenis-jenis kawasan strategis di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Kawasan strategis kepentingan ekonomi kabupaten;
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya di wilayah kabupaten;
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten;

4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan

5. Kawasan strategis lainnya.

Kawasan strategis ekonomi di Kabupaten Tulungagung meliputi:

- Kawasan agropolitan;
- Kawasan perikanan dan minapolitan;
- Kawasan pertambangan; dan
- Kawasan pariwisata.

Penjelasan masing-masing kawasan strategis adalah sebagai berikut:

Kawasan Agropolitan

Agropolitan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan dalam hal aspek ekonomi antara kota dan desa. Sebagai wujud nyata penerapan konsep pengembangan kawasan ini, Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 522 Tanggal 18 Juni 2004 telah menetapkan Kecamatan Sendang sebagai rintisan Kawasan Agropolitan yang dikenal dengan Kawasan Agropolitan Sendang.

Penunjukan Kecamatan Sendang sebagai kawasan agropolitan selain didasarkan adanya potensi komoditas unggulan yang cukup besar, yaitu sapi perah dan komoditas unggulan lainnya seperti hortikultura berupa sayur-sayuran dan buah-buahan, juga didasarkan pada kesesuaian lahan yang merupakan daerah pegunungan dengan hawa yang sejuk.

Sesuai dengan keunggulan komparatif yang ada, maka sapi perah menjadi salah satu komoditas unggulan di Kawasan Agropolitan Sendang. Usaha sapi perah ini sangat nyata menyumbang pendapatan rumah tangga petani. Peluang usaha sapi perah masih terbuka lebar karena didukung ketersediaan lahan yang luas untuk penanaman rumput gajah sebagai sumber tambahan hijauan serta diuntungkan dengan kebutuhan bahan baku produk olahan susu yang cukup tinggi.

Selain sentra pengembangan sapi perah Kawasan Agropolitan Sendang juga sangat cocok untuk pengembangan ternak ruminansia seperti kambing dan domba. Usaha ternak

ruminansia tersebut mampu memberikan penghasilan tambahan bagi petani.

Komoditas lain yang menonjol di Kawasan Agropolitan Sendang berasal dari komoditas sayur-mayur seperti kentang, kobis, sawi, wortel, brokoli, bawang daun, lobak, kapri dan lain-lain. Sedangkan untuk tanaman buah-buahan saat ini hanya sebagai tanaman pekarangan karena belum banyak dibudidayakan oleh masyarakat.

Dalam rangka mendukung pengembangan kawasan, saat ini dikembangkan pula komoditas bunga potong yang juga memiliki pangsa pasar potensial. Pengembangan kawasan ini didukung oleh keberadaan 7 (tujuh) buah *green house* yang digunakan untuk budidaya bunga potong dengan luas bangunan untuk masing-masing *green house* 8 x 20 m².

Untuk mengembangkan Kawasan Agropolitan diperlukan kemitraan dengan pihak ketiga untuk pemasaran hasil komoditasnya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah memfasilitasi dengan melengkapi sarana dan bimbingan teknis. Dalam perkembangan terakhir pelaku usaha di Kawasan Agropolitan telah menjalin kerjasama dengan Yayasan Grasia dalam hal penanaman bunga potong (Krisan, Gladiol dan Golden Peacock), dengan PT. Horti Bima Internasional dalam hal pemasaran hasil sayuran lobak. Sedangkan dengan PT. Nestle, Sari Husada, Indomilk dan Sekar Tanjung untuk menampung hasil produksi Susu Perah.

Kawasan Perikanan dan Minapolitan

Potensi perikanan di Kabupaten Tulungagung sangatlah prospektif untuk pengembangan di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan bidang perikanan merupakan sumber pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat yang diharapkan nantinya dapat menjadi unggulan kompetitif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Tulungagung menetapkan suatu kebijakan yang bertumpu pada pembangunan perikanan dengan memanfaatkan sumber-sumber

perikanan yang belum tergali secara efektif, efisien dan berdaya dukung pada potensi lestari.

Perkembangan budidaya ikan air tawar dikelompokkan menjadi 2 kategori usaha yaitu budidaya ikan konsumsi dan ikan hias. Budidaya ikan konsumsi yang banyak dikembangkan adalah jenis ikan lele, gurami dan nila sedangkan untuk pengembangan ikan hias diprioritaskan untuk jenis ikan hias mas koki (kaliko, tosa, rasket, mutiara, *lion head*, mata kantong/mata bola, mas lowo, tek im, spenser, dan rensil). Disamping itu juga dikembangkan jenis-jenis ikan hias lainnya.

Wilayah pesisir di Kabupaten Tulungagung terdiri dari Pantai Molang, Dlado, Sine, Ngelo, Gerangan, Brumbun, Popoh, Sidem, Klatak, Bayem dan Nglarap. Potensi Sumberdaya Ikan (SDI) tersebut dimanfaatkan oleh 574 kelompok nelayan. Produksi Perikanan tangkap di Kabupaten Tulungagung didominasi oleh jenis ikan tuna, tongkol, layur, teri, kembung dan cumi-cumi.

Minapolitan

Pada Tahun 2011 pemerintah Kabupaten Tulungagung menginisiasi program pengembangan kawasan minapolitan yang merupakan rumpun dari program agropolitan yang telah dirintis terlebih dahulu. Program ini secara fungsional bertumpu pada kegiatan sektor perikanan dengan basis pengembangan komoditas unggulan khususnya perikanan budidaya.

Wilayah yang memenuhi syarat untuk dikembangkan sebagai Kawasan Minapolitan adalah Kecamatan Gondang dengan sentra produksi di Desa Gondosuli. Luas lahan perikanan ± 11,03 ha dimana potensi produksi tiap hektarnya mencapai 540 ton/tahun. Sedangkan Wilayah yang berfungsi sebagai *hinterlandnya* adalah Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Kauman dan Kecamatan Pakel. Hal ini telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/208/031/2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan.

Komoditas unggulan yang dikembangkan adalah budidaya ikan lele dengan sistem kolam terpal. Saat ini ada 7 kelompok

pembudidaya ikan (pokdakan) dan 2 kelompok pengolah ikan di Desa Gondosuli. Selain produk berupa lele basah pembudidaya ikan juga menghasilkan beberapa produk olahan berupa lele panggang, abon lele dan keripik rambak lele. Daerah pemasaran produksinya sudah sampai ke luar Provinsi seperti Jawa Tengah yang meliputi Semarang, Solo, Klaten dan Boyolali. Sementara di Provinsi Jawa Timur ada di Surabaya, Malang dan Kediri.

Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Tulungagung telah melalui beberapa tahap perencanaan dan saat ini masih menunggu penetapan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Kawasan Pertambangan

Kawasan pertambangan yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung berupa bahan galian yang merupakan material bahan bakar dari fosil terdapat di kawasan Perhutani dengan persebaran yang cukup luas, namun sampai saat ini belum di eksplorasi secara optimal. Jumlah cadangan di perkirakan mencapai 470.771 ton.

Terdapat pula kaolin yang merupakan jenis batu yang terdiri dari tanah mineral, biasanya berwarna putih bersih dan kekuningan, lunak, berbutir halus. Endapan kaolin banyak di jumpai di Kecamatan Pucanglaban. Kaolin dipergunakan untuk industri keramik, cat, karet, gelas dan kertas, glasur, dan saniter. Dewasa ini endapan kaolin belum dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal.

Kawasan pertambangan yang menjadi kawasan strategis kabupaten adalah kawasan unggulan pertambangan marmer yang berada di Kecamatan Campurdarat dan Kecamatan Besuki. Deposit marmer dapat dijumpai di Desa Gamping, Ngentrong, Kecamatan Campurdarat dan Desa Besole Kecamatan Besuki dengan penyebaran yang cukup luas. Batu marmer merupakan produk primadona bahan tambang Kabupaten Tulungagung, karena selain di usahakan lebih maju pada jenis-jenis tambang lainnya oleh para pengusaha dan pengrajin di Desa Campurdarat

dan Gamping Kecamatan Campurdarat, juga dilihat dari deposit yang cukup melimpah.

Kawasan Pariwisata

Kabupaten Tulungagung merupakan wilayah potensial untuk pengembangan pariwisata sebagai salah satu alternatif daerah tujuan wisata unggulan Jawa Timur maupun Nasional karena keanekaragaman obyek wisata yang dimilikinya. Obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Tulungagung terbagi dalam 4 jenis yaitu wisata alam, wisata buatan, wisata religi, dan wisata pendidikan.

Kawasan pariwisata yang ditetapkan sebagai kawasan strategis di Kabupaten Tulungagung berupa kawasan prioritas pengembangan pariwisata meliputi:

1. Kawasan prioritas pengembangan wisata alam dipusatkan di daya tarik wisata meliputi:
 - Pantai Popoh berada di Kecamatan Besuki; dan
 - Waduk Wonorejo berada di Kecamatan Pagerwojo.
2. Kawasan prioritas pengembangan wisata budaya meliputi:
 - Makam Ngujang berada di Kecamatan Kedungwaru;
 - Candi Penampihan (Asmara Bangun) berada di Kecamatan Sendang; dan
 - Candi Cungkup berada di Kecamatan Boyolangu.
3. Kawasan prioritas pengembangan wisata buatan berupa sentra industri marmer berada di Kecamatan Besuki.

Kepariwisataan Kabupaten Tulungagung dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada dalam kawasan tersebut. Pengembangan kepariwisataan diarahkan pada pemanfaatan potensi obyek-obyek wisata dengan tetap memperhatikan kaidah agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup, ketentraman dan ketertiban serta kenyamanan masyarakat.

Kawasan Sentra Industri

Kabupaten memiliki potensi industri yang besar, terutama untuk skala industri kecil dan menengah. Banyak usaha berbasis industri logam, tekstil, agro, kimia dan dan hasil hutan

dikembangkan secara tradisional maupun modern oleh masyarakat luas di Kabupaten Tulungagung. Industri ini berkembang cukup signifikan dari tahun ke tahun melalui pembinaan oleh dinas teknis yang terkait. Pembinaan tersebut meliputi peningkatan kualitas SDM pengusaha dan pelaku industri, pelatihan teknis ketrampilan dan manajemen usaha, bantuan sarana prasarana dan peralatan produksi, desain produk dan kemasan, serta pemasaran, kemitraan dan promosi.

Secara karakteristik industri di Kabupaten Tulungagung tumbuh dan berkembang dalam lingkup sentra industri. Hal ini dipahami sebagai dampak dari perkembangan kultural dan dinamika sosial masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Misalnya sentra industri logam yang terdapat di Desa Kiping Kecamatan Gondang. Sentra tersebut berkembang secara tradisional dan kultural sebagai bentuk interaksi sosial warga masyarakat dalam rangka pengembangan perekonomian keluarga melalui usaha industri logam. Informasi yang berkembang dalam suatu daerah tertentu, yang dipandang memiliki nilai kebenaran dan peluang perbaikan masa yang akan datang itulah yang digunakan oleh masyarakat untuk memulai suatu usaha dibidang industri.

Sentra-sentra industri yang berkembang di Kabupaten Tulungagung terintegrasi secara fungsi dengan wilayah pemukiman masyarakat. Sentra tersebut tidak berkembang dalam sebuah kawasan industri, namun berkembang dalam lingkup kawasan pemukiman dengan output barang industri. Sentra industri ini mampu memberikan kontribusi besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat dalam suatu kawasan pengembangan industri tertentu. Keberadaan sentra produk industri ini juga memudahkan Pemerintah Daerah melalui dinas yang terkait untuk melakukan pembinaan secara berkesinambungan, termasuk didalamnya adalah mengukur seberapa jauh kontribusinya bagi peningkatan ekonomi masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

Berikut ini adalah tabel sentra produk industri yang berkembang di Kabupaten Tulungagung dan telah mendapatkan pembinaan sesuai dengan kebutuhan spesifik sentra tersebut.

Tabel II.47
Sentra Produk Industri Di Kabupaten Tulungagung

No.	Nama Produk/ Komoditi	Wilayah Sentra Pengembangan
1	Anyaman Bambu	Kec. Bandung, Kec. Gondang, Kec. Pagerwojo, Kec. Pakel, Kec. Sendang dan Kec. Sumbergempol
2	Genteng	Kec. Ngunut, Kec. Gondang dan Kec. Pucanglaban
3	Batu Bata Merah	Kec. Gondang, Kec. Sumbergempol dan Kec. Campurdarat
4	Batu Kapur	Kec. Besuki dan Kec. Campurdarat
5	Grabah Tanah Liat	Kec. Rejotangan
6	Kerajinan Marmer/ Onyx	Kec. Campurdarat, Kec. Besuki dan Kec. Pakel
7	Batik	Kec. Kauman, Kec. Kedungwaru, Kec. Ngantru dan Kec. Sendang
8	Konveksi	Kec. Tulungaung, Kec. Kedungwaru, Kec. Boyolangu
9	Bordir	Kec. Tulungagung
10	Kesed	Kec. Kalidawir dan Kec. Sumbergempol
11	Peralatan Dapur dari logam	Kec. Ngunut, Kec. Gondang dan Kec. Rejotangan
12	Barang dari Logam	Kec. Ngunut, Kec. Karangrejo dan Kec. Kedungwaru
13	Peralatan Pertanian	Kec. Ngunut dan Kec. Gondang
14	Emping Mlinjo	Kec. Ngantru
15	Makanan Kecil/ Ringan	Kec. Tulungagung dan Kec. Sumbergempol
16	Gula Merah	Kec. Bandung dan Kec. Sumbergempol
17	Krupuk Gadung	Kec. Campurdarat
18	Krupuk Ketela	Kec. Bandung
19	Krupuk Rambak	Kec. Tulungagung
20	Mebel	Kec. Pucanglaban, Kec. Sendang dan Kec. Kedungwaru
21	Tahu	Kec. Ngunut, Kec. Kalidawir, Kec. Rejotangan dan Kec. Ngantru
22	Tempe	Kec. Gondang, Kec. Bandung, Kec. Rejotangan dan Kec. Kalidawir
23	Sangkar Burung	Kec. Boyolangu
24	Kerajinan Tali Temali	Kec. Sumbergempol
25	Keripik Gadung	Kec. Campurdarat dan Kec. Kalidawir

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Gambaran Pengelolaan Keuangan daerah disusun dengan menganalisis capaian kinerja keuangan pada periode sebelumnya dan memberikan proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan pada periode mendatang. Analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Berdasar peraturan yang mendasarinya, pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Kemampuan keuangan periode sebelumnya pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu dianalisis, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Seluruh kegiatan Pemerintah Daerah akan terlaksana dengan baik apabila beriringan dengan kinerja keuangan daerah yang baik. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan

dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi: Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; Penerimaan daerah; Pengeluaran daerah; Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; serta Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Kinerja keuangan Kabupaten Tulungagung periode tahun 2011–2016 berdasarkan pada data kinerja keuangan yang diperoleh dari beberapa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Daerah diperoleh baik dari sumber Pendapatan Asli Daerah maupun sumber-sumber pendapatan lainnya.

Analisis pendapatan yang pertama kali dilakukan adalah Analisis Pertumbuhan Pendapatan. Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan positif atautkah negatif. Hasil dari analisis pertumbuhan pendapatan ini nantinya akan diperoleh angka rata-rata pertumbuhan pendapatan untuk periode 6 tahun terakhir, yaitu mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.

Nominal pertumbuhan pendapatan daerah selama kurun waktu lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016

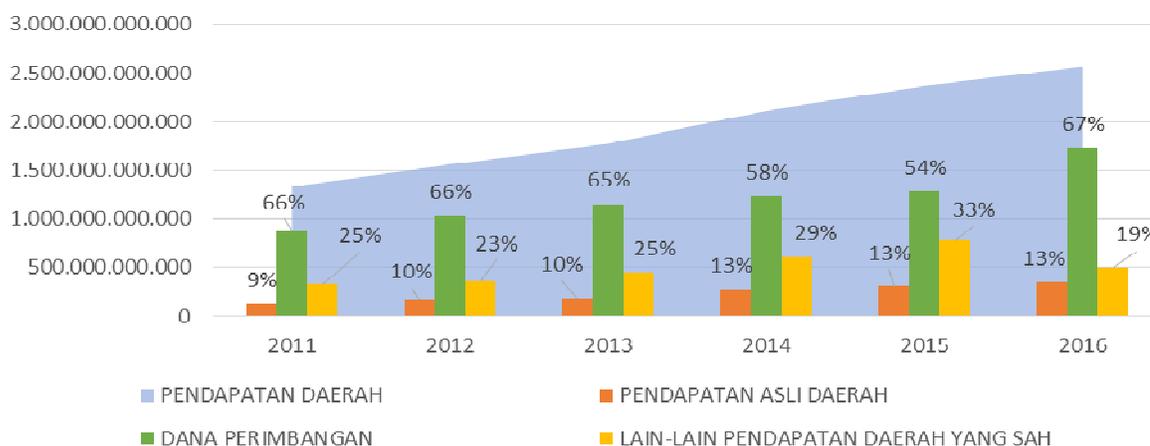
NOMOR URUT	URAIAN	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	Rata-rata Pertumbuhan
1.	PENDAPATAN DAERAH	1,332,422,351,566.07	1,559,993,709,477.36	1,774,874,063,728.08	2,114,558,431,869.22	2,369,737,223,681.74	2,570,279,524,127.71	14,10%
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	124,517,804,186.07	162,161,670,210.36	174,981,706,538.08	276,577,973,500.22	309,646,333,185.74	342,570,756,798.97	23.76%
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	22,086,869,272.74	25,543,716,677.80	29,775,702,287.55	56,750,760,218.02	62,340,809,291.64	67,457,168,815.02	28.17%
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	13,843,257,383.13	15,585,227,854.58	19,110,755,509.00	27,359,032,048.00	19,332,326,783.00	22,674,086,533.00	13.26%
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1,654,038,322.03	1,855,404,287.87	2,848,627,526.50	3,794,012,832.45	4,125,888,857.50	4,553,186,053.00	23.60%
1.1.4.	Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah	86,933,639,208.17	119,177,321,390.11	123,246,621,215.03	188,674,168,401.75	223,847,308,253.60	247,886,315,397.95	24,59%
1.2.	DANA PERIMBANGAN	878,223,493,674.00	1,034,185,939,195.00	1,150,452,158,043.00	1,228,749,107,704.00	1,281,702,685,859.00	1,728,720,098,875.00	15.00%
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	878,223,493,674.00	1,034,185,939,195.00	1,150,452,158,043.00	1,228,749,107,704.00	1,281,702,685,859.00	1,728,720,098,875.00	15.00%
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	73,768,856,674.00	87,290,311,195.00	82,463,824,043.00	71,137,985,704.00	59,885,008,859.00	76,715,573,584.00	2.27%
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	723,703,537,000.00	878,221,208,000.00	996,300,694,000.00	1,083,859,022,000.00	1,111,457,117,000.00	1,172,557,802,000.00	10.33%
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	80,751,100,000.00	68,674,420,000.00	71,687,640,000.00	73,752,100,000.00	110,360,560,000.00	479,446,723,291.00	75.28%
1.3.	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	329,681,053,706.00	363,646,100,072.00	449,440,199,147.00	609,231,350,665.00	778,388,204,637.00	498,988,668,453.74	12.26%
1.3.1.	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	2,000,000,000.00	0.00	8,437,716,000.00	16,683,429,867.74	0,46%
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	72,279,404,746.00	70,543,472,072.00	81,232,688,867.00	128,938,022,575.00	122,118,397,637.00	134,852,032,586.00	15.32%
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	193,757,169,960.00	217,666,843,000.00	311,416,144,500.00	340,981,971,000.00	459,351,838,000.00	201,789,726,000.00	8.71%
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	63,644,479,000.00	75,435,785,000.00	54,555,225,000.00	139,211,117,000.00	188,480,253,000.00	145,663,480,000.00	31.74%
1.3.6.	Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	236,140,780.00	100,240,090.00	0.00	0.00	- 31.51%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016

Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung adalah sebesar 14,10% setiap tahunnya. Pertumbuhan Pendapatan Daerah tertinggi terjadi pada Tahun 2016, dimana pendapatan yang diperoleh adalah sebesar Rp.2.570.279.524.127,71 Bahkan komponen Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2016 tumbuh sebesar 10,63% dari pendapatan tahun sebelumnya menjadi Rp.342.570.756.798,97. Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

dapat dikatakan memiliki rata-rata pertumbuhan yang cukup baik meskipun angka pertumbuhan setiap tahun nya terbilang fluktuatif.

Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung sendiri terdiri dari beberapa komponen diantaranya Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari komponen Pendapatan Daerah tersebut, selama berjalanya pemerintahan di Kabupaten Tulungagung pada periode tahun 2011-2016 dapat diketahui proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. Komponen Pendapatan Daerah dengan proporsi paling tinggi selama 5 tahun terakhir adalah Dana Perimbangan yang selalu memegang proporsi dominan di atas 50% dari Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. Sementara itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung dalam 5 tahun terakhir secara konsisten memiliki proporsi paling kecil dibandingkan dengan Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada gambar 3.1 berikut dapat dilihat proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung pada periode 2011-2016:



Gambar 3.1 Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kab. Tulungagung Tahun 2011-2016

Melihat proporsi komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2011-2016, dapat menggambarkan bahwa Kinerja Pelaksanaan APBD dalam hal Pendapatan masih tergantung pada Dana Perimbangan baik Dana Alokasi Umum maupun Khusus dari Pemerintah Pusat hingga Dana Bagi Hasil. Kemandirian Fiskal Kabupaten Tulungagung pada tahun 2011-2016 masih rendah, dapat dilihat dengan proporsi PAD yang selalu menjadi penyumbang terkecil bagi Pendapatan Daerah.

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud terdiri dari: Belanja pegawai, Belanja bunga, Belanja subsidi, Belanja hibah, Belanja bantuan sosial, Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota/desa, Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan, Belanja tidak terduga.

Sedangkan Belanja Langsung meliputi Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa dan Belanja modal. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (Performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik.

Tabel 3.2. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan
2.1	Belanja Tidak Langsung	897,062,511,052.29	1,030,605,096,286.51	1,178,081,278,726.92	1,309,053,466,590.28	1,437,310,852,487.31	1,531,250,696,133.03	11%
2.1.1	Belanja Pegawai	804,582,422,247.00	917,694,331,485.00	1,009,735,476,486.00	1,108,105,713,253.53	1,131,516,789,880.79	1,164,870,781,936.77	8%
2.1.2	Belanja Bunga	34,215,055.29	14,709,526.51	1,053,606,517.72	492,624,722.25	43,447,319.52	0.00	1352%
2.1.3	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2.1.4	Belanja Hibah	8,787,368,000.00	38,057,232,000.00	78,707,549,934.53	105,664,594,668.50	90,808,472,193.00	55,278,056,240.00	84%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	32,116,271,373.00	20,249,104,500.00	18,847,753,500.00	13,866,821,300.00	14,002,629,340.00	14,173,071,920.00	-14%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kab / Kota dan Pemerintahan Desa	5,547,391,009.00	4,942,995,406.00	5,398,112,028.00	7,627,829,996.00	8,678,815,354.00	6,776,270,151.00	6%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kab / Kota dan Pemerintah Desa	40,639,913,468.00	47,059,643,468.00	62,997,951,760.67	72,732,513,100.00	192,027,773,400.00	289,105,939,735.00	56%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5,354,929,900.00	2,587,079,901.00	1,340,828,500.00	563,369,550.00	232,925,000.00	1,046,576,150.26	27%
2.2	Belanja Langsung	398,956,407,620.52	546,289,730,508.44	502,251,081,077.03	737,752,212,859.29	880,037,582,130.03	1,075,043,158,770.42	23%
2.2.1	Belanja Pegawai	25,156,265,090.00	60,726,921,356.00	64,343,586,230.00	72,430,738,091.00	68,968,117,318.00	76,028,450,547.00	33%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	235,846,984,885.19	266,007,074,702.02	284,812,357,076.03	349,775,308,718.67	366,482,385,295.03	424,673,389,732.70	13%
2.2.3	Belanja Modal	137,953,157,645.33	219,555,734,450.42	153,095,137,771.00	315,546,166,049.62	444,587,079,517.00	574,341,318,490.72	41%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016

Melihat informasi pada tabel 3.2 diketahui rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Daerah di Kabupaten Tulungagung pada 2011-2016. Dari komponen Belanja Daerah, Belanja Tidak langsung memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 11% Belanja Bunga sebagai komponen Belanja Tidak Langsung memiliki rata-rata pertumbuhan yang sangat tinggi sebesar 1.352%, hal ini disebabkan oleh melonjaknya Belanja Bunga pada tahun 2013 dari Rp. 14.709.526,51 menjadi Rp. 1.053.606.517,72. Sementara itu, untuk Belanja langsung angka rata-rata pertumbuhan lebih besar dibanding dengan Belanja Tidak Langsung yakni sebesar 23%. Diketahui juga dari tabel 3.2 terdapat komponen Belanja yang rata-rata pertumbuhannya menurun, yakni Belanja Bantuan Sosial.

Selanjutnya realisasi belanja daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2011-2016 dibandingkan dengan anggaran belanjanya untuk mengetahui proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja. Dengan mengetahui proporsi tersebut maka akan memberikan komponen gambaran untuk melakukan proyeksi keuangan pada masa mendatang. Berikut tabel 3.3 yang menjelaskan proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016:

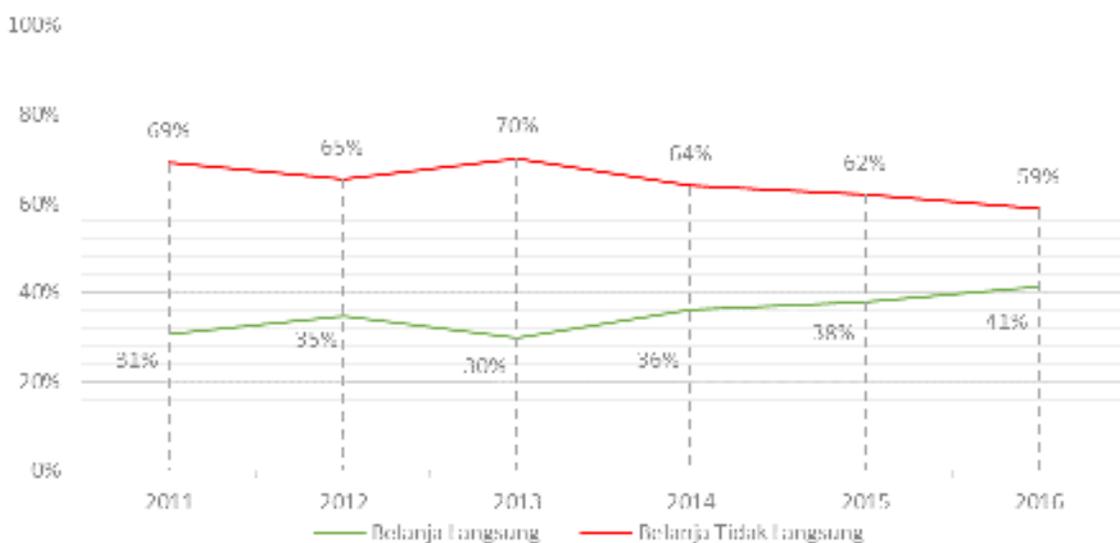
Tabel 3.3. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016

NOMOR URUT	URAIAN	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	98%	97%	93%	92%	88%	98%
2.1.1.	Belanja Pegawai	98%	97%	91%	92%	88%	98%
2.1.2.	Belanja Bunga	62%	27%	105%	90%	97%	
2.1.3.	Belanja Subsidi						
2.1.4.	Belanja Hibah	92%	98%	120%	88%	78%	93%
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	91%	97%	104%	93%	89%	94%
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Kepada Provinsi / Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	99%	100%	85%	74%	69%	79%
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	94%	95%	90%	95%	100%	100%
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	89%	56%	27%	10%	4%	25%
2.2.	BELANJA LANGSUNG	84%	96%	88%	95%	95%	98%
2.2.1.	Belanja Pegawai	91%	105%	103%	110%	103%	107%
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	98%	101%	88%	95%	96%	100%

NOMOR URUT	URAIAN	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
2.2.3.	Belanja Modal	67%	89%	84%	93%	93%	95%
	JUMLAH BELANJA	93%	97%	91%	93%	91%	98%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016

Dari tabel 3.3 diketahui proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Kabupaten Tulungagung tahun 2011-2016. Realisasi hampir menyentuh angka 100% setiap tahunnya menandakan kinerja keuangan Kabupaten Tulungagung yang efektif dan akuntabel. Selain proporsi diatas, berikut juga terdapat analisis mengenai proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung terhadap keseluruhan Belanja Daerah:



Gambar 3.2 Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kabupaten Tulungagung 2011-2016

Berdasarkan informasi pada Gambar 3.2 diketahui bahwa Kabupaten Tulungagung pada tahun 2011-2016 memiliki proporsi Belanja Daerah yang fluktuatif. Namun usaha untuk menekan proporsi Belanja Tidak Langsung terlihat dengan menurunnya proporsi Belanja Tidak Langsung pada Tahun 2014 hingga Tahun 2016. Sementara proporsi untuk belanja langsung meski sempat fluktuatif pada tahun 2011 hingga 2013, terus meningkat hingga tahun 2016.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Begitu

pula dengan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan Perangkat Daerah. Rincian mengenai realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2011-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut:

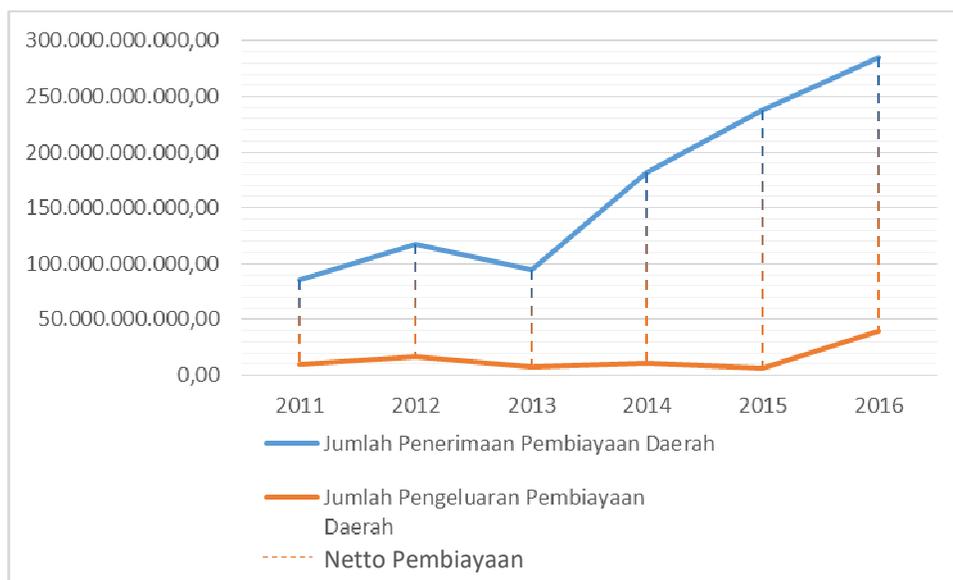
Tabel 3.4. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016

Uraian	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan Daerah						
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	84,707,645,697.70	111,637,408,820.96	83,845,373,991.37	181,608,908,282.95	238,334,915,702.60	284,804,899,767.00
Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	3,208,100,612.45	0.00	0.00	0.00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	355,765,817.00	431,001,883.00	665,990,635.00	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	5,842,260,880.00	6,657,739,120.00	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	85,063,411,514.70	117,910,671,583.96	94,377,204,358.82	181,608,908,282.95	238,334,915,702.60	284,804,899,767.00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah						
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6,665,255,312.00	17,000,000,000.00	2,500,000,000.00	5,254,745,000.00	3,998,000,000.00	18,683,429,867.74
Pembentukan Dana Cadangan	3,000,000,000.00	0.00	0.00		0.00	21,010,296,712.44
Pembayaran Pokok Utang	164,180,275.00	164,180,275.00	4,810,000,000.00	5,772,000,000.00	1,918,000,000.00	0.00
Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00			0.00	0.00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	9,829,435,587.00	17,164,180,275.00	7,310,000,000.00	11,026,745,000.00	5,916,000,000.00	39,693,726,580.18
Pembiayaan Netto	75,233,975,927.70	100,746,491,308.96	87,067,204,358.82	170,582,163,282.95	232,418,915,702.60	245,111,173,186.82

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016

Dari tabel 3.4 diketahui jumlah penerimaan pembiayaan daerah maupun jumlah pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2011-2016. Diketahui bahwa penerimaan pembiayaan Kabupaten Tulungagung cenderung mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan penerimaan pembiayaan terbesar terjadi pada tahun 2016 dengan penerimaan sebesar Rp.248.804.899.767,00. Sementara itu pengeluaran pembiayaan Kabupaten Tulungagung pada tahun 2011-2016 relatif stabil sehingga menghasilkan pembiayaan Netto yang cenderung meningkat setiap tahunnya.

Pergerakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2011-2016 dapat dilihat pada gambar 3.3.



Gambar 3.3 Perbandingan Penerimaan dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Laporan neraca daerah akan menggambarkan informasi penting kepada manajemen Pemerintah Daerah, Pihak Legislatif daerah maupun para kreditur/ pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Pada setiap elemen utama dari neraca daerah akan

diturunkan dalam beberapa sub – sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan rata – rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata Pertumbuhan
ASET							
ASET LANCAR	132.584.754.166,36	106.345.265.424,72	228.791.825.025,59	280.133.952.578,69	321.797.072.991,48	269.653.441.756,54	23%
Kas	104.169.199.493,27	78.626.149.606,37	173.344.543.932,37	227.404.012.780,88	277.097.031.823,45	195.703.710.573,27	24%
Kas di BLU	7.530.824.059,14	5.225.650.885,00	7.725.696.400,58	8.019.722.551,72	4.074.564.394,48	10.760.212.790,77	27%
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Piutang	8.114.115.052,53	10.577.376.526,97	32.578.603.720,55	25.777.211.177,00			29%
Persediaan	12.770.615.561,42	11.916.088.406,38	14.557.047.444,99	9.523.077.730,92	12.346.374.345,29	17.688.684.620,21	11%
INVESTASI JANGKA PANJANG	32.795.543.684,49	72.566.078.088,94	78.705.649.142,04	89.136.202.449,00	93.275.905.179,25	107.060.225.460,84	32%
Investasi Non Permanen	5.010.000.000,00	4.975.904.791,00	4.963.817.040,00	4.980.330.698,00	59.700.000,00	0,00	-40%
Investasi Permanen	27.785.543.684,49	67.590.173.297,94	73.741.832.102,04	84.155.871.751,00	93.216.205.179,25	107.060.225.460,84	38%
ASET TETAP	1.445.639.610.105,21	1.689.619.344.734,92	1.806.794.285.555,96	2.181.177.399.910,81	1.807.299.650.399,03	2.758.703.849.540,62	16%
Tanah	358.301.228.988,00	404.301.096.178,00	364.259.850.508,00	421.830.503.558,00	411.307.603.228,00	958.547.321.448,00	30%
Peralatan dan Mesin	211.578.866.308,08	256.830.926.892,08	292.216.116.694,08	351.046.315.065,08	398.731.574.182,85	454.402.979.484,21	17%
Gedung dan Bangunan	316.872.003.022,00	391.727.275.754,00	468.944.829.896,00	544.274.644.896,50	649.158.482.462,83	699.541.790.968,63	17%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	526.086.658.570,33	594.196.068.481,75	646.256.222.799,79	825.567.125.652,14	1.090.326.862.490,14	1.559.978.723.949,14	25%
Aset Tetap Lainnya	23.291.069.235,09	31.085.569.260,09	34.820.715.658,09	38.191.510.739,09	51.635.247.677,41	59.831.084.433,31	21%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.509.783.981,71	11.478.408.169,00	296.550.000,00	267.300.000,00	5.128.230.300,00	9.436.047.000,00	363%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00	(798.988.349.942,21)	(983.034.097.782,67)	23%
DANA CADANGAN	3.017.463.664,00	3.193.823.039,99	0,00	0,00	0,00	21.010.296.712,44	-47%
ASET LAINNYA	16.235.190.309,86	25.241.701.075,57	23.838.243.764,57	17.421.303.474,57	48.931.446.279,44	66.684.210.750,18	48%
JUMLAH ASET	1.630.272.561.929,92	1.896.966.212.364,14	2.138.130.003.488,16	2.567.868.858.413,07	2.271.304.074.849,20	3.223.112.024.220,61	16%
KEWAJIBAN							
Kewajiban Jangka Pendek	358.814.176,00	3.928.194.544,48	11.583.738.355,00	11.419.655.744,51	12.543.430.274,68	44.029.189.739,85	290%
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	5.842.260.880,00	1.918.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-84%
JUMLAH KEWAJIBAN	358.814.176,00	9.770.455.424,48	13.501.738.355,00	11.419.655.744,51	12.543.430.274,68	44.029.189.739,85	581%
EKUITAS DANA							

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata Pertumbuhan
EKUITAS DANA LANCAR	132.225.939.990,36	102.417.070.880,24	217.208.086.670,59	268.714.296.834,18			3%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	111.637.408.820,96	83.845.373.991,37	181.608.908.282,95	238.334.915.702,60			6%
Pendapatan yang Ditangguhkan	62.614.731,45	6.295.000,00	6.579.245,10	51.217.100,00			123%
Cadangan Piutang	8.114.115.052,53	10.577.376.526,97	32.578.603.720,55	32.224.742.045,17			34%
Cadangan Persediaan	12.770.615.561,42	11.916.088.406,38	14.557.047.444,99	9.523.077.730,92			-30%
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(358.814.176,00)	(3.928.063.044,48)	(11.543.052.023,00)	(11.419.655.744,51)			272%
EKUITAS DANA INVESTASI	1.494.670.344.099,56	1.781.584.863.019,43	1.907.420.178.462,57	2.287.734.905.834,38			-13%
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	32.795.543.684,49	72.566.078.088,94	78.705.649.142,04	89.136.202.449,00			11%
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	1.445.639.610.105,21	1.689.619.344.734,92	1.806.794.285.555,96	2.181.177.399.910,81			-14%
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	16.235.190.309,86	25.241.701.075,57	23.838.243.764,57	17.421.303.474,57			-19%
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	0,00	(5.842.260.880,00)	(1.918.000.000,00)	0,00			-84%
EKUITAS DANA CADANGAN	3.017.463.664,00	3.193.823.039,99	0,00	0,00			-47%
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	3.017.463.664,00	3.193.823.039,99	0,00	0,00			-47%
JUMLAH EKUITAS DANA	1.629.913.747.753,92	1.887.195.756.939,66	2.124.628.265.133,16	2.556.449.202.668,56	2.258.760.644.574,52	3.179.082.834.480,76	16%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.630.272.561.929,92	1.896.966.212.364,14	2.138.130.003.488,16	2.567.868.858.413,07	2.271.304.074.849,20	3.223.112.024.220,61	16%

Sumber: BPKAD Kabupaten Tulungagung

Aset memberikan memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat maupun Pemerintah daerah dimasa yang akan datang. Aset terdiri atas aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Kewajiban merupakan dampak dari pelaksanaan tugas atau tanggung jawab yang terjadi dimasa lalu. Kewajiban memberikan informasi kepada pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pendapatan daerah – termasuk Pendapatan Asli Daerah – harus benar-benar mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi. Upaya pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan dengan sebaik mungkin supaya dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah, perlu adanya strategi koleksi dan pemetaan potensi penerimaan daerah baik yang bersumber dari pajak, retribusi maupun penerimaan lain-lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku.

Aspek yang dapat mempengaruhi kebijakan pendapatan daerah antara lain adanya regulasi peraturan yang merupakan acuan yang dipakai dalam menggali penerimaan daerah dan struktur ekonomi/ sosial masyarakat yang sangat menentukan kemampuan masyarakat dalam membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Teknik yang digunakan untuk mengukur potensi harus lebih realistis yakni tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk senantiasa menaikkan pajak dan retribusi akan

tetapi juga melihat aspek lain yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Bertitik tolak pada kondisi tersebut, kebijakan strategis yang akan dilakukan dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Kondisi penggunaan anggaran di Kabupaten Tulungagung terhitung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 relatif mengalami perkembangan, hal ini sepintas memperlihatkan bahwa APBD Kabupaten Tulungagung telah berusaha untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi publik meskipun porsi untuk Belanja Pegawai masih cukup besar. Berikut tabel mengenai analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Tulungagung tahun 2011-2016:

Tabel 3.6. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Uraian Tahun Anggaran	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun 2011	829.738.687.337,00	1.305.848.354.259,81	63,54 %
2	Tahun 2012	978.421.252.841,00	1.594.059.007.069,95	61,38 %
3	Tahun 2013	1.074.079.062.716,00	1.687.642.359.803,95	63,64 %
4	Tahun 2014	1.180.536.451.344,53	2.057.832.424.449,57	57,37 %
5	Tahun 2015	1.200.484.907.198,79	2.323.264.434.617,34	51,67 %
6	Tahun 2016	1.240.899.232.483,77	2.645.987.581.483,63	46,90 %

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016

Total Belanja untuk pemenuhan aparatur tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 terus meningkat. Total Pengeluaran yaitu Belanja daerah ditambah pembiayaan pengeluaran, dari tahun 2011-2016 pun meningkat dengan cukup progresif.

Berdasarkan tabel 3.6, menunjukkan bahwa mayoritas belanja daerah pada tahun 2011-2015 digunakan untuk pemenuhan belanja aparatur. Sementara pada tahun 2016 proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur menurun menjadi 46,90%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung berupaya untuk melaksanakan kinerja keuangan yang efektif dengan menekan porsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur demi memberikan pelayanan yang baik kepada publik.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Dalam menyalurkan surplus dan menutup defisit pada penganggaran dikenal adanya pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Begitu pula dengan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berikut merupakan tabel berkenaan dengan defisit riil anggaran Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 sampai dengan tahun 2016:

Tabel 3.7. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016

No	Uraian	Th. 2011	Th. 2012	Th. 2013	Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,332,422,351,56 6.07	1,559,993,709,477. 36	1,774,874,063,72 8.08	2,114,558,431,86 9.22	2,369,737,223,68 1.74	2,570,279,524,12 7.71
2	Belanja Daerah	1,296,018,918,67 2.81	1,576,894,826,794. 95	1,680,332,359,80 3.95	2,046,805,679,44 9.57	2,317,348,434,61 7.34	2,606,293,854,90 3.45
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	9,829,435,587.00	17,164,180,275.00	7,310,000,000.00	11,026,745,000.0 0	5,916,000,000.00	39,693,726,580.1 8
	Defisit riil	26,573,997,306. 26	(34,065,297,592.5 9)	87,231,703,924. 13	56,726,007,419. 65	46,472,789,064. 40	(75,708,057,355. 92)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tulungagung 2011-2016

Defisit Riil Anggaran suatu pemerintah daerah terbentuk oleh realisasi pendapatan daerah dikurangi dengan beban-beban berupa belanja daerah serta pengeluaran pembiayaan daerah. Defisit riil anggaran tersebut nantinya akan ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan daerah. Pada Kabupaten Tulungagung defisit anggaran pada tahun 2012 adalah sebesar Rp.34,065,297,592.59 sedangkan pada tahun 2016 adalah Rp.75,708,057,355.92. Defisit tersebut akan ditutup dengan penerimaan pembiayaan daerah dan kemudian selisih yang diperoleh disebut dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).

SILPA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Berkaitan dengan keberadaan SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tersebut dapat bermakna positif ataupun negatif. Bermakna positif Jika SiLPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi over target dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan SiLPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah. Pada tabel 3.8. akan dijelaskan komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Tulungagung 2011-2016:

Tabel 3.8. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tulungagung 2011-2016

No.	Uraian	Proporsi Total Defisit Riil					
		Tahun 2011 (Rp.)	Tahun 2012 (Rp.)	Tahun 2013 (Rp.)	Tahun 2014 (Rp.)	Tahun 2015 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	84,707,645,697.70	111,637,408,820.96	83,845,373,991.37	181,608,908,282.95	238,334,915,702.60	284,807,704,767.00
2	Pencairan dana cadangan	0	0	3,208,100,612.45	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	355,765,817.00	431,001,883.00	665,990,635.00	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	5,842,260,880.00	6,657,739,120.00	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	0
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan	111,637,408,820.96	83,845,373,991.37	181,608,908,282.95	238,334,915,702.60	284,807,704,767.00	209,096.842.411,08
	Total	196,700,820,335.66	201,756,045,575.33	275,986,112,641.77	419,943,823,985.55	523,142,620,469.60	493.904.547.178,08

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tulungagung 2011-2016

Komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Tulungagung 2011-2016 mayoritas berasal dari SILPA baik tahun anggaran sebelumnya maupun tahun anggaran berkenaan. Perolehan SILPA tahun sebelumnya sebagai komponen penutup defisit riil anggaran sendiri selalu meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2016 diperoleh SILPA sebesar Rp.209.096.842.411,08. Sementara komponen penyumbang penutup defisit riil anggaran lainya berasal dari pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan serta penerimaan pinjaman daerah. Total penutup defisit anggaran cenderung meningkat setiap tahunnya kecuali pada tahun 2016 yang menurun dari perolehan komposisi penutup defisit riil anggaran tahun 2015. Meningkatnya komposisi penutup defisit riil merupakan hal yang baik karena digunakan untuk menutup defisit riil anggaran, namun perlu diperhatikan juga penyerapannya agar diperoleh kinerja keuangan yang efektif.

Tabel 3.9. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016

N o.	Uraian	2011 Rp	2012 Rp	2013 Rp	2014 Rp	2015 Rp	2016 Rp
1	Jumlah SILPA	196.700.820.335,66	201.756.045.575,33	275.986.112.641,77	419.943.823.985,55	523.142.620.469,60	493.904.547.178,08
2	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0	0	0	0
3	Penerimaan piutang daerah	0	0	0	0	0	0

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tulungagung 2011-2016

3.3 Kerangka Pendanaan

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Pada tabel 3.10. akan dipaparkan data mengenai pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya.

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Prosentase rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dihasilkan berdasarkan perhitungan total dari selisih anggaran setiap tahun dibagi tahun dasar dikalikan 100%.

Tabel 3.10. Pengeluaran Wajib, Periodik dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2016

No	Uraian	Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016	Rata - Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
A	Belanja Tidak Langsung				
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	813.732.918.185,12	835.431.277.054,42	863.271.992.774,08	3,00%
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	12.660.315.000,00	14.997.855.000,00	15.027.205.000,00	9,33%
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.216.000.000,00	4.380.000.000,00	4.380.000.000,00	1,94%
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah				
	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.943.115.255,00	3.524.221.948,00	4.754.325.173,40	27,32%
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	939.405.036,00	971.593.400,00	1.394.248.701,24	23,46%
B	Belanja Langsung				
1	Belanja Honorarium PNS	16.100.732.500,00	21.055.698.500,00	20.957.993.500,00	15,16%
2	Belanja Uang Lembur	4.565.432.500,00	4.300.345.500,00	3.730.935.500,00	-9,52%
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	68.400.000,00	58.800.000,00	59.400.000,00	-6,51%
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.088.250.000,00	2.226.680.000,00	2.683.335.000,00	-3,69%
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	666.000.000,00	-	-	-50%
6	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	19.576.437.500,00	24.221.745.000,00	29.457.299.950,00	22,67%
7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.479.852.500,00	1.216.186.000,00	2.117.899.000,00	28,16%
8	Belanja Perjalanan Dinas	61.025.779.650,00	58.669.925.000,00	79.009.667.500,00	15,40%
	TOTAL	941.062.638.126,12	971.054.327.402,42	1.026.844.302.098,72	4,47%

3.3.1 Proyeksi Pendapatan 2018

Dalam sisa periode pelaksanaan RPJMD 2014-2018, kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tulungagung diharapkan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah meningkat dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah. Berdasarkan data dalam kurun waktu dari tahun 2011 sampai dengan 2016, pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung masih bergantung pada dana perimbangan. Sedangkan dari sisi belanja daerah, daya serap anggaran pada keuangan Kabupaten Tulungagung masih terkonsentrasi pada kebutuhan belanja tidak langsung. Hal tersebut berdasarkan analisis-analisis sebelumnya yang memperlihatkan proporsi belanja Kabupaten Tulungagung. Berikut merupakan proyeksi keuangan daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2018:

Tabel 3.11 Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018

NO	URAIAN	PROYEKSI Th.2018
I	PENDAPATAN	2.369.775.228.475,83
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	341.381.514.263,00
	Pendapatan Pajak Daerah	69.712.859.763,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	23.273.886.598,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,172.090.050,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	243.222.677.852,00
B	DANA PERIMBANGAN	1.610.762.169.343,00
	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	68.066.882.643,00
	Dana Alokasi Umum	1.151.959.732.000,00
	Dana Alokasi Khusus	390.735.554.700,00
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	417.631.544.869,00
	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	120.754898.369,83
	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	253.310.260.000,0
	Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	43.566.386.500,00
II	BELANJA	2.554.872.070.886,91
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.513.518.678.892,18
1	Belanja Pegawai	1.084.662.245.889,18
2	Belanja Hibah	79.152.540.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial	6.391.000.000,00
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Prop/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7.675.562.661,00
5	Belanja Bantuan Keuangan	330.465.365.000,00
6	Belanja Tak Terduga	5.171965.342,00
B	BELANJA LANGSUNG	1.041.353.391.994,73

NO	URAIAN	PROYEKSI Th.2018
1	Belanja Pegawai	87.425.924.800,00
2	Belanja barang dan jasa	589.525.031.033,15
3	Belanja Modal	364.402.436.161,58
	SURPLUS / (DEFISIT)	(185.096.842.411,08)
III	PEMBIAYAAN	185.096.842.411,08
A	PENERIMAAN DAERAH	209.096.842.411,08
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	209.096.842.411,08
B	PENGELUARAN DAERAH	24.000.000.000,00
	Pembentukan Dana Cadangan	14.000.000.000,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	185.096.842.411,08
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00

Sumber: Perhitungan Proyeksi dari Laporan Realisasi Anggaran

Proyeksi keuangan daerah pada tabel 3.11 menjelaskan ekspektasi keuangan daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2018 baik dari segi pendapatan maupun belanja serta pembiayaan. Pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung diproyeksikan meningkat menjadi Rp.2.369.775.228.475,83. Dengan meningkatnya proyeksi pendapatan, sehingga demi terlaksananya pengelolaan keuangan yang efektif maka proyeksi belanja daerah Kabupaten Tulungagung juga meningkat menjadi Rp.2.554.872.070.886,91. Selanjutnya pembiayaan netto diproyeksikan sebesar Rp185.096.842.411,00. Dari proyeksi pendapatan hingga pembiayaan tersebut tidak diperoleh SILPA. Proyeksi pendapatan ini kemudian digunakan sebagai kerangka pendanaan Kabupaten Tulungagung pada tahun 2018 diharapkan mampu memberikan efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan sehingga mampu melaksanakan agenda pemerintahan yang telah ditetapkan.

3.3.2 Kebijakan Alokasi Anggaran

Analisis sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berikut ini merupakan tabel kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah tahun 2018.

Tabel 3.12 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018

No.	Uraian	Proyeksi Tahun 2018 (Rp)
1	Pendapatan	2.369.775.228.475,83
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0,00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	0,00
Total penerimaan		2.369.775.228.475,83
Dikurangi:		
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	0,00
Kapasitas riil kemampuan keuangan		2.369.775.228.475,83

Tabel 3.13 Kerangka Pendanaan Alokasi Keuangan Daerah

No.	Jenis Dana	%	Alokasi 2018 Rp
1	Prioritas I	29	694.474.212.000,00
2	Prioritas II	7	161.782.337.583,65
3	Prioritas III	64	1.513.518.678.892,18
	Total	100	2.369.775.228.475,83

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan. Namun demikian, sebagai kabupaten yang multifungsi, sampai saat ini Tulungagung tetap menyanggah banyak permasalahan, baik dari eksternal maupun internal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Tulungagung diantaranya meliputi:

1. Pelayanan pendidikan pada umumnya masih belum maksimal;
2. Layanan kesehatan masih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
3. Manajemen pemerintah daerah dan pelayanan publik yang belum optimal;
4. Rendahnya kualitas infrastruktur;
5. Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya meningkatkan daya beli masyarakat;
6. Kurangnya efektifitas program-program penanggulangan kemiskinan.

4.2. Isu Strategi

4.2.1 Pendidikan

Kualitas pendidikan relatif rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Berbagai upaya pembangunan pendidikan termasuk Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun dan dua belas tahun telah dicanangkan untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Kabupaten Tulungagung. Namun demikian sampai saat ini tingkat pendidikan penduduk relatif masih rendah. Kondisi tersebut belum memadai untuk menghadapi persaingan global dan belum mencukupi pula sebagai landasan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*). Kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh

(1) ketersediaan pendidik yang belum memadai secara kualitas, dan (2) fasilitas belajar belum tersedia secara mencukupi.

Fasilitas pelayanan pendidikan khususnya jenjang pendidikan menengah pertama dan yang lebih tinggi belum tersedia secara merata. Adanya ketimpangan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bukan saja terjadi pada penduduk usia sekolah, tetapi juga terjadi antar wilayah geografis, gender serta antar kawasan. Perkembangan pendidikan mengungkapkan bahwa faktor ekonomi merupakan alasan utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, baik karena tidak memiliki biaya sekolah maupun karena harus bekerja. Hal tersebut berdampak pada tingginya kesenjangan partisipasi pendidikan antara penduduk miskin dengan penduduk kaya. Sebagian dari masyarakat menilai bahwa pendidikan masih relatif mahal.

Fasilitas pelayanan pendidikan di daerah pedesaan dan terpencil masih terbatas sehingga menyebabkan sulitnya anak-anak untuk mengakses layanan pendidikan. Selain itu, fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa juga belum tersedia secara memadai. Pendidikan non formal yang berfungsi sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja (*transition from school to work*) maupun sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat dan diarahkan terutama untuk meningkatkan kecakapan hidup dan pembinaan profesionalisme serta kompetensi vokasional belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Selain itu, format dan kualitas pendidikan non formal juga belum memungkinkan untuk digunakan sebagai pengganti pelajaran yang relevan di satuan pendidikan formal. Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan lulusan. Lulusan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi masih cenderung memilih bekerja pada orang lain dibanding menciptakan pekerjaan bagi dirinya sendiri. Manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien. Dengan dilaksanakannya desentralisasi pendidikan, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan yang lebih luas dalam membangun pendidikan di masing-masing wilayah sejak penyusunan rencana, penentuan prioritas program serta mobilisasi sumberdaya

untuk merealisasikan rencana yang telah dirumuskan. Sejalan dengan itu, otonomi pendidikan telah dilaksanakan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah yang memberikan wewenang yang lebih luas pada satuan pendidikan untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki termasuk mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan. Dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan diharapkan daerah dan satuan pendidikan lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat.

Namun demikian pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena belum mantapnya pembagian peran dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan termasuk kontribusinya dalam penyediaan anggaran pendidikan. Disamping itu efektivitas peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah juga belum optimal. Isu – isu strategis dalam pelaksanaan bidang pendidikan adalah :

1. Mutu pendidikan belum merata;
2. Tingkat pendidikan relatif masih rendah;
3. Manajemen pendidikan belum berjalan efektif;
4. Fasilitas dan sarana prasarana pendidikan belum merata;
5. Ketimpangan pendidikan antar wilayah kecamatan;
6. Tenaga Kependidikan, peran pendidikan non formal belum efektif;
7. Anggaran pendidikan belum mencukupi semua kebutuhan;
8. Peningkatan mutu lulusan dan kompetensi pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berbasis pada kearifan dan budaya lokal;
9. Peningkatan pemerataan mutu pendidikan, Kurang meratanya penguasaan ilmu pengetahuan. Teknologi dan informasi para peserta didik dalam mewujudkan lulusan yang handal, profesional dan siap bersaing dalam dunia kerja;
10. Penguasaan teknologi dan informasi dalam rangka mewujudkan hasil pendidikan berdaya saing tinggi.

4.2.2 Layanan Kesehatan

Kualitas pelayanan kesehatan belum optimal karena belum semua sarana pelayanan kesehatan melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Keterjangkauan dan pemerataan pelayanan

dapat dilihat dengan rasio jumlah sarana yang ada. Jenis pelayanan bervariasi sesuai dengan tenaga dan peralatan yang tersedia. Belum semua peralatan dan tenaga tersedia sesuai kebutuhan dan standarisasi. Disamping itu rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan sering terjadi terutama pada masyarakat miskin karena kendala biaya (*cost barrier*). Perilaku yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat terhadap kesehatan relatif belum optimal. Isu-isu strategis dalam pembangunan bidang kesehatan diantaranya adalah:

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan;
3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan;
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;
5. Akses Pelayanan Kesehatan Belum Dioptimalkan oleh Masyarakat.

4.2.3 Manajemen Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tataran eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good governance* dan *clean government*. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah mencanangkan sasaran untuk meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan arah kebijakan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*). Salah satu nilai dari *good governance* adalah akuntabilitas, dimana pemerintah yang ada harus bertanggungjawab kepada publik dalam konteks kinerja lembaga dan aparatnya baik di bidang manajemen, organisasi maupun di bidang kebijakan publik. Dalam hal ini akuntabilitas suatu pemerintahan dapat dinilai melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 nilai BB.

Terkait dengan pelayanan birokrasi kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan pelayanan publik, baik dalam bentuk jasa maupun fasilitas hal itu merupakan salah satu tugas utama Pemerintah. Berbicara masalah pelayanan publik, berdasarkan Undang-Undang

Nomor 25 tahun 2009 dikatakan bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi :

1. Pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) UU Nomor 25 tahun 2009 meliputi:

- a. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Tugas Pemerintah yang paling dominan adalah menyediakan barang-barang publik (*public utility*) dan memberikan pelayanan (*public service*) misalnya dalam bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, perlindungan tenaga kerja, pertanian, keamanan dan sebagainya. Tidak mengherankan apabila bidang kesehatan perlu untuk selalu dibenahi agar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat. Pelayanan kesehatan yang dimaksud tentunya adalah pelayanan yang cepat, tepat, murah dan ramah.

Tidak hanya permasalahan kesehatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam mendukung pembangunan kesehatan diperlukan biaya yang besar. Guna membantu pelayanan

kesehatan diperlukan pertumbuhan ekonomi yang kaitannya dengan investasi. Atas dasar hal tersebut, dan guna menumbuhkan investasi dalam menumbuhkan perekonomian, diperlukan pelayanan publik perijinan yang baik.

Pelayanan merupakan wujud dari fungsi pemerintah sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan saat ini mendorong Pemerintah untuk segera memperbaiki kualitas pelayanannya, apalagi yang berhubungan dengan pelayanan perizinan yang dicitrakan sebagai pelayanan yang berbelit-belit, sulit diakses, memiliki prosedur yang sangat rumit serta tidak adanya kepastian waktu dan keterbukaan biaya pelayanan yang dibutuhkan. Dalam hal penyediaan pelayanan perizinan, petugas birokrasi sering kali memberikan prosedur yang sangat rumit dan cenderung berbelit-belit, jika mekanisme yang rumit terus tetap berjalan, otomatis membuat masyarakat menjadi malas dan enggan dalam mengurus perizinan.

Maka, Pemerintah perlu mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Atas dasar itulah, Pemerintah menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar dapat segera menerapkan pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang jenis kelembagaannya diserahkan kepada daerah untuk memilih jenis lembaga yang sesuai, apakah berbentuk dinas, kantor atau badan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah dalam mengelolanya. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha yang diharapkan mampu memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan. Hasilnya pelayanan perizinan lebih efektif, mudah, dan murah. Isu-isu strategis terkait dengan manajemen pemerintah daerah dan pelayanan publik meliputi:

1. Pemerintahan yang profesional, bersih, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Kualitas SDM aparatur pemerintah;
3. Peningkatan pelayanan perijinan;
4. Penataan Administrasi Kependudukan.

4.2.4 Infrastruktur

Pemerintah Indonesia melalui RPJMN Tahun 2015-2019 telah menetapkan target akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0% dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat Indonesia pada akhir tahun 2019. Selanjutnya target ini ditindaklanjuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan mencanangkan Gerakan Pemenuhan *Universal Access* 100-0-100, dan kemudian menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tulungagung. Fakta saat ini yang terjadi adalah masih ada masyarakat yang belum bisa menikmati layanan akses air bersih baik di perkotaan maupun di perdesaan, masih terdapat kawasan kumuh utamanya di wilayah perkotaan dan lingkungan permukiman yang belum disertai dengan fasilitas sanitasi yang memadai. Secara kuantitatif, kondisi *universal access* di Kab. Tulungagung hingga akhir tahun 2016 telah tercapai 85% akses air minum, 47% kawasan kumuh dan 84% akses sanitasi layak. Kondisi ini akan terus ditingkatkan untuk mencapai target 100-0-100 di akhir tahun 2019.

Rendahnya akses jalan dan penyediaan infrastruktur penunjang pada kawasan-kawasan strategis maupun lokasi yang berpotensi menjadi pembangkit pertumbuhan kawasan sekitar juga dapat menjadikan hambatan tersendiri bagi upaya pencapaian target atau sasaran urusan-urusan pembangunan lainnya. Kondisi saat ini di Kabupaten Tulungagung masih banyak akses jalan di kawasan pedesaan dan pariwisata pantai dengan kondisi kurang baik. Belum ada angkutan dengan trayek untuk wilayah kota sehingga masyarakat kota belum bisa menikmati angkutan umum sebagai sarana transportasi primer.

Kondisi alam/tanah ekspansif dan bencana alam juga mengakibatkan kerusakan jalan sepanjang tahun. Berkembangnya daerah pemukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan

mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Pada sisi lain, kapasitas infrastruktur penampung air seperti embung dan bendungan makin menurun sebagai akibat meningkatnya sedimentasi, sehingga menurunkan keandalan penyediaan air untuk irigasi maupun air baku.

Sedangkan isu strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait dengan terjadinya abrasi pantai dikarenakan pembukaan lahan baru untuk budidaya; alih fungsi lahan menjadi sarana perdagangan dan jasa; penurunan daya dukung lingkungan yang disebabkan timbulnya limbah padat, cair, dan gas dari kegiatan konstruksi maupun operasional infrastruktur dan sarana dan prasarana kesehatan; penurunan kualitas lingkungan (lahan, air dan udara); terganggunya ekosistem flora dan fauna yang ada pada lokasi kegiatan eksisting; dan semakin meningkatnya peluang terbentuknya kawasan yang kurang tertata.

Isu-isu strategis yang mendesak untuk dilaksanakan guna menanggulangi permasalahan infrastruktur diantaranya adalah:

1. Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan;
2. Peningkatan Infrastruktur Irigasi;
3. Peningkatan Infrastruktur Air Minum;
4. Peningkatan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman;
5. Peningkatan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berketahanan dalam menghadapi resiko, penanganan dan pemulihan dampak bencana serta perubahan iklim;
6. Lemahnya Daya Dukung Infrastruktur Pariwisata;
7. Drainase Belum Terbangun Dengan Baik;
8. Belum Optimalnya Ketersediaan Air dan Sanitasi.

4.2.5 Pertumbuhan Ekonomi

Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa suatu negara/daerah. Biasanya, pertumbuhan ekonomi diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), atau ukuran-ukuran pendapatan agregat lainnya. PDB/PRDB ini bisa positif dan/atau negatif. Sifatnya yang negatif yang menunjukkan terjadinya resesi ekonomi, sedangkan jika positif menunjukkan terjadinya ekspansi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi bisa menimbulkan efek

positif dan negatif. Positifnya, pertumbuhan ekonomi memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas kehidupan dan distribusi pendapatan. Negatifnya, pertumbuhan ekonomi menyebabkan munculnya konsumerisme, kerusakan lingkungan hidup, ketidakadilan ekonomi bagi sebagian besar masyarakat miskin.

Sementara itu, kata kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi adalah investasi nyata (*real investment*) yang akan melahirkan efek berantai (*multiplier effect*). Perekonomian tak boleh diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sebab, pasar bukanlah sistem yang sempurna. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban mengintervensi dengan kebijakan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.

Membentuk ruang khusus untuk kegiatan ekonomi akan lebih langsung menggerakkan kegiatan ekonomi. Pemerintah Daerah perlu berusaha mengantisipasi kawasan-kawasan mana yang dapat ditumbuhkan menjadi pusat-pusat perekonomian wilayah. Kawasan-kawasan yang strategis dan cepat tumbuh ini dapat berupa kawasan yang sudah menunjukkan tanda-tanda aglomerasi, seperti sentra-sentra produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, klaster industri, dsb. Kawasan cepat tumbuh juga dapat berupa kawasan yang sengaja dibangun untuk memanfaatkan potensi SDA yang belum diolah. Kawasan-kawasan ini perlu dikenali dan selanjutnya ditumbuhkan dengan berbagai upaya pengembangan kegiatan ekonomi, seperti pengadaan terminal agribisnis, pengerasan jalan, pelatihan bisnis, promosi dsb. Pengembangan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh ini perlu dilakukan bersamaan dengan upaya peningkatan keterampilan, pengembangan usaha, dan penguatan keberdayaan masyarakat. Isu-isu strategis guna menumbuhkan perekonomian adalah dengan :

1. Belum kondusifnya usaha mikro terhadap produktifitas;
2. Penguatan ekonomi lokal;
3. Penguatan sektor primer;
4. Disparitas Ekonomi;
5. Pengembangan komoditas unggulan;
6. Pola kemitraan dan kewirausahaan;
7. Penguatan lembaga keuangan dan koperasi;

8. Iklim investasi yang kondusif dan perluasan pasar ;
9. Belum kuatnya pondasi perekonomian pedesaan;

4.2.6 Penanggulangan kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan agenda nasional. Berbagai ikhtiar penanggulangan kemiskinan di berbagai wilayah memiliki tingkatan masalah yang beragam. Masalah-masalah utama yang sering menjadi kendala adalah adanya kecenderungan untuk menyalahkan si miskin, menempatkan mereka sebagai obyek, programnya dikelola semacam proyek, dan tidak berkelanjutan. Situasi masalah ini menghendaki penyelesaian segera, yakni dengan mengembangkan cara pandang atau pendekatan baru dalam memahami kemiskinan dan melibatkan mereka, si miskin dalam formulasi strategi penanggulangan kemiskinan. Selain masalah penanggulangan kemiskinan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) juga termasuk permasalahan serius di Kabupaten Tulungagung.

Selain itu Kabupaten Tulungagung juga mempunyai bonus demografi yang tentunya akan membawa dampak sosial ekonomi. Melimpahnya penduduk usia kerja akan menguntungkan dari sisi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, dan sebagai imbasnya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun berkah ini bisa berbalik menjadi bencana jika tidak disikapi dengan baik. Masalah yang paling nyata adalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Pemerintah harus berupaya memberikan keterampilan kepada tenaga kerja produktif sehingga pekerja tidak hanya bergantung pada ketersediaan lapangan pekerjaan tapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Kondisi saat ini dalam penanganan pada PMKS dan tenaga kerja masih belum optimal sehingga perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah karena terwujudnya kesejahteraan sosial merupakan tujuan dari pembangunan.

Isu-isu strategis terkait dengan program-program penanggulangan kemiskinan, diantaranya adalah :

1. Efektifitas program-program kemiskinan;
2. Masalah pendataan penduduk miskin;

3. Penyandang masalah kesejahteraan sosial belum tertangani secara optimal;
4. Perluasan kesempatan kerja.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi daerah 2014 – 2018 sesungguhnya merupakan inti dari keinginan atau kehendak Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2014 – 2018 dalam membangun Kabupaten Tulungagung 5 (lima) tahun yang akan datang, yang akan dicapai melalui beberapa misi daerah. Visi dan misi daerah ini berorientasi pada subjek pembangunan, yaitu (i) masyarakat, (ii) dunia usaha dan (iii) pemerintah. Bagi masyarakat, visi misi diorientasikan kepada pemberian aksesibilitas, pencapaian hasil pembangunan, pemerataan pendapatan, dan menciptakan rasa aman. Bagi dunia usaha, visi misi diorientasikan pada terciptanya jaminan dan kemudahan investasi serta kenyamanan usaha. Sedangkan bagi pemerintah sendiri, visi misi menjadi umpan balik yang dapat meningkatkan sumberdaya pembangunan khususnya keuangan daerah, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan dasar dan mampu menggali potensi sumberdaya yang dimilikinya bagi peningkatan pendapatan daerah.

5.1. Visi

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang, serta penggalan aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan, maka Visi Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2014-2018 adalah **“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Tulungagung Melalui Peningkatan Sumberdaya Manusia Yang Profesional Berdasarkan Iman dan Taqwa”**.

Pada hakekatnya Visi ini menggambarkan Kabupaten Tulungagung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya akan dicapai melalui peningkatan sumberdaya manusia yang profesional yang berpegang teguh pada iman dan taqwa.

Makna dari visi tersebut dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Visi **Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Tulungagung** adalah sebuah kondisi masyarakat yang ***ayem, tentrem, mulya lan tinoto***.

- b. Visi **Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Profesional** adalah manusia yang melaksanakan pembangunan lebih mengedepankan kualitas kinerja, dengan etos kerja yang tinggi yang bermoral dan beretika.
- c. Visi **Berdasarkan Iman dan Taqwa** adalah melandaskan setiap tindakan berdasarkan norma dan kaidah agama.

5.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan keinginan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan visi di atas maka dirumuskan Misi Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk periode 2014 – 2018, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian/pengembangan kebudayaan.
- 2) Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan yang murah dan berkualitas.
- 3) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis.
- 4) Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain.
- 5) Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis (UKM, pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata serta perkebunan) melalui kegiatan kewirusahaan.
- 6) Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu.

Misi pertama, ditujukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas sehingga terjangkau oleh seluruh masyarakat terutama usia sekolah. Selain itu juga adanya usaha untuk terus melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Misi kedua, ditujukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan di bidang kesehatan yang murah dan berkualitas.

Misi ketiga, ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis.

Misi keempat, ditujukan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain.

Misi kelima, ditujukan untuk pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis (UKM, pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata serta perkebunan) melalui kegiatan kewirausahaan.

Misi keenam, ditujukan untuk pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD mengingat tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut baik dalam jangka pendek (tahunan) maupun 5 (lima) tahunan.

Dalam rangka merealisasikan keenam misi tersebut di atas, akan dicapai melalui tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

MISI 1 Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian/pengembangan kebudayaan.

Tujuan :

1. Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan
2. Pelestarian Seni Budaya

Indikator Tujuan :

1. Indeks Pendidikan
2. Jumlah karya seni yang mendapatkan penghargaan

Sasaran :

1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat
2. Meningkatnya pengembangan seni budaya

Indikator Sasaran

1. Harapan Lama Sekolah (EYS Expected Years of Schooling)
2. Angka Rata - rata Lama Sekolah (MYS Means Years of Schooling)
3. Presentase seni budaya yang dilestarikan

MISI 2 Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan yang murah dan berkualitas

Tujuan :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Indikator Tujuan :

1. Indeks Kesehatan

Sasaran :

1. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat

Indikator Sasaran

1. Angka Harapan Hidup

MISI 3 Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis

Tujuan :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
2. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang demokratis

Indikator Tujuan :

1. Indeks Reformasi Birokasi
2. Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Pemilu

Sasaran :

1. Meningkatnya pengelolaan pemerintahan yang akuntabel
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan masyarakat
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkades
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan
5. Meningkatnya toleransi masyarakat dan kerukunan antar umat beragama

Indikator Sasaran

1. Nilai SAKIP Kabupaten
2. Opini BPK
3. Nilai Rata-Rata IKM unit pelayanan
4. Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Pemilu/Pilkades
5. Prosentase peningkatan penyelesaian pelanggaran Perda/Perbub
6. Persentase perlindungan/pemeliharaan terhadap potensi konflik SARA

MISI 4 Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain

Tujuan :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur
2. Meningkatnya pembangunan kabupaten yang berwawasan lingkungan dan berketahanan dalam menghadapi resiko, penanganan dan pemulihan dampak bencana serta perubahan iklim

Indikator Tujuan :

1. Persentase wilayah yang terkoneksi dengan baik
2. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi mantap
3. Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh
4. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)

Sasaran :

1. Meningkatnya kondisi jalan yang mantap berkeselamatan
2. Meningkatnya layanan transportasi perhubungan
3. Meningkatnya layanan irigasi
4. Meningkatnya layanan infrastruktur dasar air bersih
5. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar sanitasi

6. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup
7. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat mengurangi resiko bencana

Indikator Sasaran :

1. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik
2. Predikat Wahana Tata Nugraha (WTN)
3. Persentase luasan sawah yang terlayani air irigasi
4. Persentase penduduk perdesaan yang memiliki akses air bersih
5. Persentase penduduk yang terlayani akses sanitasi
6. Indeks Kualitas Udara
7. Indeks Kualitas Air
8. Indeks Kualitas Tutupan Lahan
9. Prosentase desa tangguh bencana di kawasan rawan bencana

MISI 5 Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UKM, pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata serta perkebunan melalui kegiatan kewirausahaan

Tujuan :

1. Mengembangkan potensi sumber daya ekonomi sesuai kompetensi Kabupaten Tulungagung yang di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan iklim investasi yang kondusif

Indikator Tujuan

1. Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran :

1. Meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi

Indikator Sasaran

1. Kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB
2. Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB
3. Kontribusi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB besar
4. Prosentase pertumbuhan omset koperasi
5. Prosentase pertumbuhan omset usaha mikro
6. Persentase peningkatan jumlah kunjungan pariwisata

MISI 6 Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu

Tujuan :

1. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan

Indikator Tujuan :

1. Tingkat Kemiskinan

Sasaran :

1. Meningkatnya penduduk yang bekerja
2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Indikator sasaran :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2. Persentase Penurunan PMKS
3. Prosentase kasus kekerasan anak yang tertangani
4. Indeks Pembangunan Gender

Tabel V.1
KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN
REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2014-2018
KABUPATEN TULUNGAGUNG

VISI : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Tulungagung Melalui Peningkatan Sumberdaya Manusia Yang Profesional Berdasarkan Iman dan Taqwa

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PERANGKAT DAERAH	TARGET CAPAIAN				
			KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR				2014	2015	2016	2017	2018
			2016	2018								
Misi 1 : Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian/pengembangan kebudayaan	Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan	Indeks Pendidikan	0,62	0,62	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat	Harapan Lama Sekolah (EYS Expected Years of Schooling)	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	12,72	12,73	13,03	13,10	13,17
						Angka Rata - rata Lama Sekolah (MYS Means Years of Schooling)	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	7,45	7,72	7,73	7,76	7,79
	Pelestarian seni budaya	Jumlah karya seni yang mendapatkan penghargaan	4	3	Meningkatnya pengembangan seni budaya	Presentase seni budaya yang dilestarikan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100	100	100	100	100
Misi 2 : Peningkatan Pelayanan di Bidang Kesehatan yang Murah dan Berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,82	0,82	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Dinas Kesehatan	72,88	73,28	73,40	73,46	73,52
MISI 3 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	-	61	Meningkatnya pengelolaan pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten	Bagian Organisasi	52,90	62,42	70,03	71	72
						Opini BPK	Inspektorat, BPKAD	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PERANGKAT DAERAH	TARGET CAPAIAN				
			KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR				2014	2015	2016	2017	2018
			2016	2018								
baik, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis					Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat	Nilai Rata-rata indek kepuasan masyarakat unit pelayanan	Dinas Kesehatan, DPMPSTP, Dispendukcapil, Kecamatan	-	74,79	75,23	77,82	79,61
	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang demokratis	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu	0	67%	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkades	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu /pilkades	Bagian Adm. Pemerintahan	74,02	82	0	85	61
					Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan	Prosentase peningkatan penyelesaian pelanggaran Perda / Perbub	Satpol PP	1%	1%	1%	2%	2%
					Meningkatnya toleransi masyarakat dan kerukunan antar umat beragama	Prosentase perlindungan/ pemeliharaan terhadap potensi konflik SARA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	85	85	90	95	95
Misi 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Presentase wilayah yang terkoneksi dengan baik	77,86	80,07	Meningkatnya kondisi jalan yang mantap berkeselamatan	Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik (km)	Dinas PUPR	60	66	70	77	82
					Meningkatnya layanan transportasi perhubungan	Predikat wahana Tata Nugraha (WTN)	Dinas Perhubungan	WTN	WTN	WTN	-	WTN
					Prosentase Jaringan Irigasi dalam kondisi mantap	Meningkatnya layanan irigasi	Prosentase luasan sawah yang terlayani air irigasi	Dinas PKP SDA	55	57	59	61

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PERANGKAT DAERAH	TARGET CAPAIAN				
			KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR				2014	2015	2016	2017	2018
			2016	2018								
yang ram		Persentase Pengurangan luasan kawasan kumuh	47	20	Meningkatkan layanan infrastruktur dasar air bersih	Prosentase penduduk pedesaan yang memiliki akses air bersih	Dinas PUPR	78	81	85	90	95
					Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar sanitasi	Prosentase penduduk yang terlayani akses sanitasi	Dinas PUPR	81	82	84	87	87
	Meningkatnya pembangunan kabupaten yang berwawasan lingkungan dan berketahanan dalam menghadapi resiko, penanganan dan pemulihan dampak bencana serta perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,33	72	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks kualitas Udara	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	87,74	87,80	88,00
						Indeks Kualitas Air	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	48,10	48,50	48,70
						Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	76,45	76,55	77,50
					Meningkatnya kesiap-siagaan masyarakat mengurangi resiko bencana	Prosentase desa tangguh bencana di kawasan rawan bencana	BPBD	2,1	2,8	3,5	4,2	4,9
Misi 5 : Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UKM, pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata serta	Mengembangkan potensi sumber daya ekonomi sesuai kompetensi Kabupaten Tulungagung di	Pertumbuhan Ekonomi	5,02	5,08	Meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi	Kontribusi Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan	22,34	22,37	21,86	21,91	21,96

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PERANGKAT DAERAH	TARGET CAPAIAN				
			KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR				2014	2015	2016	2017	2018
			2016	2018								
perkebunan melalui kegiatan kewirausahaan	dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan iklim investasi yang kondusif					Kontribusi Lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20,49	20,67	20,84	20,89	20,93
						Kontribusi Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran., reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB besar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	19,83	19,85	20,10	20,13	20,15
						Prosentase pertumbuhan omset Koperasi	Dinkop dan Usaha Mikro	11,3	15,30	9,80	10	10
						Prosentase pertumbuhan Omset Usaha Mikro	Dinkop dan Usaha Mikro	8,26	9,00	6,00	7	7
						Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8,10	-1,79	26,05	20	25
Misi 6 : Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu	Meningkatkannya keberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	8,23	8,05	Meningkatnya penduduk yang bekerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2,42	3,95	3,85	3,85	3,84
					Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Prosentase Penurunan PMKS	Dinas Sosial, KB, PPPA	-	-	0,97	1,4	2,5
					Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan	Prosentase kasus kekerasan anak yang tertangani	Dinas Sosial, KB, PPPA	100	100	100	100	100

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PERANGKAT DAERAH	TARGET CAPAIAN				
			KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR				2014	2015	2016	2017	2018
			2016	2018								
					anak	Indeks Pembangunan Gender	Dinas Sosial, KB, PPPA	95,11	95,07	95,07	95,07	95,07

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa strategi adalah langkah – langkah yang berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Selanjutnya program dimaksud adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran dan kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Strategi atau cara untuk mencapai sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan, karena strategi telah menetapkan cara untuk merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan. Cara tersebut merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya dalam rangka mencapai sasaran untuk mewujudkan visi dan misi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan indikasi kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Tulungagung mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Atas dasar arti dan makna strategi tersebut, maka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung untuk 5 (lima) tahun ke depan dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018. Strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 dirumuskan sebagai berikut :

6.1 Peningkatan Pelayanan Pendidikan yang Murah dan Berkualitas serta Pelestarian/Pengembangan Kebudayaan

Strategi pokok dalam peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian/pengembangan kebudayaan ini ditujukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas sehingga terjangkau oleh seluruh masyarakat terutama usia sekolah. Selain itu juga adanya usaha untuk terus melestarikan dan

mengembangkan kebudayaan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Strategi tersebut meliputi:

1. Pemerataan dan perluasan akses dan mutu pendidikan dasar
2. Peningkatan bantuan pembiayaan bagi anak berprestasi dari keluarga miskin
3. Peningkatan kualitas pendidikan pra sekolah dan dasar
4. Peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan
5. Meningkatkan dan mengembangkan prestasi olah raga, kebugaran dan kesegaran jasmani masyarakat dengan dukungan upaya pemasyarakatan olahraga yang memadai
6. Peningkatan layanan pendidikan
7. Peningkatan penyediaan kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan dan fasilitas umum pada sektor pendidikan
8. Peningkatan jumlah aktivitas pengelolaan pengembangan seni budaya

Sedangkan arah kebijakan yang diambil meliputi:

1. Peningkatan dan pengembangan pendidikan dasar untuk menurunkan angka putus sekolah dan melek huruf
2. Pengembangan lembaga pendidikan usia dini
3. Peningkatan pembiayaan yang mendukung proses belajar mengajar anak dari keluarga tidak mampu
4. Pemberian bantuan operasional, sarana dan prasarana pendidikan pra sekolah, serta bantuan operasional pendidikan dasar
5. Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan
6. Peningkatan kegiatan olahraga bagi masyarakat
7. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
8. Peningkatan kualitas, kuantitas fasilitas pendidikan dan pengembangan pelayanan perpustakaan
9. Peningkatan jumlah aktivitas seni budaya

6.2 Peningkatan Pelayanan di Bidang Kesehatan yang Murah dan Berkualitas

Strategi pokok dalam peningkatan pelayanan di bidang kesehatan yang murah dan berkualitas ini ditujukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas sehingga terjangkau oleh seluruh masyarakat. Strategi tersebut meliputi:

1. Peningkatan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau.

Sedangkan arah kebijakan yang diambil meliputi:

1. Meningkatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, curatif, rehabilitatif dan pengembangan regulasi bidang kesehatan

6.3 Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Baik, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Demokratis

Strategi pokok dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan ini adalah peningkatan kapasitas lembaga pemerintah daerah melalui penataan struktur organisasi penyelenggaraan pemerintahan hingga tingkat kelurahan/desa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis. Strategi tersebut meliputi:

1. Pemantapan manajemen kinerja
2. Peningkatan kapasitas aparatur dan manajemen pemerintahan
3. Peningkatan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan
4. Pelimpahan wewenang pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik
5. Peningkatan tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
6. Penyediaan Pelayanan publik yang prima
7. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas IPTEK dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan
8. Peningkatan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan meningkatkan wawasan kebangsaan

9. Menciptakan iklim kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta memenuhi hak-hak asasi manusia
10. Meningkatkan komunikasi yang harmonis antar tokoh-tokoh keagamaan dan meningkatkan kerjasama lintas agama

Sedangkan arah kebijakan yang diambil meliputi:

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
2. Pembinaan peningkatan kompetensi SDM aparatur
3. Perencanaan dan Pengembangan PNS
4. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan
5. Meningkatkan upaya pendataan dan pengelolaan keuangan serta aset daerah
6. Pelimpahan wewenang pelaksanaan pembangunan pada kecamatan dan kelurahan
7. Mewujudkan tertib administratif pelayanan publik
8. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pelayanan publik
9. Mengembangkan Inovasi Pelayanan Publik
10. Menyediakan sistem teknologi informasi pelayanan publik
11. Meningkatkan upaya validasi data kependudukan
12. Pemberdayaan dan fasilitasi peran masyarakat dalam politik
13. Peningkatan penyuluhan peraturan / hukum kepada masyarakat
14. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk patuh dan disiplin terhadap hukum
15. Peningkatan kepedulian masyarakat untuk mencegah penggunaan narkoba
16. Meningkatkan profesionalisme aparat Satpol PP melalui pembinaan kinerja dengan meningkatkan sumber daya organisasi dan manajemen serta pemantapan struktur Satpol PP
17. Mewujudkan pemberdayaan potensi perlindungan masyarakat (Linmas) dalam mendukung penanggulangan bencana dan penanganan gangguan trantibum lainnya dalam masyarakat
18. Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan terutama melalui deteksi dini dan keterlibatan para tokoh masyarakat
19. Meningkatkan toleransi dan kerukunan masyarakat dalam kehidupan agama

20. Meningkatkan peran forum komunikasi antar umat beragama

6.4 Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berbasis Pemerataan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah Untuk Mendorong Percepatan Pembangunan Sektor-Sektor Yang Lain

Strategi pokok dalam peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain. Strategi tersebut meliputi :

1. peningkatan efisiensi dan efektifitas pembangunan jalan dan jembatan
2. Mewujudkan keterpaduan pelayanan sarana dan prasarana transportasi, serta keterpaduan intra dan antar moda
3. Menyediakan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar air bersih
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar sanitasi
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
7. Peningkatan penanganan bencana secara terpadu dan menyeluruh

Sedangkan arah kebijakan yang diambil meliputi:

1. Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan dan membangun sistim jaringan jalan yang mendukung kawasan strategis potensial;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan jalan, sarana dan fasilitas perhubungan
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perhubungan
4. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan air baku
5. Meningkatkan layanan penyediaan insfrastruktur dasar air bersih
6. Meningkatkan layanan penyediaan insfrastruktur dasar sanitasi
7. Mengembangkan kawasan berwawasan lingkungan
8. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bencana

6.5 Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis UKM, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Dan Pariwisata Serta Perkebunan Melalui Kegiatan Kewirusahaan.

Strategi pokok dalam Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis (UKM, pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata serta perkebunan) melalui kegiatan kewirusahaan. Strategi tersebut meliputi:

1. Meningkatkan kontribusi lapangan usaha pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor melalui kualitas SDM, penyediaan sarana prasarana produksi dan penerapan teknologi
2. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan penyediaan sarana pendukung sektor pariwisata

Sedangkan arah kebijakan yang diambil meliputi:

1. Mewujudkan penguatan kontribusi sektor sekunder dan tersier yang didukung oleh pendukung produktifitas sektor primer
2. Menciptakan kawasan pariwisata yang didukung oleh keterkaitan antar sektor unggulan

6.6 Pengentasan Dan Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pola Terpadu

Strategi pokok dalam pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu, meliputi:

1. Peningkatan upaya perlindungan tenaga kerja dan keselamatan kerja terutama bagi pekerja perempuan
2. Peningkatan keberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan pro rakyat
3. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan
4. Peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan

Sedangkan arah kebijakan yang diambil meliputi:

1. Melakukan upaya koordinasi dengan dunia usaha dalam perlindungan dan keselamatan tenaga kerja

2. Pemantapan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan orientasi peningkatan aksesibilitas penduduk miskin terhadap sumber daya produktif
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan anti kekerasan terhadap anak dan perempuan
4. Pemantapan kebijakan PUG dengan orientasi peningkatkan kualitas hidup perempuan

Tabel VI.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah dan Kebijakan
Kabupaten Tulungagung

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	MISI I :	Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian/pengembangan kebudayaan				
1	Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan	Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat	Harapan Lama Sekolah (EYS Expected Years of Schooling)}	Pemerataan dan perluasan akses dan mutu pendidikan dasar	Peningkatan dan pengembangan pendidikan dasar untuk menurunkan angka putus sekolah dan melek huruf
					Peningkatan bantuan pembiayaan bagi anak berprestasi dari keluarga miskin	Peningkatan pembiayaan yang mendukung proses belajar mengajar anak dari keluarga tidak mampu
					Peningkatan kualitas pendidikan pra sekolah dan dasar	Pemberian bantuan operasional, sarana dan prasarana pendidikan pra sekolah, serta bantuan operasional pendidikan dasar
					Peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan	Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan
					Meningkatkan dan mengembangkan prestasi olah raga, kebugaran dan kesegaran jasmani masyarakat dengan dukungan upaya pemasyarakatan olahraga yang memadai	Peningkatan kegiatan olahraga bagi masyarakat
				Rata-rata Lama Sekolah {Angka Rata - rata Lama Sekolah (MYS Means Years of Schooling)}	Peningkatan layanan pendidikan	Peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
					Peningkatan penyediaan kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan dan fasilitas umum pada sektor pendidikan	Peningkatan kualitas, kuantitas fasilitas pendidikan dan pengembangan pelayanan perpustakaan
2	Pelestarian seni budaya	Jumlah karya seni yang mendapatkan penghargaan	Meningkatnya pengembangan seni budaya	Persentase seni budaya yang dilestarikan	Peningkatan jumlah aktivitas pengembangan seni budaya	Peningkatan jumlah aktivitas seni budaya
	MISI II :	Peningkatan Pelayanan di Bidang Kesehatan yang Murah dan Berkualitas				
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Peningkatan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau	Meningkatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, curatif, rehabilitatif dan pengembangan regulasi bidang kesehatan
	MISI III :	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis				
1	Terwujudnya Tata Kelola	Indeks Reformasi	Meningkatnya pengelolaan	Nilai SAKIP Kabupaten	Pemantapan manajemen kinerja	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Pemerintahan yang Baik	Birokrasi	pemerintahan yang akuntabel		Peningkatan kapasitas aparatur dan manajemen pemerintahan	Pembinaan peningkatan kompetensi SDM aparatur Perencanaan dan Pengembangan PNS
				Opini BPK	Peningkatan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan Meningkatkan upaya pendataan dan pengelolaan keuangan serta aset daerah
					Peningkatan tertib administrasi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Mewujudkan tertib administrasi pelayanan publik
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat unit pelayanan	Penyediaan Pelayanan publik yang prima Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas IPTEK dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan	Meningkatkan efesiensi dan efektifitas Pelayanan Publik Menyediakan sistem teknologi informasi pelayanan publik Meningkatkan upaya validasi data kependudukan
2	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang demokratis	Presentase masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu / pilkades	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu	Peningkatan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan meningkatkan wawasan kebangsaan	Pemberdayaan dan fasilitasi peran masyarakat dalam politik
		Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan	Prosentase peningkatan penyelesaian pelanggaran Perda / Perbub	Menciptakan iklim kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta memenuhi hak-hak asasi manusia	Peningkatan penyuluhan peraturan / hukum kepada masyarakat Peningkatan kesadaran masyarakat untuk patuh dan disiplin terhadap hukum Meningkatkan profesionalisme aparat Satpol PP melalui pembinaan kinerja dengan meningkatkan sumber daya organisasi dan manajemen serta pematapan struktur Satpol PP Mewujudkan pemberdayaan potensi perlindungan masyarakat (Linmas) dalam mendukung penanggulangan bencana dan penanganan gangguan trantibum lainnya dalam masyarakat	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
						Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan terutama melalui deteksi dini dan keterlibatan para tokoh masyarakat
			Meningkatnya toleransi masyarakat dan kerukunan antar umat beragama	Prosentase perlindungan/ pemeliharaan terhadap potensi konflik SARA yang ditangani	Meningkatkan komunikasi yang harmonis antar tokoh-tokoh keagamaan dan meningkatkan kerjasama lintas agama	Meningkatkan toleransi dan kerukunan masyarakat dalam kehidupan agama Meningkatkan peran forum komunikasi antar umat beragama
	MISI IV :		Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain			
	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase wilayah yang terkoneksi dengan baik	Meningkatnya kondisi jalan yang mantap berkeselamatan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (km)	Peningkatan efisiensi dan efektifitas pembangunan jalan dan jembatan	Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan dan membangun sistem jaringan jalan yang mendukung kawasan strategi potensial
			Meningkatnya layanan transportasi perhubungan	Predikat Wahana Tata Nugraha (WTN)	Mewujudkan keterpaduan pelayanan sarana dan prasarana transportasi, serta keterpaduan intra dan antar moda	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan jalan, sarana dan fasilitas <u>perhubungan</u> Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana perhubungan
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi mantap	Meningkatnya layanan irigasi	Persentase luasan sawah yang terlayani air irigasi	Menyediakan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air	Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan air baku
		Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh	Meningkatnya layanan infrastruktur <u>dasar air bersih</u>	persentase penduduk pedesaan yang memiliki akses air bersih	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar air bersih	Meningkatkan layanan penyediaan infrastruktur dasar air bersih
			Meningkatnya penyediaan Insfratraktur <u>dasar sanitasi</u>	persentase penduduk yang terlayani akses sanitasi	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar sanitasi	Meningkatkan layanan penyediaan infrastruktur dasar sanitasi
	Meningkatnya pembangunan kabupaten yang berwawasan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Air	peningkatan nilai kualitas lingkungan hidup	Mengembangkan kawasan yang berwawasan lingkungan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	lingkungan dan berketahanan dalam menghadapi resiko penanganan dan pemulihan dampak bencana serta perubahan iklim		Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat mengurangi resiko bencana	Indeks Kualitas Tutupan Lahan Persentase desa tangguh bencana dikawasan rawan bencana	Peningkatan penanganan bencana secara terpadu dan menyeluruh	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bencana
MISI V : Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UKM, Pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata serta perkebunan melalui kegiatan						
	Mengembangkan potensi sumber daya ekonomi sesuai kompetensi Kabupaten Tulungagung yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan iklim investasi yang kondusif	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi	Kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB Kontribusi lapangan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB besar Prosentase pertumbuhan omset Koperasi Prosentase pertumbuhan Omset Usaha Mikro	Meningkatkan kontribusi lapangan usaha pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor melalui peningkatan kualitas SDM, penyediaan sarana prasarana produksi dan penerapan teknologi	Mewujudkan penguatan kontribusi sektor sekunder dan tersier yang didukung oleh peningkatan produktifitas sektor primer
				Persentase Peningkatan jumlah kunjungan wisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan menyediakan sarana pendukung sektor pariwisata	Menciptakan kawasan pariwisata yang didukung oleh keterkaitan antar sektor unggulan
MISI VI Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu						
1	Meningkatkatnya keberdayaan masyarakat dalam	Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya penduduk yang bekerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Peningkatan upaya perlindungan tenaga kerja dan keselamatan kerja terutama bagi pekerja perempuan	Melakukan upaya koordinasi dengan dunia usaha dalam perlindungan dan keselamatan tenaga kerja

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	penanggulangan kemiskinan		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penurunan PMKS	Peningkatan keberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan & pro rakyat	Pemantapan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan orientasi peningkatan aksesibilitas penduduk miskin terhadap sumber daya produktif
			Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Prosentase kasus kekerasan anak yang tertangani Indeks Pembangunan Gender	Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan Peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan anti kekerasan terhadap anak dan perempuan Pemantapan kebijakan PUG dengan orientasi peningkatan kualitas hidup perempuan

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja sasaran. Kebijakan umum ini menjadi acuan bagi penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah dengan memperhatikan pada strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan. Program-program yang tercantum dalam RPJMD ini merupakan program pendukung langsung dalam pencapaian kinerja makro, sedangkan program yang tidak mendukung langsung akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahunan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Adapun target program yang dijabarkan mengacu pada pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDG's)*, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan target-target lain yang menjadi target wajib setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Target-target yang telah ditetapkan dalam MDG's dan SPM menjadi dasar pengukuran kinerja terkait beberapa urusan, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kependudukan dan catatan sipil.

7.1. Kebijakan Umum

Kebijakan umum RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata.
2. Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau.
3. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntable, responsif dan demokratis
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain
5. Pengembangan dan penguatan ekonomi Kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan.

6. Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah.
7. Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Tulungagung.
8. Sinergi dan harmonisasi pembangunan kewilayahan Kabupaten Tulungagung melalui pemantapan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup.

Pelaksanaan kebijakan umum ini dilakukan melalui beberapa tahapan secara sistematis, yaitu (i) Tahap Inisiasi dan Restrukturisasi, (ii) Tahap Akselerasi dan Penguatan dan (iii) Tahap Pengembangan, dimana kesemuanya itu akan disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika yang ada.

A. Tahap Inisiasi dan Restrukturisasi

Tahap pertama dari pembangunan Kabupaten Tulungagung dimulai dari tahapan inisiasidan restrukturisasi dilaksanakan selama satu tahun sejak ditetapkannya Bupati dan Wakil Bupati terpilih (2013-2014) yang diprioritaskan pada: (1) Pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, (2) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah, (3) Penguatan sarana dan prasarana dasar, (4) Membangun *link-match* dunia usaha dan dunia pendidikan, (5) Kebijakan tata ruang.

B. Tahap Akselerasi dan Penguatan

Tahap kedua merupakan kelanjutan dari tahap pertama sebagai tahapan akselerasi dan penguatan fondasi yang sudah ada. Tahap kedua ini diprioritaskan pada: (1) Perkuatan kualitas pelayanan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, infrastruktur), (2) Pemenuhan layanan dasar berbasis paritispasi dunia usaha/pengembang, serta (3) Konsolidasi ruang dan iklim usaha.

C. Tahap Pengembangan

Tahap terakhir dari perencanaan pembangunan Kabupaten Tulungagung adalah merupakan tahap pengembangan. Pada tahap ini fokus pembangunan diarahkan pada: (1) Mempertahankan kualitas layanan dasar, (2) Memelihara stabilitas ekonomi, keamanan, sosial politik dan iklim usaha, (3) Terwujudnya daya saing yang handal, dan (4) Meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan layanan.

7.2. Program Prioritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

MISI I. Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian/pengembangan kebudayaan

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Kebijakan pada urusan pendidikan secara umum diarahkan pada upaya peningkatan dan pengembangan pendidikan dasar, menengah dan non formal, peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, penyediaan media pendidikan yang informatif dan pemberian bantuan operasional, sarana dan prasarana, serta pembiayaan yang mendukung proses belajar mengajar. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut :

1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pembinaan SD
5. Program Pembinaan SMP

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga

Kebijakan pada urusan pemuda dan olahraga secara umum diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan dan budaya. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan

Kebijakan pada urusan kebudayaan secara umum diarahkan pada upaya pengembangan kebudayaan melalui peran aktif masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai budaya bangsa. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Nilai Budaya dan Kesenian
2. Program Pengelolaan Sejarah dan Purbakala

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Perpustakaan

Kebijakan pada urusan perpustakaan secara umum diarahkan pada upaya peningkatan kualitas, kuantitas fasilitas pendidikan dan pengembangan pelayanan perpustakaan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Perpustakaan

Penunjang Urusan Pemerintahan Kesekretariatan Daerah

1. Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administratif Bidang Kesejahteraan Masyarakat

MISI II. Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan yang murah dan berkualitas

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Kebijakan pada urusan kesehatan secara umum diarahkan pada upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pengembangan layanan kesehatan, pemerataan akses untuk masyarakat kurang mampu, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan, dan peningkatan perlindungan dan pelayanan kesehatan dan pengembangan regulasi bidang kesehatan, meningkatnya usia harapan hidup, menurunkan angka bayi gizi buruk, pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi balita dan ibu melahirkan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
2. Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Kesehatan
3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
4. Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Kesehatan
5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
8. Program Peningkatan Penunjang Pelayanan Kesehatan Rujukan

9. Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Surveillance Epidemiologi
10. Program Pengendalian Pelayanan Kesehatan Rujukan

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kebijakan pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara umum diarahkan pada pengembangan pelayanan pada peserta akseptor KB dan Pasangan Usia Subur dan peningkatan mutu petugas penyuluh keluarga berencana. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

MISI III. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis

Penunjang Urusan Pemerintahan Kesekretariatan Daerah

Kebijakan pada urusan Kesekretariatan Daerah secara umum diarahkan pada pemantapan organisasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan ketatalaksanaannya, pembinaan peningkatan kompetensi SDM aparatur, perencanaan dan pengembangan PNS, pengembangan Sistem Informasi Manajemen PNS, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, pelimpahan wewenang pelaksanaan pembangunan pada kecamatan dan kelurahan, mewujudkan tertib administratif pelayanan publik, peningkatan penyuluhan peraturan / hukum kepada masyarakat, serta peningkatan kepedulian masyarakat untuk mencegah penggunaan narkoba. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Bidang Hukum
2. Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Bidang Kelembagaan, Peningkatan Kinerja, Tata Laksana dan Pelayanan Publik
3. Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administratif Bidang Pemerintahan

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kearsipan

Kebijakan pada urusan kearsipan secara umum diarahkan pada upaya penyelamatan dan pemeliharaan dokumen-dokumen penting daerah. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Kebijakan pada urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian secara umum diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas aparatur dan manajemen pemerintahan, yang dijabarkan dalam program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kopetensi dan Penilaian Kinerja Kepegawaian

Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan

Kebijakan pada urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan secara umum diarahkan pada upaya peningkatan pendataan dan pengelolaan keuangan serta aset daerah, yang dijabarkan dalam program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
3. Program Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
4. Program Pengamanan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Pengawasan Keuangan

Kebijakan pada urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pengawasan Keuangan secara umum diarahkan pada upaya peningkatan sistem pendataan dan pengelolaan keuangan serta aset daerah, yang dijabarkan dalam program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kebijakan pada urusan pemberdayaan masyarakat desa, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
2. Program Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
3. Program Partisipasi dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kebijakan pada urusan pemberdayaan masyarakat desa, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal

Kebijakan pada urusan penanaman modal dijabarkan dalam program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Penguatan Kapasitas Data dan Layanan Informasi

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

Kebijakan pada urusan Komunikasi dan Informatika secara umum diarahkan pada upaya penyediaan sistem teknologi informasi pelayanan publik, yang akan dijabarkan dalam program prioritas yaitu :

1. Program Peningkatan Penyelenggaraan E Government
2. Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Penggunaan Media Massa / Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Statistik

1. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian

1. Program Tata Kelola, Pengawasan dan Pengamanan Persandian

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Kebijakan pada urusan kependudukan dan catatan sipil secara umum diarahkan pada upaya peningkatan validasi data kependudukan, yang dijabarkan dalam program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Program Pelayanan Pencatatan Sipil
3. Program Penataan Administrasi kependudukan

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kebijakan pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat secara umum diarahkan pada upaya pemberdayaan dan fasilitasi peran masyarakat dalam politik, peningkatan kesadaran masyarakat untuk patuh dan disiplin terhadap hukum, peningkatan kerjasama dengan kepolisian, deteksi dini dan keterlibatan tokoh masyarakat dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban, peningkatan profesionalisme aparat satpol PP, dan mewujudkan pemberdayaan potensi perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program strategis sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
3. Program Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati
4. Program Peningkatan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat

Urusan Pemerintahan Umum

1. Program Peningkatan Hubungan Antar Lembaga
2. Program Peningkatan Integrasi Bangsa

MISI IV. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain.

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kebijakan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang secara umum diarahkan pada upaya meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan serta pemeliharannya secara berkala, pendayagunaan sumber daya air untuk irigasi dan layanan penyediaan air bersih, mengarahkan prioritas pembangunan sesuai dengan prioritas rencana tata ruang dan mengembangkan kawasan berwawasan lingkungan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Kebinamargaan
2. Program Keciptakarya
3. Program Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
4. Program Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Perhubungan

Kebijakan pada urusan perhubungan secara umum diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan jalan, sarana dan fasilitas perhubungan, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana halte. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Lalu lintas Jalan
2. Program Prasarana Perhubungan
3. Program Angkutan dan Sarana Perhubungan
4. Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pelayanan Perparkiran

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

Kebijakan pada urusan lingkungan hidup secara umum diarahkan pada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sampah, peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan, dan mengembangkan kawasan berwawasan lingkungan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
2. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

4. Program Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2. Program Kedaruratan dan Logistik
3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

MISI V. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UKM, pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata serta perkebunan melalui kegiatan kewirausahaan

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kebijakan pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah secara umum diarahkan pada upaya pengembangan UMKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing, sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah atau masyarakat miskin. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
3. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
4. Program Pengawasan dan Pengendalian Koperasi

Urusan Pemerintahan Pilihan Pertanian

Kebijakan pada urusan pertanian secara umum diarahkan pada upaya menciptakan pusat pengembangan kawasan ekonomi baru yang berorientasi pada sektor primer, pengamanan ketahanan pangan dengan jalan mempertahankan tingkat produksi dan meningkatkan ketersediaan pangan, dan pemberian stimulan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Teknologi Pertanian

2. Program Pengembangan SDM Pertanian
3. Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultural
4. Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan
5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
6. Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
7. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan
8. Program Peningkatan Keamanan Produk Asal Hewan
9. Program Peningkatan Produksi Pertanian

Urusan Pemerintahan Pilihan Perikanan

Kebijakan pada urusan kelautan dan perikanan secara umum diarahkan pada upaya pengamanan ketahanan pangan dengan jalan mempertahankan tingkat produksi dan meningkatkan ketersediaan pangan khususnya hasil perikanan, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Budidaya
2. Program Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Perikanan

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan

Kebijakan pada urusan ketahanan pangan secara umum diarahkan pada upaya pengamanan ketahanan pangan dengan jalan mempertahankan tingkat produksi dan meningkatkan ketersediaan pangan, yang dijabarkan dalam program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2. Program Pembangunan Infrastruktur Pangan

Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian

Kebijakan pada urusan perindustrian secara umum diarahkan pada upaya peningkatan nilai tambah industri kecil, mikro dan menengah, yang dijabarkan dalam program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

Urusan Pemerintahan Pilihan Perdagangan

Kebijakan pada urusan perdagangan secara umum diarahkan pada upaya membenahan tata kelola dan infrastruktur pasar, peningkatan nilai tambah produksi industri kecil, mikro, menengah dan penciptaan kawasan ekonomi terpadu, dan meningkatkan nilai tambah produk melalui peningkatan kualitas SDM, aspek teknologi dan faktor pendukung daya saing produk lainnya. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas Perdagangan
2. Program Pengelolaan Pasar

Urusan Pemerintahan Pilihan Pariwisata

Kebijakan pada urusan pariwisata dijabarkan dalam program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Destinasi Wisata
2. Program Pengembangan Kemitraan
3. Program Pengembangan Pa riwisata

MISI VI. Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

Kebijakan pada urusan Sosial secara umum diarahkan pada upaya peningkatan cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, peningkatan taraf hidup masyarakat terutama yang berkebutuhan khusus, peningkatan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peningkatan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dijabarkan dalam program prioritas yang bersifat strategis sebagai berikut

1. Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Urusan Pemerintahan Non Wajib Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebijakan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara umum diarahkan pada upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan anti kekerasan terhadap anak dan perempuan, dijabarkan

dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Ketenagakerjaan

Kebijakan pada urusan ketenagakerjaan secara umum diarahkan pada upaya koordinasi dengan dunia usaha dalam perlindungan dan keselamatan tenaga kerja. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

1. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
2. Program Peningkatan Hubungan Industrial, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja

Tabel VII.1
Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan
Kabupaten Tulungagung
TAHUN 2018

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	PD	KETE-RANGAN
MISI I : Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian/pengembangan kebudayaan									
Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah (EYS Expected Years of Schooling)	Pemerataan dan perluasan akses dan mutu pendidikan dasar	Peningkatan dan pengembangan pendidikan dasar untuk menurunkan angka putus sekolah dan melek huruf	Program Pembinaan SD	Rasio murid per kelas tk. SD/MI	01:30	01:28	DIKPORA	
					Angka Putus sekolah SD/MI	0,02%	0,01%	DIKPORA	
					APK /SD/MI, Paket /A	103,91%	100%	DIKPORA	
					Persentase Lulusan SD melanjutkan ke SMP / MTS	99,80%	99,85%	DIKPORA	
				Program Pembinaan SMP	Rasio Murid per Kelas tk SMP/MTs	01:30	01:32	DIKPORA	
					Angka Putus Sekolah SMP/MTS	0,59%	0,21%	DIKPORA	
					Persentase Lulusan SMP melanjutkan ke SMA / MA	78,40%	99,65%	DIKPORA	
					APK /SMP/MTs/ Paket B	97,62%	99,00%	DIKPORA	
		Peningkatan bantuan pembiayaan bagi anak berprestasi dari keluarga miskin	Peningkatan pembiayaan yang mendukung proses belajar mengajar anak dari keluarga tidak mampu	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Siswa jenjang SD dan SMP Negeri yang memiliki akses pada program pendidikan gratis	0%	100%	DIKPORA	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	PD	KETE-RANGAN
				Program Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif bidang kesejahteraan masyarakat	Persentase peningkatan siswa penerima bea siswa dalam rangka mendukung proses belajar siswa di Kabupaten Tulungagung	62,70%	63%	KESRA	
		Peningkatan kualitas pendidikan pra sekolah dan dasar	Pemberian bantuan operasional, sarana dan prasarana pendidikan pra sekolah, serta bantuan operasional pendidikan dasar	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Persentase Peningkatan siswa penerima beasiswa dalam rangka mendukung proses belajar siswa di Kabupaten Tulungagung	62,70%	65%	DIKPORA	
					Persentase Ruang Kelas PAUD Baik	63%	70%	DIKPORA	
					Rasio Siswa PAUD Per Kelas	01:19	01:19	DIKPORA	
					Persentase PAUD yang Menerima Bantuan Operasional	30%	98%	DIKPORA	
					Persentase Pendidikan yang dibina	60%	75%	DIKPORA	
				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Siswa jenjang SD dan SMP Negeri yang memiliki akses pada program pendidikan gratis	2%	100%	DIKPORA	
		Peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan	Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Persentase organisasi kepemudaan yang berprestasi	2%	50%	DIKPORA	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	PD	KETE-RANGAN
		Meningkatkan dan mengembangkan prestasi olah raga, kebugaran dan kesegaran jasmani masyarakat dengan dukungan upaya pemasyarakatan olahraga yang memadai	Peningkatan kegiatan olahraga bagi masyarakat	Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	Persentase organisasi olah raga yang berprestasi	25%	55%	DIKPORA	
	Rata-rata Lama Sekolah {Angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS Means Years of Schooling)}	Peningkatan layanan pendidikan	Peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru SD berkualifikasi S1	66%	98%	DIKPORA	
					Persentase guru SD berkualifikasi S2	0,07%	2%	DIKPORA	
					Persentase guru SMP berkualifikasi S1	88%	100%	DIKPORA	
					Persentase guru SMP berkualifikasi S2	3,60%	20%	DIKPORA	
					Persentase Guru SD memiliki sertifikat sesuai dengan kompetensi	77%	85%	DIKPORA	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	PD	KETERANGAN
		Peningkatan penyediaan kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan dan fasilitas umum pada sektor pendidikan	Peningkatan kualitas, kuantitas fasilitas pendidikan dan pengembangan pelayanan perpustakaan	Program Pembinaan SD	Persentase Ruang Kelas Baik tingkat SD	68,83%	80%	DIKPORA	
				Program Pembinaan SMP	Persentase Ruang Kelas Baik tingkat SMP	86,70%	87,45%	DIKPORA	
				Program Peningkatan Kualitas Perpustakaan	Persentase peningkatan sarana prasarana perpustakaan	40%	83%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
					Persentase penerapan sistem e-Library	0%	5%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
					Persentase perpustakaan kecamatan yang dibina	10%	100%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
					Persentase perpustakaan desa yang dibina	10%	14%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
					Persentase taman bacaan yang dibina	10%	60%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
					Persentase perpustakaan Sekolah yang dibina	29%	60%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
Meningkatnya pengembangan budaya seni	Presentase seni budaya yang dilestarikan	Peningkatan jumlah aktivitas pengelolaan pengembangan seni budaya	Peningkatan jumlah aktivitas seni budaya	Program Pengelolaan Nilai Budaya dan Kesenian	Persentase peningkatan organisasi seni dan budaya yang aktif	10%	10%	DISBUDPAR	
				Program Pengelolaan Sejarah dan Purbakala	Persentase cagar budaya yang difasilitasi	100%	100%	DISBUDPAR	
MISI II : Peningkatan Pelayanan di Bidang Kesehatan yang Murah dan Berkualitas									

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	PD	KETE-RANGAN
Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Peningkatan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau.	Meningkatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, curatif, rehabilitatif dan pengembangan regulasi bidang kesehatan	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya.	Rasio puskesmas per 100.000 penduduk	3,0	3,3	DINKES	
					Persentase ketersediaan alat kesehatan pada puskesmas	23%	27%	DINKES	
				Program peningkatan mutu sumber daya kesehatan	Rasio dokter per 100.000 penduduk	9	13	DINKES	
					Rasio bidan per 100.000 penduduk	36	41	DINKES	
					Rasio perawat per 100.000 penduduk	74	83	DINKES	
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase sarana pelayanan kesehatan swasta yang memenuhi standar pelayanan sesuai peraturan perundangan terbaru	70%	82%	DINKES	
				Program peningkatan mutu sumber daya kesehatan	Persen minimal obat tersedia di puskesmas	95%	95%	DINKES	
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Maskin JKN	54,09%	58%	DINKES	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	PD	KETERANGAN
				Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Surveillance Epidemiologi	Cataract Surgery Rate (CSR) / Angka Operasi Katarak	239 jiwa	456	DINKES	
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan ibu bersalin yang mendapat jaminan kesehatan	100%	100%	DINKES	
					cakupan pertolongan persalinan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	89,57%	90%	DINKES	
					Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	60,72%	100%	DINKES	
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	DINKES	
					cakupan rumah tangga ber - PHBS	35,32%	65%	DINKES	
					Cakupan Desa Siaga Aktif Strata PURI	1,48%	3%	DINKES	
					Cakupan Posyandu Balita Strata PURI	82,93%	95%	DINKES	
					Cakupan Kunjungan Bayi	94,79%	95%	DINKES	
				Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Surveillance Epidemiologi	Cakupan penemuan dan penanganan Pneumonia Balita	16,99%	40%	DINKES	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	PD	KETE-RANGAN
					Cakupan penemuan dan penanganan penyakit TB	38%	43,3%	DINKES	
					Cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD	94,44%	100%	DINKES	
					Cakupan penemuan dan penanganan Diare	55,86%	90%	DINKES	
					Cakupan penemuan dan pengobatan Malaria	100%	100%	DINKES	
					Cakupan penemuan dan pengobatan penderita HIV	60%	85%	DINKES	
					Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	74%	79%	DINKES	
			Menurunnya angka bayi gizi buruk	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Prosentase pencapaian SPM	68,00%	80%	RSUD dr. ISKAK	
					Prosentase penurunan Death on Arrival (DoA)	50,24%	25%	RSUD dr. ISKAK	
				Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Tingkat hunian tempat tidur / Bed Occupancy Rate (BOR)	76,61%	77%	RSUD dr. ISKAK	
				Program Peningkatan Penunjang Pelayanan Kesehatan Rujukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,51	83	RSUD dr. ISKAK	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	PD	KETERANGAN
			Meningkatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, curatif, rehabilitatif dan pengembangan regulasi bidang kesehatan	Program Pengendalian Pelayanan Kesehatan Rujukan	persentase masyarakat miskin yang berobat dan mendapat pelayanan kesehatan di RSUD dr. Iskak	99,98%	100%	RSUD dr. ISKAK	
				Program keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Cakupan peserta KB aktif	77,52%	65%	DINSOS KB PPPA	
					Cakupan peserta KB baru	129,06%	73%	DINSOS KB PPPA	
Misi III : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis									
Meningkatnya pengelolaan pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten	Pemantapan Manajemen Kinerja	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah	Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Bidang Kelembagaan, Peningkatan Kinerja, Tata Laksana dan Pelayanan Publik	persentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	100%	BAGIAN ORGANISASI	
					persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP ≥ 60 (nilai C keatas)	40%	90%	BAGIAN ORGANISASI	
				Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administratif Bidang Pemerintahan	Prosentase peningkatan pendataan dan pembakuan rupa bumi	5	37	BAG. ADM. PEMERINTAHAN	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	PD	KETERANGAN
				Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah	Persentase penerapan sistem kearsipan secara baku pada Perangkat Daerah	15%	40%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Peningkatan kapasitas aparatur dan manajemen pemerintahan	Pembinaan peningkatan kompetensi SDM aparatur	Program Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja kepegawaian	Persentase pejabat struktural yang memiliki kompetensi manajerial	3%	19%	BKD	
					Persentase PNS yang memiliki kompetensi teknis tertentu	40%	65%	BKD	
			Perencanaan dan Pengembangan PNS	Program Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja kepegawaian	Persentase kelengkapan fitur aplikasi SIMPEG online	50%	90%	BKD	
					Persentase penyelesaian kasus indisipliner	70%	88%	BKD	
	Opini BPK	Peningkatan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administratif Bidang Pemerintahan	Persentase penyampaian LPPD yang berkualitas dan tepat waktu	100%	100%	BAGIAN ADM. PEMERINTAHAN	
			Meningkatkan upaya pendataan dan pengelolaan keuangan serta aset daerah	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Lamanya waktu penyusunan RAPBD	68 Hari	68 Hari	BPKAD	
					Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu	90%	100%	BPKAD	
					Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKD)	100% WTP	100%	BPKAD	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	PD	KETERANGAN
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase peningkatan penatausahaan KIB	100%	100%	BPKAD	
					Persentase Aset Tetap tanah yang bersertifikat	33%	38%	BPKAD	
					Persentase Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan Aset Daerah	100%	100%	BPKAD	
				Program Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	12,96%	11%	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				Program Pengamanan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	112,89%	100%	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan internal (BPKP, Itjen dan Inspektorat Propinsi, OPD, Kecamatan, UPT, Sekolah dan desa) yang terselesaikan.	86%	90%	INSPEKTORAT	
		Peningkatan Tertib Administrasi Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik	Mewujudkan Tertib Administrasi Pelayanan Publik	Program penataan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase desa yang tertib administrasi	10%	100%	DPMD	
					Persentase desa yang menerapkan Sistem Manajemen Partisipatif	0%	100%	DPMD	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	PD	KETERANGAN
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat unit pelayanan di kabupaten tulungagung	Penyediaan Pelayanan publik yang prima	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pelayanan publik	Program penguatan kapasitas data dan layanan informasi	Nilai survey kepuasan masyarakat unit layanan	0	80	DPMPPTSP	
					Jumlah ijin yang dapat diakses secara online	0	17 ijin	DPMPPTSP	
				Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Bidang Kelembagaan, Peningkatan Kinerja, Tata Laksana dan Pelayanan Publik	Jumlah unit kerja yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat	15	40	BAGIAN ORGANISASI	
				Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administratif Bidang Pemerintahan	Jumlah kewenangan yang dilimpahkan melalui PATEN	-	8	BAG. ADM. PEMERINTAHAN, KECAMATAN	
		Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas IPTEK dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan	Menyediakan sistem teknologi informasi pelayanan publik	Program Tata Kelola, Pengawasan dan Pengamanan Persandian	Persentase Pengamanan informasi terkait persandian	80%	95%	DISKOMINFO	
				Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	persentase data informasi daerah/statistik pembangunan yang tersusun dengan baik	50%	90%	DISKOMINFO	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	PD	KETE-RANGAN
				Program Peningkatan Penyelenggaraan E Government	Prosentase aplikasi berbasis website SKPD yang menginduk ke domain Kab. Tulungagung/jumlah website	14%	40%	DISKOMINFO	
				Program peningkatan komunikasi dan informasi serta penggunaan media massa	Persentase kelompok informasi masyarakat(KIM) yang dibina	10%	95%	DISKOMINFO	
			Meningkatkan upaya validasi data kependudukan	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki KTP EL	74,26%	95%	DISPENDUKCAPIL	
					Persentase penduduk yang memiliki KK	78,52%	100%	DISPENDUKCAPIL	
				Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	78,56%	95%	DISPENDUKCAPIL	
					Persentase kematian penduduk yang disertai akta kematian	0,92%	45%	DISPENDUKCAPIL	
				Program Penataan Administrasi kependudukan	Tingkat kepuasan masyarakat pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	72%	80%	DISPENDUKCAPIL	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	PD	KETERANGAN
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pilkades	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Pemilu	Peningkatan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan meningkatkan wawasan kebangsaan	Pemberdayaan dan fasilitasi peran masyarakat dalam politik	Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Budaya Politik	Persentase peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat	80%	95%	BAKESBANGPOL	
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan	Prosentase peningkatan penyelesaian pelanggaran Perda / Perbub	Menciptakan iklim kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta memenuhi hak-hak asasi manusia	Peningkatan penyuluhan peraturan / hukum kepada masyarakat	Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Bidang Hukum	Prosentase produk hukum daerah yang disosialisasikan	100%	100%	BAGIAN HUKUM	
					Persentase permasalahan hukum yg terselesaikan	100%	100%	BAGIAN HUKUM	
					Persentase realisasi penetapan Produk hukum daerah	75%	85%	BAGIAN HUKUM	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	PD	KETE-RANGAN
			Peningkatan kesadaran masyarakat untuk patuh dan disiplin terhadap hukum	Program Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati	Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran Perda / Perbub	90%	97%	SATPOL PP	
			Meningkatkan profesionalisme aparat Satpol PP melalui pembinaan kinerja dengan meningkatkan sumber daya organisasi dan manajemen serta pemantapan struktur Satpol PP	Program Peningkatan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat	Cakupan patroli ketertiban per hari	2 x	3X	SATPOL PP	
			Mewujudkan pemberdayaan potensi perlindungan masyarakat (Linmas) dalam mendukung penanggulangan bencana dan penanganan gangguan trantibum lainnya dalam masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat	Rasio petugas satuan linmas per RT di Kabupaten Tulungagung	60%	95%	SATPOL PP	
				Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	10%	20%	SATPOL PP	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	PD	KETE-RANGAN
			Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan terutama melalui deteksi dini dan keterlibatan para tokoh masyarakat	Program Peningkatan Hubungan Antar Lembaga	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan LSM, Ormas dan OKP	80%	100%	BAKESBANGPOL	
Meningkatnya toleransi masyarakat dan kerukunan antar umat beragama	Prosentase potensi konflik SARA yang ditangani	Meningkatkan komunikasi yang harmonis antar tokoh-tokoh keagamaan dan meningkatkan kerjasama lintas agama	Meningkatkan toleransi dan kerukunan masyarakat dalam kehidupan agama	Program Peningkatan Hubungan Antar Lembaga	Persentase pemeliharaan kerukunan antar agama	100%	100%	BAKESBANGPOL	
			Meningkatkan peran forum komunikasi antar umat beragama	Program Peningkatan Integrasi Bangsa	Persentase peningkatan wawasan kebangsaan bagi elemen masyarakat	80%	95%	BAKESBANGPOL	
MISI IV : Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk percepatan pembangunan sektor-sektor lain									
Meningkatnya layanan transportasi perhubungan	Predikat Wahana Tata Nugraha (WTN)	Mewujudkan keterpaduan pelayanan sarana dan prasarana transportasi, serta keterpaduan intra dan antar moda	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan jalan, sarana dan fasilitas perhubungan	Program Lalu Lintas Jalan	Persentase fasilitas lalu lintas yang terpasang dan berfungsi dengan baik	80%	95%	DISHUB	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	PD	KETE-RANGAN
				Program Prasarana Perhubungan	Persentase prasarana perhubungan yang terbangun dan berfungsi dengan baik	80%	85%	DISHUB	
			Peningkatan kualitas kuantitas sarana perhubungan	Program Angkutan dan sarana Perhubungan	Persentase angkutan penumpang dan barang yang laik jalan	80%	100%	DISHUB	
				Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pelayanan Perparkiran	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan perparkiran	80%	80%	DISHUB	
Meningkatnya kondisi jalan yang mantap berkeselamatan	Persentase jalan dalam kondisi baik	Peningkatan efisiensi dan efektifitas pembangunan jalan dan jembatan	Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan membangun sistim jaringan jalan yang mendukung kawasan strategis potensial	Program Kebinamargaan	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik (Km)	54%	82%	DINAS PUPR	
Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar sanitasi	Persentase penduduk yang terlayani akses sanitasi	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayan dasar sanitasi	Meningkatkan layanan penyediaan infrastruktur dasar sanitasi	Program Keciptakaryaan	Persentase Penduduk yang mendapat layanan sanitasi	77%	97,51%	DINAS PUPR	
Meningkatnya layanan infrastruktur dasar air bersih	Persentase penduduk pedesaan yang memiliki akses air bersih	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayan dasar air bersih	Meningkatkan layanan penyediaan infrastruktur dasar air bersih	Program Keciptakaryaan	Persentase Penduduk pedesaan yang memiliki akses air bersih	70%	95%	DINAS PUPR	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	PD	KETERANGAN
Meningkatnya layanan irigasi	Persentase luasan sawah yang terlayani air irigasi	Menyediakan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air	Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan air baku	Program operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi	Prosentase sarana/prasarana irigasi dalam kondisi baik	45%	63%	DINAS PERKIM DAN SDA	
				Program Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air	Prosentase sawah yang terairi air irigasi	50%	63%	DINAS PERKIM DAN SDA	
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara	Peningkatan Nilai Kualitas Lingkungan Hidup	Pengembangan kawasan yang berwawasan lingkungan	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Volume sampah yang terangkut	60%	81,45%	DLH	
	Indeks Kualitas Air			Program Pengawasan dan penataan hukum lingkungan	Penegakan hukum kasus lingkungan	80%	80%	DLH	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan			Program pengelolaan lingkungan dan konservasi sumberdaya alam	Jumlah Pengelolaan Sumber Air	93 lokasi sumber air	134 lokasi sumber air	DLH	
					Indeks Kualitas Air	-	88,00	DLH	
					Indeks Kualitas Udara	-	48,70	DLH	
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-	77,50	DLH	
				Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Kuantitas Pengendalian Pencemaran Air	6 Titik Badan Air, 6 Sungai	6 Titik Badan Air	DLH	
					Perolehan Adipura	Memperoleh Adipura Kencana	Memperoleh Adipura	DLH	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	PD	KETE-RANGAN
Meningkatnya kesiap-siagaan masyarakat mengurangi resiko bencana	Persentase Desa tangguh bencana di kawasan rawan bencana	Peningkatan Penanganan bencana secara terpadu dan menyeluruh	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bencana	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah terbentuknya desa tangguh	2 Desa	7 Desa	BPBD	
				Program Kedaruratan dan Logistik	Presentase korban terdampak bencana yang ditangani	100%	100%	BPBD	
				Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase daerah titik bencana yang terinventaris, terehabilitasi dan terekonstruksi	100%	100%	BPBD	
MISI V : Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UKM, pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata serta perkebunan melalui kegiatan kewirausahaan									
Meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi	Kontribusi Lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB	Meningkatkan kontribusi lapangan usaha pertanian, perikanan, industri pengolah, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor melalui peningkatan kualita SDM, penyediaan sarana prasarana produksi dan penerapan teknologi	Mewujudkan Penguatan Kontribusi sektor sekunder dan tersier yang didukung oleh peningkatan produktifitas sektor primer	Program Pengelolaan Pasar	jumlah pasar yang di revitalisasi	12 unit	7 unit	DISPERINDAG	
				Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM yang di bina	300 IKM	980 IKM	DISPERINDAG	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	PD	KETERANGAN
	Persentase kontribusi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB besar			Program Peningkatan Kapasitas Perdagangan	Jumlah HaKI yang dimiliki produk berbasis industri kecil dan menengah	42 HAKI	55 HAKI	DISPERINDAG	
				Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Jumlah pelaku industri kecil menengah yang telah memanfaatkan IPTEK dalam sistem produksi	25 IKM	125 IKM	DISPERINDAG	
				Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Jumlah peningkatan penerapan teknologi tepat guna industri	75 IKM	120 IKM	DISPERINDAG	
					Jumlah sentra dan kluster industri unggulan yang dibina	25 sentra industri produk unggulan lokal	30 sentra	DISPERINDAG	
				Program Peningkatan Kapasitas Perdagangan	Keikutsertaan IKM dalam kegiatan Promosi	8 IKM	25 IKM	DISPERINDAG	
				Program Peningkatan Kapasitas Perdagangan	Persentase penyelesaian aduan konsumen, produsen dan konsumen	6 Kasus dapat diselesaikan 100%	2 kasus dapat diselesaikan 100%	DISPERINDAG	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	PD	KETE-RANGAN
	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas SDM dan penyediaan kualitas SDM dan penyediaan sarana pendukung sektor pariwisata	Menciptakan kawasan pariwisata yang didukung oleh keterkaitan antar sektor unggulan	Program pengembangan destinasi wisata	jumlah obyek wisata yang berpotensi dikembangkan	2	8	DISBUDPAR	
				Program pengembangan pemasaran pariwisata	persentase peningkatan kunjungan wisata	3%	20%	DISBUDPAR	
				program pengembangan kemitraan	Persentase peningkatan usaha pariwisata yang di ber TDUP	10%	10%	DISBUDPAR	
	Kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	Meningkatkan kontribusi lapangan usaha pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor melalui peningkatan kualita SDM, penyediaan sarana prasarana produksi dan penerapan teknologi	Mewujudkan penguatan kontribusi sektor sekunder dan tersier yang didukung oleh peningkatan produktifitas sektor primer	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase penyediaan cadangan pangan pemerintah	0%	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	PD	KETERANGAN
					Persentase kelembagaan distribusi pangan masyarakat yang diberdayakan	2,45%	4,20%	DINAS KETAHANAN PANGAN	
				Program Pembangunan Insfrastruktur Pangan	Jumlah Pengembangan Insfrastruktur pangan	11	31	DINAS KETAHANAN PANGAN	
					Persentase isian lumbung terbangun	37%	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN	
				Program Pengentasan Daerah Rawan Pangan	Persentase Kecamatan Rawan Pangan dan Gizi	53%	32%	DINAS KETAHANAN PANGAN	
				Program Peningkatan Keamanan dan Mutu Pangan	Persentase jumlah produsen pangan yang memenuhi B2SA	40%	65%	DINAS KETAHANAN PANGAN	
					Skor Pola Pangan Harapan	50%	90%	DINAS KETAHANAN PANGAN	
				Program Peningkatan Produksi Pertanian	Produk hasil pertanian/perkebunan	Padi = 290.253 ton; Jagung = 262.255 ton; Kedelai = 6.075 ton	Padi = 356.029 ton; Jagung = 267.808 ton; Kedelai = 12.423 ton	DINAS PERTANIAN	
					Jumlah / produk pertanian yang memenuhi standart mutu hasil pertanian	2 Sertifikat	3 Sertifikat	DINAS PERTANIAN	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	PD	KETERANGAN
				Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Jumlah produksi komoditas utama tanaman perkebunan	Tebu = 594.700 Ton, Tembakau : 2.522,50 Ton, Kelapa : 116.954 Ton	Tebu : 519.011 Ton (Tebu Basah), Tembakau : 2.322 Ton (rajang kering), Kelapa : 23.150.340 Butir, Kakau : 419 Ton (oce kering), Kopi : 123 Ton (oce kering), Cengkeh : 452 Ton (bunga kering)	DINAS PERTANIAN	
				Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Teknologi Pertanian	Panjang Jalan Usaha Tani yang terbangun	4.500 Meter	8.000 meter	DINAS PERTANIAN	
					Jumlah Saluran Irigasi yang dibangun / direhab	3.600 Meter	6.000 meter	DINAS PERTANIAN	
				Program Pengembangan SDM Pertanian	Prosentase Gapoktan Mandiri	10%	24,12%	DINAS PERTANIAN	
				Program Peningkatan Produksi Tanaman Holtikultura	Jumlah produksi komoditas utama tanaman holtikultura	Cabe rawit : 544,80 ton; Cabe besar : 618,30 ton; Bawang Merah 138,30 Ton; Belimbing : 5.610 Ton	Cabe Rawit : 836 Ton, Cabe Besar : 1.079,43 Ton, Bawang Merah : 282,48 Ton, Belimbing : 6.479,52 Ton	DINAS PERTANIAN	
					Jumlah Komoditi pertanian unggulan	3 jenis	7 jenis	DINAS PERTANIAN	
				Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah produksi peternakan(ton)	Produksi daging = 16.590 ton	produksi daging = 17.179 ton	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	PD	KETE-RANGAN
						Produksi telur = 42.597 ton	produksi telur = 44.769 ton	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
						Produksi susu = 45.279 ton	produksi susu = 48.062 ton	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
					Jumlah populasi ternak (ekor)	Sapi Potong 95.800 ekor; Sapi Perah 17.599 ekor; Kambing 175.111 ekor; Domba 4.017 ekor; Ayam Petelur 3.555.771 ekor; Ayam Pedaging 2.545.500 ekor; Ayam Buras 2.168.144 ekor; dan Itik 428.255 ekor	Sapi Potong 110.964 ekor; Sapi Perah 22.461 ekor; Kambing 193.337 ekor; Domba 4.435 ekor; Ayam Petelur 3.925.859 ekor; Ayam Pedaging 2.810.438 ekor; Ayam Buras 2.393.806 ekor; dan Itik 472.828 ekor	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
				Program Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	Persentase angka kematian ternak akibat penyakit	2%	<1%	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
					Persentase kejadian PHM yang ditangani	85%	90%	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
					Persentase menurunnya wilayah terancam wabah	1%	2%	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
				Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	Persentase kelompok berwawasan agribisnis			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	PD	KETERANGAN
					- Kel. Peternak Sapi Perah	40%	60%	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
					- Kel. Peternak Sapi Potong	63%	75%	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
					- Kel. Peternak Ayam Ras	36%	60%	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
					- Kel. Peternak Ayam Buras	58%	75%	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
					- Kel. Peternak Kambing	48%	70%	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
					- Kel. Peternak Domba	40%	50%	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
					- Kel. Peternak Itik	48%	70%	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
				Program Peningkatan Keamanan Produk Asal hewan	Presentase produk pangan asal hewan yang ASUH	70%	95%	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
					Persentase unit usaha produk hewan yang memenuhi standar hygiene sanitasi	70%	95%	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
				Program Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Budidaya	PDRB Perikanan Budidaya (juta rupiah)	Rp. 632.065,32,-	Rp. 643.163,4,-	DINAS PERIKANAN	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	PD	KETERANGAN
				Program Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	PDRB Perikanan Tangkap (juta rupiah)	Rp. 49.553,70,-	Rp. 41.635,8,-	DINAS PERIKANAN	
				Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Perikanan	Jumlah kelompok yang meningkat kelasnya (kelompok)	0	15	DINAS PERIKANAN	
					Jumlah kelompok perikanan (kelompok)	34 Kelompok	359 kelompok	DINAS PERIKANAN	
					Nilai produksi olahan hasil perikanan (juta rupiah)	Rp 95.411,76	Rp 121.772,27	DINAS PERIKANAN	
	Prosentase pertumbuhan omset Koperasi			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang difasilitasi pengembangan usaha	15%	20%	DINAS KOPERASI UMKM	
					Persentase SDM pengelola koperasi yang difasilitasi pelatihan dan keterampilan	10%	10%	DINAS KOPERASI UMKM	
				Program Pengawasan dan Pengendalian Koperasi	Persentase Koperasi Cukup Sehat	60%	75%	DINAS KOPERASI UMKM	
				Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase jumlah koperasi yang aktif	65%	80%	DINAS KOPERASI UMKM	
	Prosentase pertumbuhan Omset Usaha Mikro			Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase peningkatan wirausaha baru	2%	2%	DINAS KOPERASI UMKM	
					Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Usaha Kecil	2%	2%	DINAS KOPERASI UMKM	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	PD	KETERANGAN
MISI VI :Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu									
Meningkatnya penduduk yang bekerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Peningkatan upaya perlindungan tenaga kerja dan keselamatan kerja terutama bagi pekerja perempuan	Melakukan upaya koordinasi dengan dunia usaha dalam perlindungan dan keselamatan tenaga kerja	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Tingkat Kesempatan Kerja	97,23%	94,60%	DISNAKERTRANS	
					Persentase Pencari Kerja ditempatkan	20,50%	22,50%	DISNAKERTRANS	
				Program peningkatan hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga kerja	Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	50% terselesaikan	90%	DISNAKERTRANS	
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penurunan PMKS	Peningkatan keberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan & pro rakyat	Pemantapan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan orientasi peningkatan aksesibilitas penduduk miskin terhadap sumber daya produktif	Program Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa	Persentase peningkatan status desa	1%	30%	DPMD	
					Persentase peningkatan usaha ekonomi produktif	3%	75%	DPMD	
					Persentase BUMDES dan BUMDES bersama aktif	0,16%	26,5%	DPMD	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	PD	KETE-RANGAN
				Program Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Persentase inovasi masyarakat di bidang teknologi tepat guna	0%	68,0%	DPMD	
				Program Partisipasi dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan	30%	100,0%	DPMD	
				Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial	Persentase penyandang cacat dan trauma yang terampil	30%	40%	DINSOS KB PPPA	
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase jumlah fakir miskin yang tertangani	18%	22%	DINSOS KB PPPA	
Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Prosentase kasus kekerasan anak yang tertangani	Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan anti kekerasan terhadap anak dan perempuan	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase kasus kekerasan yang terselesaikan	70%	75%	DINSOS KB PPPA	
	Indeks Pembangunan Gender	Peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan	Pemantapan kebijakan PUG dengan orientasi peningkatan kualitas hidup perempuan	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase kelembagaan organisasi perempuan yang aktif	80%	90%	DINSOS KB PPPA	
					Persentase penerapan rencana aksi bina keluarga TKI	60%	100%	DINSOS KB PPPA	
					Persentase kelompok bina keluarga TKI yang dibina	20%	80%	DINSOS KB PPPA	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	KONDISI AKHIR 2018	PD	KETE-RANGAN
					Persentase cakupan pemetaan keluarga TKI	50%	100%	DINSOS KB PPPA	

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Program-program yang dapat dilaksanakan baik yang bersifat Program Unggulan maupun program dalam rangka penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta operasional pemerintahan menurut urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
3. Program Pembinaan SD
4. Program Pembinaan SMP
5. Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pendidikan
6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7. Program Penunjang Teknis Operasional Minat dan Bakat

2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1. Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

3. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEBUDAYAAN

1. Program Pengelolaan Nilai Budaya dan Kesenian
2. Program Pengelolaan Sejarah dan Purbakala

4. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN PARIWISATA

1. Program Pengembangan Destinasi Wisata
2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3. Program Pengembangan Kemitraan
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

5. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas /Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Kesehatan
4. Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Surveillance Epidemiologi
5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan rujukan
6. Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Kesehatan
7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
8. Program Pengendalian Pelayanan Kesehatan Rujukan
9. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
10. Program Sistem Informasi Kesehatan
11. Program Peningkatan Penunjang Pelayanan Kesehatan Rujukan

6. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KESEKRETARIATAN DPRD

1. Program Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Bidang Perundang-Undangan dan Persidangan
2. Program Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Bidang Penganggaran dan Pengawasan

7. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KESEKRETARIATAN DAERAH

1. Program Penyusunan Kebijakan Dan Pengkoordinasian Adiministratif Bidang Pemerintahan
2. Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Adiministratif Bidang Kesejahteraan Masyarakat
3. Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Bidang Hukum
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
5. Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Adiministratif Bidang Pembangunan
6. Program Pengadaan Barang dan Jasa
7. Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Bidang Kelembagaan, Peningkatan Kinerja, Tata Laksana dan Pelayanan Publik
8. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Daerah
9. Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Bidang

8. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN KEUANGAN

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

9. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
3. Program Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
4. Program Pengamanan Penerimaan Pajak dan Restribusi Daerah

**10. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
PENANAMAN MODAL**

1. Program Penguatan Kapasitas Data Dan Layanan Informasi
2. Program Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Penanganan Pengaduan dan Penertiban Layanan
5. Program Pelayanan Perizinan Jasa Usaha
6. Program Pelayanan Perizinan Jasa Non Usaha

**11. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

1. Program Pelayanan Pencatatan Sipil
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan
3. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi dan Kependudukan
5. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

**12. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
PERHUBUNGAN**

1. Program Keselamatan Jalan
2. Program Prasarana Perhubungan

3. Program Lalu Lintas Jalan
4. Program Angkutan dan Sarana Perhubungan
5. Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pelayanan Perparkiran

13. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR LINGKUNGAN HIDUP

1. Program Pengelolaan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
4. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
5. Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
6. Program Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan
7. Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Persampahan
8. Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Laboratorium Lingkungan

14. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN PERTANIAN

1. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
2. Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan
3. Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultural
4. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Dan Teknologi Pertanian
5. Program Pengembangan SDM Pertanian
6. Program Penunjang Teknis Operasional Perbenihan
7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
8. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan
9. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan
10. Program Peningkatan Keamanan Produk Asal Hewan
11. Program Penunjang Teknis Operasional Budidaya Ternak
12. Program Penunjang Teknis Operasional Pusat Kesehatan Hewan
13. Program Penunjang Teknis Operasional Rumah Potong Hewan

15. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2. Program Pembangunan Insfrastruktur Pangan
3. Program Pengentasan Daerah Rawan Pangan
4. Program Peningkatan Keamanan dan Mutu Pangan

16. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Program Keciptakaryaan
2. Program Kebinamargaan
3. Program Pengembangan Jasa Kontruksi
4. Program Infrastruktur Persampahan
5. Program Pertamanan dan Pemakaman
6. Program Instalasi Listrik Penerangan Jalan Umum
7. Program Tata Ruang
8. Program Tata Bangunan
9. Program Pengelolaan Laboratorium
10. Program Pengelolaan Perbengkelan dan Alat Berat
11. Program Pengembangan Teknologi Bahan Bangunan
12. Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

17. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR SUB URUSAN SUMBER DAYA AIR

1. Program Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air
2. Program Pelestarian Sumber Daya Air
3. Program Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
4. Program Pengelolaan Pembinaan dan Penyuluhan Jaringan Irigasi
5. Program Penunjang Teknis Operasional Bidang PKPSDA

18. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

19. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERTANAHAN

1. Program Pertanahan

20. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN PERIKANAN

1. Program Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Budidaya
2. Program Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perikanan
4. Program Penunjang Teknis Operasional Pembenihan Ikan

21. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

1. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah
2. Program Sistem Informasi Industri dan Perdagangan

22. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN PERDAGANGAN

1. Program Peningkatan Kapasitas Perdagangan
2. Program Pengelolaan Pasar

23. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN TRANSMIGRASI

1. Program Ketransmigrasian

24. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOPERASI DAN USAHA MIKRO

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
3. Program Pengawasan dan Pengendalian Koperasi
4. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
5. Program Penunjang Teknis Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu

25. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL

1. Program Rehabilitasi Dan Pemberdayaaan Sosial
2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
3. Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
5. Program Kedaruratan dan Logistik

6. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

26. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA

1. Program Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja
2. Program Peningkatan Hubungan Industrial Perlindungan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
3. Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pelatihan Tenaga Kerja
4. Program Data Dan Informasi Ketenagakerjaan
5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

27. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Program Pembinaan dan Pengembangan ASN
2. Program Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Kepegawaian
3. Program Pelayanan Mutasi dan Purna Pegawai
4. Program Peningkatan Data dan Informasi Kepegawaian

28. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERPUSTAKAN

1. Program peningkatan kualitas perpustakaan
2. Program pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan

29. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN

1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Arsip Daerah

30. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
2. Program Peningkatan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat

4. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
5. Program Peningkatan Dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Dalam Pelayanan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat

**31.URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

1. Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

**32.URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
STATISTIK**

1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

**33.URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
PERSANDIAN**

1. Program tata kelola pengawasan dan pengamanan Persandian

**34.URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

1. Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Penggunaan Media Massa
2. Program Peningkatan Penyelenggaraan E-Government
3. Program Layanan Komunikasi Dan Informatika

**35.URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

1. Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
2. Program Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
3. Program Partisipasi Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
4. Program Pendayagunaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna

36.PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN

1. Program Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Program Perencanaan Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah
4. Program Perencanaan Ekonomi

37. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENELITIAN

1. Program Penelitian dan Pengembangan

38. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Sosial
2. Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan Masyarakat

39. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Budaya Politik
2. Program Peningkatan Hubungan antar Lembaga
3. Program Peningkatan Integrasi Bangsa
4. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
5. Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa atau Kelurahan
7. Program Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan
8. Program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Desa atau Kelurahan

Sedangkan program-program prioritas dalam arti yang memberikan dukungan secara langsung terhadap visi misi Kabupaten Tulungagung untuk jangka waktu satu tahun ke depan dapat disajikan sebagaimana tabel di bawah.

Tabel VIII.1
Indikasi Rencana Program Prioritas Serta Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Tulungagung
Tahun 2018

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS						TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS				KONDISI AKHIR		PD
			2014		2015		2016		2017		2018		2018		
			Capaian	Rp (Ribu)	Capaian	Rp (Ribu)	Capaian	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
MISI I :Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian/pengembangan kebudayaan															
Program Pembinaan SD	Rasio murid per kelas tk. SD/MI	01:30	01:20	316.393	01:25	345.329,5	01:14	344.850	01:28	230.000	01:28	5.000.000	01:28	5.000.000	DIKPORA
	Angka Putus sekolah SD/MI	0,02%	0,02%	-	0,02%	-	0,03	-	0,03	-	0,01%	-	0,01%	-	DIKPORA
	APK /SD/MI, Paket /A	103,91%	103%	-	103%	-	104,79%	-	105	-	100%	-	100%	-	DIKPORA
	Persentase Lulusan SD melanjutkan ke SMP / MTS	99,80%	100%	-	100%	-	99,86%	-	100%	-	99,85%	-	99,85%	-	DIKPORA
Program Pembinaan SMP	Rasio Murid per Kelas tk SMP/MTs	01:30	01:25	306.600	01:29	455.420	01:27	314.050	01:30	216.250	01:32	5.000.000	01:32	5.000.000	DIKPORA
	Angka Putus Sekolah SMP/MTS	0,59%	0,59%	-	0,54%	-	26%	-	97%	-	0,21%	-	0,21%	-	DIKPORA
	Persentase Lulusan SMP melanjutkan ke SMA / MA	78,40%	99,99%	-	99,99%	-	88,40%	-	99,99%	-	99,65%	-	99,65%	-	DIKPORA
	APK /SMP/MTs/ Paket B	97,62%	97%	-	94,45%	-	99,85%	-	97%	-	99,00%	-	99,00%	-	DIKPORA
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Siswa jenjang SD dan SMP Negeri yang memiliki akses pada program pendidikan gratis	0%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	30.529,13	100%	30.000.000	100%	30.000.000	DIKPORA
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Prosentase peningkatan siswa penerima Bea siswa dalam rangka mendukung proses belajar siswa di Kabupaten Tulungagung	62,70%	88,92%	437.885	97%	288.220,60	94,50%	1.365.424	100	2.255.432	65%	500.000	65%	500.000	DIKPORA
	Persentase Ruang Kelas PAUD Baik	63%	98%	-	99,60%	-	99%	-	94,31	-	70%	-	70%	-	DIKPORA
	Rasio Siswa PAUD Per Kelas	01:19		-		-	01:19	-	01:19	-	01:19	-	01:19	-	DIKPORA
	Persentase PAUD yang menerima bantuan Operasional	30%	97,88%	-	0%	-	100%	-	75,22%	-	98%	-	98%	-	DIKPORA
	Persentase Pendidikan Masyarakat yang dibina	60%	100%	-	100%	-	99%	-	100%	-	75%	-	75%	-	DIKPORA

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS						TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS				KONDISI AKHIR		PD
			2014		2015		2016		2017		2018		2018		
			Capaian	Rp (Ribuan)	Capaian	Rp (Ribuan)	Capaian	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Siswa jenjang SD dan SMP Negeri yang memiliki akses pada program pendidikan gratis	2%	0%	-	0%	-	0%	-	100%	-	100%	30.000.000	100%	30.000.000	DIKPORA
Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administratif Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Persentase peningkatan siswa penerima bea siswa dalam rangka mendukung proses belajar siswa di Kabupaten Tulungagung	62,70%	63%	200.000	-	-	-	-	100% dengan asumsi 26 penerima bea siswa	845.000	65%	900.000	65%	900.000	BAG. ADM. KESRA
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Persentase organisasi kepemudaan yang berprestasi	2%	-	-	-	-	-	-	40%	1.225.000	50%	950.000	50%	950.000	DIKPORA
	Persentase Organisasi Olahraga yang berprestasi	25%	-	-	-	-	-	-	50%	-	55%	-	55%	-	DIKPORA
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru SD berkualifikasi S1	66%	100%	497.000	93,61%	298.755	100%	200.000	100%	150.000	98%	820.000	98%	820.000	DIKPORA
	Persentase guru SD berkualifikasi S2	0,07%	50%	-	50%	-	0%	-	0%	-	2%	-	2%	-	DIKPORA
	Persentase guru SMP berkualifikasi S1	88%	100%	-	97,90	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	DIKPORA
	Persentase guru SMP berkualifikasi S2	3,60%	4%	-	4%	-	4%	-	10%	-	20%	-	20%	-	DIKPORA
	Persentase Guru SD/SMP memiliki sertifikat sesuai dengan kompetensi	77%	94%	-	99,61	-	100%	-	100%	-	85%	-	85%	-	DIKPORA
Program Pembinaan SD	Persentase Ruang Kelas Baik tingkat SD	68,83%	44,64%	510.335,13	99%	1.000.000	90%	1.686.973,00	100%	1.000.000,00	80%	5.000.000	80%	5.000.000	DIKPORA
Program Pembinaan SMP	Persentase Ruang Kelas Baik tingkat SMP	86,70%	97,65%	744.935,00	99%	1.991.435	100,00%	8.950.521,00	100%	200.000,00	87,45%	5.000.000	87,45%	5.000.000	DIKPORA
Program Peningkatan Kualitas Perpustakaan	Persentase peningkatan sarana prasarana perpustakaan	40%	45%	2.010.000	67%	595.000	73%	570.000	80%	700.000	83%	250.000	83%	250.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Persentase penerapan sistem e-Library	0%	-	-	-	-	2%	-	4%	-	5%	-	5%	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Persentase perpustakaan kecamatan yang dibina	10%	30%	-	45%	-	60%	-	85%	-	100%	-	100%	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS						TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS				KONDISI AKHIR		PD
			2014		2015		2016		2017		2018		2018		
			Capaian	Rp (Ribu)	Capaian	Rp (Ribu)	Capaian	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
	Persentase perpustakaan desa yang dibina	10%	11%		12%		12%		13%	-	14%		14%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Persentase taman bacaan yang dibina	10%	30%		40%		60%		85%	-	60%		60%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Persentase perpustakaan Sekolah yang dibina	29%	40%		45%		50%		55%	-	60%		60%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Persentase Penerapan sistem kearsipan secara baku pada PD	15%	15%		19%	125.000	27%	235.000	33%	200.000	40%	300.000	40%	300.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Program Pengelolaan Nilai Budaya dan Kesenian	Persentase peningkatan organisasi seni dan budaya yang di bina	10%	1,28	1.240.000	1,66	1.810.000	1,55		2%	1.215.000	2%	6.275.000	10%	6.275.000	DISBUDPAR
Program pengelolaan sejarah dan purbakala	Persentase cagar budaya yang difasilitasi	100%	100%	380.000	100%	50.000	100%		100%	795.000	100%	1.175.000	100%	1.175.000	DISBUDPAR
MISI II :Peningkatan Pelayanan di Bidang Kesehatan yang Murah dan Berkualitas															
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya.	Rasio puskesmas per 100.000 penduduk	3,0	2,6	1.994.866	3,0	850.000	3,0	3.023.883	3,6	4.083.287	3,3	500.000	3,3	500.000	DINKES
	Persentase ketersediaan alat kesehatan pada puskesmas	23%	23,46%	-	24,05%	-	24,71%	-	26%	-	27%	-	27%	-	DINKES
Program peningkatan mutu sumber daya kesehatan	Rasio dokter per 100.000 penduduk	9	11	-	22	-	21	-	13	-	13	100.000	13	100.000	DINKES
	Rasio bidan per 100.000 penduduk	36	38	-	60	-	68	-	40	-	41	-	41	-	DINKES
	Rasio perawat per 100.000 penduduk	74	82	-	106	-	135	-	82	-	83	-	83	-	DINKES
program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	persentase sarana pelayanan kesehatan swasta yang memenuhi standar pelayanan sesuai peraturan perundangan terbaru	70%	70%	20.000	76,84%	50.000	80,8%	39.830	80%	118.812	82%	80.000	82%	80.000	DINKES

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS						TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS				KONDISI AKHIR		PD
			2014		2015		2016		2017		2018		2018		
			Capaian	Rp (Ribu)	Capaian	Rp (Ribu)	Capaian	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
program Peningkatan Mutu Sumber Daya Kesehatan	persen minimal obat tersedia di puskesmas	95%	100%	2.436.178	95%	2.632.582	95%	3.405.031	95%	6.688.546	95%	150.000	95%	150.000	DINKES
program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	cakupan pelayanan Kesehatan Dasar Miskin JKN	54,09%	38,88%	23.291.866	40,37%	27.296.422	44,98%	31.883.431	58%	40.930.059	58%	40.038.218	58%	40.038.218	DINKES
Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Surveillance Epidemiologi	Cataract Surgery Rate (CSR)/angka operasi katarak	239 jiwa	225	-	363	-	567	-	411	-	456	-	456	-	DINKES
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan ibu bersalin yang mendapat jaminan kesehatan	100%	100%	240.805	100%	146.500	100%	249.702	100%	3.275.238	100%	350.000	100%	350.000	DINKES
	cakupan pertolongan persalinan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	89,57%	92,74%	-	91,50%	-	93,60%	-	90%	-	90,00%	0	90,00%	0	DINKES
	cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	60,72%	82,63%	-	86,35%	-	83%	-	85%	-	100%	0	100%	0	DINKES
Program upaya kesehatan Masyarakat	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	237.294	100%	357.212	100%	550.558	100%	515.050	100%	270.000	100%	270.000	DINKES
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	cakupan rumah tangga ber - PHBS	35,32%	38,12%	1.261.512	41,72%	1.853.307	42%	2.165.000	55%	2.190.840	65%	1.375.000	65%	1.375.000	DINKES
	cakupan Desa Siaga Aktif Strata PURI	1,48%	1,5%	-	1,5%	-	3,0%	-	8,5%	-	3%	-	3%	-	DINKES
	cakupan Posyandu balita Strata PURI	82,93%	88,14%	-	89,52%	-	89,6%	-	90%	-	95%	-	95%	-	DINKES
	cakupan kunjungan bayi	94,79%	96,77%	-	97,84%	-	92,7%	-	95%	-	95%	-	95%	-	DINKES
program pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta surveillance epidemiologi	cakupan penemuan dan penanganan pneumonia balita	16,99%	14,6%	612.377	20,8%	443.614	52,2%	863.755	35%	1.091.600	40%	1.975.000	40%	1.975.000	DINKES

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS						TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS				KONDISI AKHIR		PD
			2014		2015		2016		2017		2018		2018		
			Capaian	Rp (Ribu)	Capaian	Rp (Ribu)	Capaian	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
	cakupan penemuan dan penanganan penyakit TB	38%	31%	-	32%	-	30%	-	42,4%	-	43,3%	-	43,3%	-	DINKES
	cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD	94,44%	100%	-	61,2%	-	100%	-	99%	-	100%	-	100%	-	DINKES
	cakupan penemuan dan penanganan Diare	55,86%	93%	-	86,1%	-	87,09%	-	85%	-	90%	-	90%	-	DINKES
	cakupan penemuan dan pengobatan Malaria	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	DINKES
	cakupan penemuan dan pengobatan penderita HIV	60%	100,0%	-	100,0%	-	100%	-	80%	-	85%	-	85%	-	DINKES
	cakupan desa / kelurahan universal child immunization (UC)	74%	91,51%	-	85,2%	-	91%	-	78%	-	79%	-	79%	-	DINKES
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	prosentase pencapaian SPM	68%	65,66%	1.468.352	74,44%	1.951.176	74,77%	1.033.765	77,50%	1.013.000	80%	71.500.000	80%	71.500.000	RSUD dr. ISKAK
	Persentase penurunan Death on Arrival (DoA)	50,24%	23,47%		8%		46,38%		20%	-	25%		25%		RSUD dr. ISKAK
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Tingkat hunian tempat tidur / Bed Occupancy Rate (BOR)	76,61%	80,66%	144.230.387	73,71%	159.484.695	78,63%	183.741.345	75%	215.760.212	77%	236.500.000	77%	236.500.000	RSUD dr. ISKAK
Program Pengendalian Pelayanan Kesehatan Rujukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,51	75,04	5.553.934	77,6%	10.539.933	82,48	16.183.891	82,5	9.180.946	83	72.171.485	83	72.171.485	RSUD dr. ISKAK
Program Pengendalian Pelayanan Kesehatan Rujukan	persentase masyarakat miskin yang berobat dan mendapat pelayanan kesehatan di RSUD dr. Iskak	99,98%	100%	990.864	100%	2.180.105	100%	2.499.808	100%	1.500.000	100%	5.500.000	100%	5.500.000	RSUD dr. ISKAK
MISI III :Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis															
Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Bidang Kelembagaan, Peningkatan Kinerja, Tata Laksana dan Pelayanan Publik	persentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	100%	810.000	100%	1.200.000	100%	1.955.000	100%	1.450.000	100%	500.000	100%	500.000	BAG. ORGANISASI

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS						TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS				KONDISI AKHIR		PD
			2014		2015		2016		2017		2018		2018		
			Capaian	Rp (Ribu)	Capaian	Rp (Ribu)	Capaian	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
	persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP ≥ 60(Nilai B keatas)	40%	37%	-	68%	-	100%	-	80%	-	90%		90%		BAG. ORGANISASI
	Jumlah unit kerja yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat	15	20	-	23	-	35	-	38	-	40		40		BAG. ORGANISASI
Program Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja kepegawaian	Persentase pejabat struktural yang memiliki kompetensi manajerial	3%		300.000	87%	650.000	88%	1.115.000	18%	481.000	19%	1.125.000	19%	1.125.000	BKD
	Persentase PNS yang memiliki kompetensi teknis tertentu	40%	79%	-	69%	-	70%	-	70%	-	65%	-	65%	-	BKD
Program Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja kepegawaian	Persentase kelengkapan fitur aplikasi SIMPEG online	50%	71%	100.000	79%	75.000	81%	150.000	70%	290.000	90%	300.000	90%	300.000	BKD
Program Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja kepegawaian	persentase penyelesaian kasus indisipliner	70%	100%	100.000	100%	50.000	100%	150.000	84%	193.000	88%	300.000	88%	300.000	BKD
Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administratif Bidang Pemerintahan	Prosentase peningkatan pendataan dan pembakuan rupa bumi	5%	5%	218.306,5	5%	451.641	11%	631.008,15	5%	525.000	5%	600.000	37%	600.000	BAG. ADM. PEMERINTAH AN
	Persentase penyampaian LPPD yang berkualitas dan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BAG. ADM. PEMERINTAH AN
	Jumlah kewenangan yang dilimpahkan melalui PATEN	-	-		7		7		7		8		8		BAG. ADM. PEMERINTAH AN, KECAMATAN
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Lamanya waktu penyusunan RAPBD	68 Hari	66 Hari'	2.379.129	94 Hari	2.254.021	98 hari	2.444.870	68 Hari'	2.835.550	68 Hari'	3.490.000	68 Hari	3.490.000	BPKAD

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS						TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS				KONDISI AKHIR		PD
			2014		2015		2016		2017		2018		2018		
			Capaian	Rp (Ribuan)	Capaian	Rp (Ribuan)	Capaian	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	
	Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu	90%	98,89%	1.648.217	99,01%	1.161.293	99,47%	1.204.840	100%	1.315.000	100%	1.600.000	100%	1.600.000	BPKAD
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKD)	100% WTP	100% WTP	1.834.671	100% WTP	1.594.208	100% WTP	1.597.363	100% WTP	1.706.622	100% WTP	1.860.000	100% WTP	1.860.000	BPKAD
Program peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Peningkatan Penatausahaan KIB	100%	100%	1.230.049	100%	778.821	100%	949.486	100%	1.300.000	100%	1.500.000	100%	1.500.000	BPKAD
	Persentase Aset Tetap Tanah yang bersertifikat	33%	33,73%	941.469	34,09%	617.640	36,80%	391.659	37%	800.000	38%	900.000	38%	900.000	BPKAD
	Persentase Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan Aset Daerah	100%	415,91%	942.031	238,11%	617.640	162,10%	391.659	100%	450.000	100%	500.000	100%	500.000	BPKAD
Program Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	12,96%	72%	1.616.697,4	2,9%	2.992.191,1	10,35%	2.200.324,1	11,00%	2.071.605	11,00%	5.530.000	11,00%	5.530.000	Badan Pendapatan Daerah
Program Pengamanan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	112,89%	107,30%	2.092.311,1	109,27%	2.494.164,2	102,92%	2.793.274,8	100,00%	2.348.980	100%	2.825.000	100%	2.825.000	Badan Pendapatan Daerah
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan internal (BPKP, Itjen dan Inspektorat Propinsi, OPD, Kecamatan, UPT, Sekolah dan desa) yang terselesaikan.	86%	86%	50.000	87%	50.000	88%	50.000	89%	70.000	90%	70.000	90%	70.000	INSPEKTORAT
Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Desa yang tertib administrasi	10%	30%	1.145.000	50%	1.260.000	100%	1.275.000	100%	1.885.750	100%	550.000	100%	550.000	DPMD
	Persentase Desa yang menerapkan Sistem Manajemen Partisipatif (SMPP)	0%	30%	-	50%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	DPMD
Program Penguatan Kapasitas Data dan Layanan Informasi	Nilai survey kepuasan masyarakat unit pelayanan	0	81	529.960.000	81,29	399.250.000	75,69	477.085.200	78	500.000	80	800.000	80	800.000	DPMPPTSP

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS						TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS				KONDISI AKHIR		PD
			2014		2015		2016		2017		2018		2018		
			Capaian	Rp (Ribu)	Capaian	Rp (Ribu)	Capaian	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
	Jumlah ijin yang dapat diakses secara online	0 ijin	3 ijin		7 ijin		12 ijin		13 ijin		17 ijin		17 ijin		DPMPTSP
Program Tata Kelola, Pengawasan dan Pengamanan Persandian	Presentase Pengamanan informasi terkait persandian	80%	100%	44.727.500	100%	35.000.000	11%	45.000.000	28%	80.000.000	95%	485.000	95%	485.000	DISKOMINFO
Program Pengembangan Data / Informasi / Daerah	Persentase data informasi daerah/statistik pembangunan yang tersusun dengan baik	50%	-	-	-	-	-	-	71%	100.000	90%	100.000	90%	100.000	DISKOMINFO
Program Peningkatan Penyelenggaraan E Government	Prosentase aplikasi berbasis website Perangkat Daerah yang menginduk ke domain Kab. Tulungagung/jumlah website	14%	32%	175.000.000	40,3%	100.000.000	51,8%	130.000.000	73,6%	100.000.000	40%	243.100	40%	243.100	DISKOMINFO
Program peningkatan komunikasi dan informasi serta penggunaan media massa	Persentase kelompok informasi masyarakat(KIM) yang dibina	10%	13%	50.000.000	20%	35.000.000	-	-	22%	75.000.000	95%	150.000	95%	150.000	DISKOMINFO
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki KTP EL	74,26%	8%	450.000	82,58%	700.000	97%	330.000	95%	430.000	97%	550.000	97%	550.000	DISPENDUK CAPIL
	Persentase penduduk yang memiliki KK	78,52%	100%	-	100%	-	100%		100%		100%		100%		DISPENDUK CAPIL
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	78,56%	124,06%	305.000	124,28%	-	140,5%	465.000	95%	365.000	95%	500.000	95%	500.000	DISPENDUK CAPIL
	Persentase kematian penduduk yang disertai akta kematian	0,92%	5,80%		1,42%	-	31,90%	215.000	45%	65.000	45%		45%		DISPENDUK CAPIL
Program Penataan Administrasi kependudukan	Tingkat kepuasan masyarakat pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	72	72	-	77	-	78,3	50.000	80	60.000	80%	250.000	80%	250.000	DISPENDUK CAPIL
Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Bidang Hukum	Persentase produk hukum daerah yang disosialisasikan	100%	100%	1.036.213	100%	1.036.636	100%	1.317.669	100%	1.038.000	100%	960.000	100%	960.000	BAGIAN HUKUM

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS						TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS				KONDISI AKHIR		PD
			2014		2015		2016		2017		2018		2018		
			Capaian	Rp (Ribu)	Capaian	Rp (Ribu)	Capaian	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
	Persentase permasalahan hukum yg terselesaikan	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		100%		BAGIAN HUKUM
	Persentase realisasi penetapan Produk hukum daerah	75%	95%	-	93%	-	100%	-	80%	-	85%		85%		BAGIAN HUKUM
Program Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati	Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran Perda / Perbub	90%	1%	850.000	1%	525.000	1%	550.000	2%	250.000	97%	950.000	97%	950.000	SATPOL PP
Program Peningkatan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat	Cakupan patroli ketertiban per hari	2 x	2,2 x	1.085.000	2,2 x	140.000	2,4 x	820.000	2,5x	200.000	3 x	1.550.000	3X	1.550.000	SATPOL PP
Program Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat	Rasio petugas satuan linmas per RT di Kabupaten Tulungagung	60%	80%	510.000	88%	210.000	90%	650.000	92%	750.000	95%	1.000.000	95%	1.000.000	SATPOL PP
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	10%	12%	-	13%	-	15%	-	18%	700.000	20%	1.100.000	20%	1.100.000	SATPOL PP
Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Budaya Politik	Persentase Peningkatan Pendidikan politik bagi masyarakat	80%	3%	250.000	3%	265.000	3%	300.000	3%	675.000	3%	950.000	95%	950.000	BAKESBANG POL
Program Peningkatan Hubungan Antar Lembaga	Presentase Peningkatan kapasitas kelembagaan LSM, Ormas dan OKP	80%	4%	150.000	4%	150.000	4%	175.000	4%	200.000	4%	200.000	100%	200.000	BAKESBANG POL
	Persentase pemeliharaan kerukunan antar agama	80%	100%	75.000	100%	100.000	100%	150.000	100%	200.000	100%	250.000	100%	250.000	BAKESBANG POL
Program peningkatan Integrasi Bangsa	Persentase peningkatan wawasan kebangsaan bagi elemen masyarakat	80%	3%	250.000	3%	300.000	3%	375.000	3%	683.000	3%	1.450.000	95%	1.450.000	BAKESBANG POL
MISI IV : Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk percepatan pembangunan sektor-sektor lain															
Program Lalu Lintas Jalan	Persentase fasilitas lalu lintas yang terpasang sesuai dengan kebutuhan	80%	99,86%	1.055.000	98,60%	925.000	99%	925.000	59%	4.166.000	100%	6.150.000	100%	6.150.000	DISHUB

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS						TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS				KONDISI AKHIR		PD
			2014		2015		2016		2017		2018		2018		
			Capaian	Rp (Ribu)	Capaian	Rp (Ribu)	Capaian	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
Program Prasarana Perhubungan	Persentase pembangunan prasarana perhubungan	80%	99,47%	975.000	99,53%	500.000	98,48%	1.390.000	68,70%	1.450.000	100%	4.600.000	100%	4.600.000	DISHUB
Program Angkutan dan sarana Perhubungan	Persentase angkutan yang melayani masyarakat	80%	0%	-	85%	400.000	84,30%	1.000.000	57%	1.295.500	100%	1.810.000	100%	1.810.000	DISHUB
Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pelayanan Perparkiran	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perparkiran	80%	79,80%	60.125	77,10%	60.125	80,60%	110.125	25%	269.125	80%	1.260.000	80%	1.260.000	DISHUB
Program Kebinamargaan	Prosentase Panjang jalan dalam kondisi baik (Km)	54%	59%	1.047.900	62%	147.332.526	70%	315.126.290	77%	150.152.000	82%	136.000.000	82%	136.000.000	DINAS PUPR
Program Keciaptakaryaan	Persentase Penduduk yang mendapat layanan sanitasi	77%	80%	1.300.000	81%	5.746.843	82%	1.523.410	87%	1.257.546	97,51%	12.000.000	97,51%	12.000.000	DINAS PUPR
Program Keciaptakaryaan	Persentase penduduk pedesaan yang memiliki akses air bersih	70%	78%	4.414.000	80%	4.129.838	82%	3.846.828	90%	4.444.652	95%	4.500.000	95%	4.500.000	DINAS PUPR
Program Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air	Prosentase sawah yang terairi air irigasi	50%	55%	40.509,42	57%	48.533,43	59%	97.646,88	61%	40.785,81	63%	30.870	63%	30.870	DINAS PERKIM DAN SDA
Program operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi	Prosentase sarana/prasarana irigasi dalam kondisi baik	45%	55%	9.034,38	57%	22.021,77	59%	29.055,58	61%	5.226,49	63%	7.855	63%	7.855	DINAS PERKIM DAN SDA
Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Volume sampah yang terangkut	60%	80%	4.500	81,41%	5.000	81,41%	1.000.000	81,45%	1.737.210	81,45%	3.380.000	81,45%	3.380.000	DLH
Program Pengawasan dan penataan hukum lingkungan	Penegakan hukum kasus lingkungan	80%	100%	49.886	100%	50.000	100%	50.000	100%	40.000	80%	100.000	80%	100.000	DLH
Program pengelolaan lingkungan dan konservasi sumberdaya alam	Jumlah Pengelolaan Sumber Air	93 lokasi sumber air	6 lokasi	164.792	9 lokasi	49.845	9 lokasi	99.824	9 lokasi	50.000	9 lokasi	100.000	135 lokasi sumber air	100.000	DLH
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	-					87,74	74.700	87,80	100.000	88,00	300.000	88,00	300.000	DLH
	Indeks Kualitas Air (IKA)	-					48,10		48,50		48,70		48,70		DLH

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS						TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS				KONDISI AKHIR		PD
			2014		2015		2016		2017		2018		2018		
			Capaian	Rp (Ribuan)	Capaian	Rp (Ribuan)	Capaian	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (ITL)	-					76,45		76,55		77,50		77,50		DLH
Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Kuantitas Pengendalian Pencemaran Air	6 Titik Badan Air	6 titik badan air	34.970	6 titik badan air	39.999	6 titik badan air	69.763	6 titik badan air	50.000	6 Titik Badan Air	300.000	6 Titik Badan Air	300.000	DLH
	Perolehan Adipura	Adipura Kencana	Adipura Kencana	643.901	Adipura	593.226	Adipura Paripurna	548.264	Adipura	3.910.000	Adipura	800.000	Adipura	800.000	DLH
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah terbentuknya desa tangguh	2 desa	1 desa	475	1 desa	500	1 desa	500	1 desa	616.500	7 desa	500.000	7 desa	500.000	BPBD
Program Kedaruratan dan Logistik	Presentase korban terdampak bencana yang ditangani	100%	100%	350	100%	375	100%	825	100%	719.000	100%	800.000	100%	800.000	BPBD
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase daerah titik bencana yang terinventaris, terehabilitasi dan terekonstruksi	100%	100%	403	100%	250	75%	275	100%	375	100%	450.000	100%	450.000	BPBD
MISI V Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UKM, pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata serta perkebunan melalui kegiatan kewirausahaan															
Program Pengelolaan Pasar	jumlah pasar yang di revitalisasi	12 unit	1	6.392.112	1	32.569.576	2	4.833.558	8	6.581.824,5	7 unit	15.000.000	7 unit	15.000.000	DISPERINDA G
Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM yang di bina	300 IKM	3.187	2.695.000	4.426	4.057.585,28	535	2.470.000	352	2.340.000	980 IKM	2.100.000	980 IKM	2.100.000	DISPERINDA G
Program Peningkatan Kapasitas Perdagangan	Jumlah HaKI yang dimiliki produk berbasis industri kecil dan menengah	42 HAKI	61	515.000	48	350.000	40	250.000	52	100.000	55 Haki	400.000	55 Haki	400.000	DISPERINDA G
Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Jumlah pelaku industri kecil menengah yang telah memanfaatkan IPTEK dalam sistem produksi	25 IKM	80	13.370.000	110	27.450.000	115	43.691.000	100	13.725.000	125 IKM	17.250.000	125 IKM	17.250.000	DISPERINDA G
	Jumlah peningkatan penerapan teknologi industri	75 IKM	140		185		105		60		120 IKM		120 IKM		DISPERINDA G
	Jumlah sentra dan kluster industri unggulan yang dibina	25 sentra industri produk unggulan lokal	25		25		25		29		30 sentra		30 sentra		DISPERINDA G
	Jumlah IKM potensial ekspor	4 eksportir	7 eksportir		10 eksportir		11 eksportir		14 eksportir		16 eksportir		16 eksportir		DISPERINDA G
Program Peningkatan Kapasitas Perdagangan	Keikutsertaan IKM dalam kegiatan Promosi	8 IKM	31	1.305.000	10	850.000	13	925.000	6	750.000	25 IKM	1.750.000	25 IKM	1.750.000	DISPERINDA G

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS						TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS				KONDISI AKHIR		PD
			2014		2015		2016		2017		2018		2018		
			Capaian	Rp (Ribu)	Capaian	Rp (Ribu)	Capaian	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
	Persentase penyelesaian aduan produsen dan konsumen	6 Kasus dapat diselesaikan 100%	4 Kasus dapat diselesaikan 100%		3 Kasus dapat diselesaikan 100%		6 Kasus dapat diselesaikan 100%		2 Kasus dapat diselesaikan 100%		2 Kasus dapat diselesaikan 100%		2 Kasus dapat diselesaikan 100%		DISPERINDA G
Program Pengembangan Destinasi Wisata	jumlah obyek wisata yang dikembangkan	2	2	130.000	2	600.000	5	1.385.000	6	2.115.000	8	6.350.000	8	6.350.000	DISBUDPAR
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	persentase peningkatan kunjungan wisata	3%	8,09	420.000	(1,79)	260.000	26,05	1.525.000	20	1.388.750	25%	4.000.000	25%	4.000.000	DISBUDPAR
Program Pengembangan Kemitraan	persentase peningkatan usaha pariwisata yang ber TDUP	10%	148,58	60.000	59,19	60.000	28,89	935.000	20	795.975	10%	1.400.000	10%	1.400.000	DISBUDPAR
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase cadangan pangan pemerintah/ masyarakat	0%	80%	1.005.000	100%	430.000	100%	500.000	100%	775.000	100%	2.166.000	100%	2.166.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Persentase kelembagaan distribusi pangan masyarakat yang diberdayakan	2,45%	2,58%	365.000	2,95%	135.000	3,69%	925.000	4,05%	940.000	4,20%	1.875.000	4,20%	1.875.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
Program Pembangunan Infrastruktur Pangan	Jumlah pengembangan infrastruktur pangan	11	16	799.976.191	18	1.032.624.124	21	296.693.333	29	460.000	31	2.325.000	31	2.325.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Persentase lumbung terbangun	37%	50%	399.988.095	60%	516.312.062	70%	148.346.667	80%	230.000	100%	2.625.000	100%	2.625.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
Program Pengentasan Daerah Rawan Pangan	Persentase Kecamatan Rawan Pangan dan Gizi	53%	58%	180.000	47%	625.000	42%	75.000	37%	705.000	32%	2.875.000	32%	2.875.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
Program Peningkatan Keamanan dan Mutu Pangan	Persentase jumlah produsen pangan yang memenuhi B2SA	40%	45%	400.000	50%	360.000	55%	325.000	60%	632.000	65%	2.520.040	65%	2.520.040	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Skor Pola Pangan Harapan	50%	70%	-	80%	-	88%	50.000	89%	200.000	90%	400.000	90%	400.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
Program Peningkatan Produksi Pertanian	Produk Hasil Pertanian/Perkebunan	Padi : 290.253 Ton, Jagung : 262.255 Ton, Kedelai : 6.075 Ton	Padi : 290.293 Ton, Jagung : 256.180 Ton, Kedelai : 7.820 Ton	9.500.000	Padi : 298.651,5 Ton, Jagung : 2678.368,0 2 Ton, Kedelai : 6.808,90 Ton	11.100.000	Padi : 351.360,44 Ton, Jagung : 297.679,79 Ton, Kedelai : 1.484,73 Ton	11.900.000	Padi : 345.650, Jagung : 260.008, Kedelai : 2.062	12.000.000	Padi : 356.029 Ton, Jagung : 267.808 Ton, Kedelai : 2.423 Ton	13.000.000	Padi : 356.029 Ton, Jagung : 267.808 Ton, Kedelai : 2.423 Ton	13.000.000	DINAS PERTANIAN
	Jumlah / produk pertanian yang memenuhi standart mutu hasil pertanian	2 Sertifikat	-	-	2 sertifikasi	-	2 sertifikasi	-	3 Sertifikasi	-	3 Sertifikat	-	3 Sertifikat	-	DINAS PERTANIAN

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS						TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS				KONDISI AKHIR		PD
			2014		2015		2016		2017		2018		2018		
			Capaian	Rp (Ribuan)	Capaian	Rp (Ribuan)	Capaian	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	
Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Jumlah produksi komoditas utama tanaman perkebunan	Tebu : 594.700 Ton, Tembakau : 2.522,50 Ton, Kelapa : 116.954,00 Ton	-	-	-	-	-	-	Tebu : 519.011 Ton (Tebu Basah), Tembakau : 2.322 Ton (rajang kering), Kelapa : 23.150.340 Butir, Kakau : 419 Ton (oce kering), Kopi : 123 Ton (oce kering), Cengkeh : 452 Ton (bunga kering)	1.475.000	Tebu : 519.011 Ton (Tebu Basah), Tembakau : 2.322 Ton (rajang kering), Kelapa : 23.150.340 Butir, Kakau : 419 Ton (oce kering), Kopi : 123 Ton (oce kering), Cengkeh : 452 Ton (bunga kering)	15.000.000	Tebu : 519.011 Ton (Tebu Basah), Tembakau : 2.322 Ton (rajang kering), Kelapa : 23.150.340 Butir, Kakau : 419 Ton (oce kering), Kopi : 123 Ton (oce kering), Cengkeh : 452 Ton (bunga kering)	15.000.000	DINAS PERTANIAN
Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Teknologi Pertanian	Panjang Jalan Usaha Tani yang terbangun	4.500 Meter	-	-	-	-	-	-	6.000 Meter	10.060.000	8.000 Meter	14.690.000	8.000 Meter	14.690.000	DINAS PERTANIAN
	Jumlah Saluran Irigasi yang dibangun / direhab	3.600 Meter	-	-	-	-	-	-	4.000 Meter	-	6.000 Meter	-	6.000 Meter	-	DINAS PERTANIAN
Program Pengembangan SDM Pertanian	Persentase Gapoktan Mandiri	10%	-	-	-	-	-	-	24,12%	1.000.000	24,12%	1.000.000	24,12%	1.000.000	DINAS PERTANIAN
Program Peningkatan Produksi Tanaman Holtikultura	Jumlah produksi komoditas utama tanaman holtikultura	Cabe Rawit : 544,80 Ton, Cabe Besar : 618,30 Ton, Bawang Merah : 138,30 Ton, Belimbing : 5.610 Ton	-	-	-	-	-	-	Cabe Rawit : 836 Ton, Cabe Besar : 1.079,43 Ton, Bawang Merah : 282,48 Ton, Belimbing : 6.479,52 Ton	9.500.000	Cabe Rawit : 836 Ton, Cabe Besar : 1.079,43 Ton, Bawang Merah : 282,48 Ton, Belimbing : 6.479,52 Ton	10.500.000	Cabe Rawit : 836 Ton, Cabe Besar : 1.079,43 Ton, Bawang Merah : 282,48 Ton, Belimbing : 6.479,52 Ton	10.500.000	DINAS PERTANIAN
	Jumlah Komoditi pertanian unggulan	3 Jenis	3 jenis	150.000	4 jenis	725.000	5 jenis	405.000	6 Jenis	150.000	7 jenis	500.000	7 jenis	500.000	DINAS PERTANIAN
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah produksi peternakan(ton)	Produksi daging = 16.590 ton	18.576,62	19.060,05	19.909,92			17,059			produksi daging = 17.179 ton	3.200.000	produksi daging = 17.179 ton	3.200.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS						TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS				KONDISI AKHIR		PD
			2014		2015		2016		2017		2018		2018		
			Capaian	Rp (Ribu)	Capaian	Rp (Ribu)	Capaian	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
		Produksi telur = 42.597 ton	45.175,78		48.568,74		48.815,89		44,326		produksi telur = 44.769 ton	3.200.000	produksi telur = 44.769 ton	3.200.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		Produksi susu = 45.279 ton	49.777,66		51.980,13		51.980,13		47,492		produksi susu = 48.062 ton	3.200.000	produksi susu = 48.062 ton	3.200.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	Jumlah populasi ternak (ekor)	Sapi Potong 95.800 ekor; Sapi Perah 17.599 ekor; Kambing 175.111 ekor; Domba 4.017 ekor; Ayam Petelur 3.555.771 ekor; Ayam Pedaging 2.545.500 ekor; Ayam Buras 2.168.144 ekor; dan Itik 428.255 ekor	Sapi Potong 98.987 ekor; Sapi Perah 23.663 ekor; kambing 181.029 ekor; Domba 4.637 ekor; Ayam Petelur 3.700.730 ekor; Ayam Pedaging 2.713.815 ekor; Ayam Buras 3.824.870 ekor; Itik 474.815 ekor	1.347.628	Sapi Potong 104.824 ekor; Sapi Perah 24.710 ekor; kambing 185.936 ekor; Domba 5.183 ekor; Ayam Petelur 4.011.274 ekor; Ayam Pedaging 2.886.400 ekor; Ayam Buras 3.885.591 ekor; Itik 485.206 ekor	1.737.534,5	Sapi Potong 111.016 ekor; Sapi Perah 25.229 ekor; kambing 191.915 ekor; Domba 6.818 ekor; Ayam Petelur 4.050.300 ekor; Ayam Pedaging 2.870.359 ekor; Ayam Buras 3.189.018 ekor; Itik 489.048 ekor	1.955.945	Sapi Potong 107.732 ekor; Sapi Perah 21.392 ekor; kambing 189.546 ekor; Domba 4.348 ekor; Ayam Petelur 3.848.881 ekor; Ayam Pedaging 2.755.331 ekor; Ayam Buras 2.346.869 ekor; Itik 463.557 ekor	2.437.780,0	Sapi Potong 111.058 ekor; Sapi Perah 22.461 ekor; Kambing 193.337 ekor; Domba 4.435 ekor; Ayam Petelur 3.925.859 ekor; Ayam Pedaging 2.810.438 ekor; Ayam Buras 2.393.806 ekor; dan Itik 472.828 ekor	3.200.000	Sapi Potong 111.058 ekor; Sapi Perah 22.461 ekor; Kambing 193.337 ekor; Domba 4.435 ekor; Ayam Petelur 3.925.859 ekor; Ayam Pedaging 2.810.438 ekor; Ayam Buras 2.393.806 ekor; dan Itik 472.828 ekor	3.200.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Program Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	Persentase angka kematian ternak akibat penyakit	2%	1,50%		1,80%		0,39%		1,0%		<1%		<1%		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	Persentase kejadian PHM yang ditangani	85%	90%	248.499,30	90%	458.300,5	98%	698.580	89%	597,200	90%	800.000	90%	800.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	Persentase menurunnya wilayah terancam wabah	1%	1,5%		2,1%		2%		2%		2%	800.000	2%	800.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	Persentase kelompok berwawasan agribisnis:														DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	- Kel. Peternak Sapi Perah	40%	40%		50%		55%		55%		60%		60%		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS						TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS				KONDISI AKHIR		PD
			2014		2015		2016		2017		2018		2018		
			Capaian	Rp (Ribu)	Capaian	Rp (Ribu)	Capaian	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	
	- Kel. Peternak Sapi Potong	63%	65%	1.190.887	65%	1.389.503	70%	697.677,4	71%	861,78	75%	650.000	75%	650.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	- Kel. Peternak Ayam Ras	36%	35%		35%		45%		50%		60%		60%		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	- Kel. Peternak Ayam Buras	58%	60%		65%		65%		70%		75%		75%		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	- Kel. Peternak Kambing	48%	60%		70%		60%		65%		70%		70%		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	- Kel. Peternak Domba	40%	40%		42%		42%		47%		50%		50%		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	- Kel. Peternak Itik	48%	70,5%		74%		70%		65%		70%		70%		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Program Peningkatan Keamanan Produk Asal hewan	Presentase produk pangan asal hewan yang ASUH	70%	80%	246,850	100%	224,080	98%	250,000	90%	694,240	95%	400.000	95%	400.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	Persentase unit usaha produk hewan yang memenuhi standar hygiene sanitasi	70%	80%		82%		87,18%		90%		95%		95%		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Program Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Budidaya	PDRB Perikanan Budidaya (Juta Rp.)	632.065,32	-	-	-	-	-	-	-	-	643.163,42	3.750.000	643.163,4	3.750.000	DINAS PERIKANAN
Program Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	PDRB Perikanan Tangkap (Juta Rp.)	49.553,70	-	-	-	-	-	-	-	-	41.635,79	1.551.250	41.635,8	1.551.250	DINAS PERIKANAN
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Perikanan	Jumlah kelompok yang meningkat kelasnya (kelompok)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	15	928,250	15	928,250	DINAS PERIKANAN
	Jumlah kelompok perikanan (kelompok)	34	-	-	-	-	b	-	-	-	359		359		DINAS PERIKANAN

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS						TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS				KONDISI AKHIR		PD
			2014		2015		2016		2017		2018		2018		
			Capaian	Rp (Ribuan)	Capaian	Rp (Ribuan)	Capaian	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	
	Nilai produksi olahan hasil perikanan (Juta Rp.)	95.411,76	-	-	-	-	-	-	-	-	121.772,27	-	121.772,27	-	DINAS PERIKANAN
Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang difasilitasi Pengembangan Usaha	15%	20%	450.000	19%	420.000	26%	600.000	15%	1.000.000	20%	2.440.000	20%	2.440.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	Persentase SDM pengelola koperasi yang difasilitasi pelatihan dan ketrampilan	10%	8%	230.000	13%	450.000	17%	600.000	10%	450.000	10%	500.000	10%	500.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Program Pengawasan dan Pengendalian Koperasi	Persentase Koperasi Cukup Sehat	60%	61%	145.000	68%	360.000	72%	425.000	70%	430.000	75%	1.000.000	75%	1.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi yang aktif	65%	72%	625.000	68%	445.000	87%	680.000	80%	275.000	80%	1.000.000	80%	1.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Wira Usaha Baru	2%	2,1%	125.000	2,3%	150.000	2,4%	500.000	2%	200.000	2%	3.997.500	2%	3.997.500	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Usaha Kecil	2%	2,1%	525.000	2,3%	120.000	2,4%	750.000	2%	624.800	2%	1.000.000	2%	1.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
MISI VI :Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu															
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Tingkat Kesempatan Kerja	97,23%	97,58%	772.510,46	96,05%	260.000	96,16%	485.000	94,50%	1.445.976,50	94,60%	13.000.000	94,6%	13.000.000	DISNAKERTRANS
	Persentase Pencari Kerja ditempatkan	20,50%	15,12%	-	18,71%	-	22,18%	-	22%	-	22,25%	-	22,50%	-	DISNAKERTRANS
Program Peningkatan hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga kerja	Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	50% terselesaikan	100%	356.000	100%	245.000	100%	490.000	90%	659.800	90%	750.000	90%	750.000	DISNAKERTRANS
Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Persentase Peningkatan Status Desa	1%	2%	1.217.100	2%	746.900	3%	385.400	3%	547.125,2	19%	300.000	30%	300.000	DPMD
	Presentase Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	3%	4,5%	-	6,5%	-	30%	-	45%	-	75%	-	75%	-	DPMD

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS						TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS				KONDISI AKHIR		PD		
			2014		2015		2016		2017		2018		2018				
			Capaian	Rp (Ribu)	Capaian	Rp (Ribu)	Capaian	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)			
	Presentase BUMDES dan BUMDES Bersama aktif	0,16%	5%		5%		10%		-	10%		26,5%		-	26,5%		DPMD
Program Pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna	Persentase inovasi masyarakat di bidang Teknologi Tepat Guna	0%	30%	610.000	30%	540.000	30%	365.000	30%	423.750	68%	275.000	68%	275.000		DPMD	
Program Partisipasi dan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan	30%	50%	1.095.000	50%	995.000	50%	850.000	70%	2.042.550	100%	775.000	100%	775.000		DPMD	
Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan peserta KB aktif	77,52%	71,53%	1.215.000	73,42%	1.660.000	75,29%	1.790.000	65,0%	925.000	65%	1.000.000	65%	1.000.000		DINSOS KB PPPA	
	Cakupan peserta KB Baru	129,06%	108,40%		100,66%		107,62		70%		73%		73%			DINSOS KB PPPA	
Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial	Presentase penyandang cacat dan trauma yang terampil	30%	32,75%	304.900	34,83%	305.000	36,01%	435.000	36,40%	1.115.000	40%	1.200.000	40%	1.200.000		DINSOS KB PPPA	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase jumlah fakir miskin yang tertangani	18%	19%	415.000	19,86%	450.000	21,60%	1.010.000	21,8%	831.150	22%	1.000.000	22%	1.000.000		DINSOS KB PPPA	
Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase kasus yang terselesaikan	70%	71,30%	515.000	72%	750.000	73,10%	1.000.000	74,30%	1.085.000	75%	1.200.000	75%	1.200.000		DINSOS KB PPPA	
	Persentase kelembagaan organisasi perempuan yang aktif	80%	82%	-	83,40%	-	86%	-	87%	-	90%	-	90%	-		DINSOS KB PPPA	
	Persentase penerapan Rencana Aksi Bina Keluarga TKI	60%	65%		70%		100%		100%		100%	-	100%	-		DINSOS KB PPPA	
	Persentase Kelompok Bina Keluarga TKI yang dibina	20%	25%		37%		45,45		60%		73%	-	80%	-		DINSOS KB PPPA	
	Persentase cakupan Pemetaan Keluarga TKI	50%	55%		77%		100%		100%		100%	-	100%	-		DINSOS KB PPPA	

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

9.1. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Program Prioritas dan Pendanaan Program Bab VIII, selanjutnya menetapkan indikator kinerja Utama. Penetapan indikator kinerja utama bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah, yang meliputi aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Sebagai sebuah daerah otonom, Kabupaten Tulungagung diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah Kabupaten dengan para pemangku kepentingan. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

1. Indeks Pembangunan Manusia

Mengutip isi *Human Development Report (HDR)* pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan

sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Pada tahun 2018 target IPM Tulungagung sebesar 71,33 dari tahun 2016 sebesar 70,82.

2. Nilai rata rata Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Diharapkan pada tahun 2018 ditargetkan 79,61 dari rata-rata IKM yang diukur 3 OPD dan 19 kecamatan dapat tercapai.

3. Prosentase jalan kondisi jalan mantap berkeselamatan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Untuk mewujudkan ruas jalan yang berkeselamatan ada tiga aspek yang perlu dipenuhi oleh suatu ruas jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Ketiga aspek tersebut yaitu *Self-explaining*, *Self-enforcing*, dan *Forgiving road*. Pelaksanaan kegiatan perekayasa keselamatan jalan bertujuan

untuk meningkatkan keselamatan jalan khususnya di lokasi rawan kecelakaan dengan cara mengembangkan tindakan pencegahan terpadu dengan biaya murah namun manfaatnya banyak bagi pengguna jalan. Di akhir tahun 2018 nanti ditargetkan tercapai 81% jalan di Tulungagung sudah mantap berkeselamatan.

4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup terkait erat dengan sasaran pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, yaitu terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan. Selain sebagai sarana untuk mengevaluasi efektifitas program-program pengelolaan lingkungan, indeks kualitas lingkungan mempunyai peranan dalam hal membantu perumusan kebijakan, membantu dalam mendisain program lingkungan, dan mempermudah komunikasi dengan publik sehubungan dengan kondisi lingkungan. Ditargetkan pada Tahun 2018 sebesar 72, dari tahun 2016 sebesar 71,33.

5. Pertumbuhan ekonomi

Kesejahteraan masyarakat sebagaimana menjadi sasaran pembangunan secara umum terkait erat dengan peningkatan perekonomian masyarakat. Pertumbuhan ekonomi memuat seluruh variabel dan indikator terkait dengan produktifitas masyarakat, baik berupa barang maupun jasa.

Kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung pada akhir tahun 2012 atau awal periode RPJMD ini adalah sebesar 6,13%, pada saat revisi ini sebesar 5,02% diharapkan dengan berbagai instrumen kebijakan daerah yang dilaksanakan selama 1 tahun kedepan dapat tercapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,08% pada tahun 2018 atau akhir periode RPJMD. Secara garis besar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung didorong oleh pesatnya pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Pertumbuhan ekonomi sektor sekunder dan tersier mengindikasikan bahwa Kabupaten Tulungagung telah

bergerak menuju suatu daerah yang berkembang ke arah modernisasi. Dinamika budaya dan pola hidup masyarakat yang menempatkan barang dan jasa pada kelompok kebutuhan sekunder dan tersier sebagai kebutuhan yang vital, menunjukkan bahwa penempatan standar kebutuhan hidup minimal semakin naik. Kondisi ini tentu tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan di segala sektor.

6. Tingkat kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

- Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya.
- Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang, ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal.

Pada Tahun 2018 tingkat kemiskinan terus dikurangi menjadi 8,05% dari 8,23% pada tahun 2016.

7. Tingkat pengangguran terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT

yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Misal: TPT 6%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 6 orang merupakan pengangguran. Variabel untuk menyusun indikator ini juga diperoleh dari Sakernas dan Sensus Penduduk. Variabel untuk menyusun indikator ini juga diperoleh dari Sakernas dan Sensus Penduduk. Pada tahun 2018 ditarget TPT Tulungagung sebesar 3,84 dari angka sebelumnya sebesar 3,85 pada tahun 2016.

8. Indeks Pembangunan Gender

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2018 ditargetkan IPG Tulungagung sebesar 95,07.

Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 9.1
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Utama
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tulungagung

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD				TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Indeks Pembangunan Manusia	69,30	69,49	70,07	70,82	71,07	71,33	71,33
2.	Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik	-	-	74,80	75,23	77,82	79,61	79,61
3.	Prosentase Panjang Jalan dalam Kondisi baik	54%	60%	66%	70%	77%	82%	82%
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,00	70,50	71,00	71,33	71,50	72,00	72,00
5.	Pertumbuhan Ekonomi	6,13%	5,46%	4,99%	5,02%	5,05%	5,08%	5,08%
6.	Tingkat Kemiskinan	9,03%	8,75%	8,57%	8,23%	8,14%	8,05%	8,05%
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,77%	2,42%	3,95%	3,85%	3,85%	3,84%	3,84%
8.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,12	95,11	95,07	95,07	95,07	95,07	95,07

9.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan cermin mengukur keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan. Dalam hal ini, indikator kinerja daerah adalah lebih menggambarkan tujuan akhir dari pelaksanaan Pemerintahan yang ditunjukkan dengan beberapa parameter antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pendidikan, dan lain – lain.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2014-2018 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Tabel. 9.2
Indikator Kinerja Daerah Pemerintahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD				TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
	1.	Indeks Pembangunan Manusia	69,30	69,49	70,07	70,82	71,07	71,33	71,33
	2.	Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik	-	-	74,80	75,23	77,82	79,61	79,61
	3.	Prosentase Panjang Jalan dalam Kondisi baik	54%	60%	66%	70%	77%	82%	82%
	4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,00	70,50	71,00	71,33	71,50	72,00	72,00
	5.	Pertumbuhan Ekonomi	6,13%	5,46%	4,99%	5,02%	5,05%	5,08%	5,08%
	6.	Tingkat Kemiskinan	9,03%	8,75%	8,57%	8,23%	8,14%	8,05%	8,05%
	7.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,77%	2,42%	3,95%	3,85%	3,85%	3,84%	3,84%
	8.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,12	95,11	95,07	95,07	95,07	95,07	95,07
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM								
	1.	Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar							
	1.1	Pendidikan							
	1.1.1	Indeks Pendidikan	0,60	0,60	0,61	0,62	0,62	0,62	0,62

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD				TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	1.1.2	Angka Harapan Lama Sekolah	12,58	12,72	12,73	13,03	13,10	13,17	13,17
	1.1.3	Angka rata-rata lama sekolah	7,44	7,45	7,72	7,73	7,76	7,79	7,79
	1.2	Kesehatan							
	1.2.1	Indeks Kesehatan	0,81	0,81	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
	1.2.2	Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,86	72,88	73,28	73,40	73,46	73,52	73,52
	1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
	1.3.1	Prosentase wilayah yang terkoneksi dengan baik				77,86		80,07	80,07
	1.3.2	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi mantap	50	55	57	59	61	63	63
	1.3.3	Prosentase luasan sawah yang terlayani air irigasi	50	55	57	59	61	63	63
	1.4	Perumahan dan Kawasan Permukiman							
	1.4.1	Prosentase pengurangan luasan kawasan kumuh				47		20	20
	1.4.2	Prosentase penduduk pedesaan yang memiliki akses air bersih	70	78	81	85	90	95	95
	1.4.3	Prosentase penduduk yang terlayani akses sanitasi	80	81	82	84	87	87	87
	1.5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							
	1.5.1	Prosentase peningkatan penyelesaian pelanggaran Perda/Perbup	1	1	1	1	2	2	2

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD				TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	1.5.2	Prosentase perlindungan/pemeliharaan terhadap potensi konflik SARA		85	85	90	95	95	95
	1.6	Sosial							
	1.6.1	Prosentase penurunan PMKS	-	-	-	0,97	1,4	2,5	2,5
	2.	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
	2.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
	2.1.1	Prosentase kasus kekerasan anak yang tertangani	100	100	100	100	100	100	100
	2.2	Lingkungan Hidup							
	2.2.1	Indeks Kualitas Udara	-	-	-	87,74	87,80	88,00	88,00
	2.2.2	Indeks Kualitas Air	-	-	-	48,10	48,50	48,70	48,70
	2.2.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-	-	-	76,45	76,55	77,50	77,50
	2.3	Perhubungan							
	2.3.1	Predikat Wahana Tata Nugraha (WTN)	WTN	WTN	WTN	WTN	-	WTN	WTN
	2.4	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
	2.4.1	Prosentase pertumbuhan omset Koperasi	6,2	11,3	15,30	9,80	10	10	10
	2.4.2	Prosentase pertumbuhan omset Usaha Mikro	25	8,26	9,00	6,00	7,00	7,00	7,00

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD				TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	2.5	Kebudayaan							
	2.5.1	Jumlah karya seni yang mendapatkan penghargaan	2	3	3	2	3	3	3
	2.5.2	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	100	100	100
	3.	Fokus Layanan Urusan Pilihan							
	3.1	Pertanian							
	3.1.1	Kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	22,00	22,34	22,37	21,86	21,91	21,96	21,96
	3.2	Pariwisata							
	3.2.1	Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	1,18	8,10	-1,79	26,05	20	25	25
	3.3	Perdagangan							
	3.3.1	Kontribusi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB besar	20,39	19,83	19,85	20,10	20,13	20,15	20,15
	3.4	Industri							
	3.4.1	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB	20,62	20,49	20,67	20,84	20,89	20,93	20,93
	4.	Fokus Layanan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan							

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD				TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	4.1	Pemerintahan Umum							
	4.1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	60	61	61
	4.1.2	Nilai SAKIP Kabupaten	55,41	52,90	62,42	70,03	71,00	72,00	72,00
	4.1.3	Nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan	-	-	74,79	75,23	77,82	79,61	79,61
	4.1.4	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu	-	-	-	0	-	67	67
	4.1.5	Prosentase msyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu/pilkades	-	74,02	82	0	85	61	61
	4.1.6	Prosentase desa tangguh bencana di kawasan rawan bencana	1,4	2,1	2,8	3,5	4,2	4,9	4,9
	4.2	Penunjang Keuangan							
	4.2.1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana daerah Kabupaten Tulungagung akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang (2018); bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Periodisasi RPJMD Kabupaten Tulungagung ini disesuaikan dengan masa jabatan kepala daerah, yakni 2014-2018.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2009-2013, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 ini akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD) Kabupaten Tulungagung, yang merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tulungagung untuk periode satu tahun.

10.1. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2015 hingga 2018. Perencanaan pembangunan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD 2005-2025 Kabupaten Tulungagung dan mengacu pada RKP Tahun 2019. Hal ini karena pada tahun 2019 merupakan masa transisi antara perodesasi RPJMD 2014-2018 dengan RPJMD periode 2019-2023, dimana pada tahun 2018 yang merupakan masa penyusunan RKPD 2019, RPJMD Tahun 2019-2023 masih dalam proses penyusunan. Dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 telah ditetapkan agenda pembangunan prioritas yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu kepemimpinan kepala daerah adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata.
2. Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau.
3. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntable, responsif dan demokratis
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain
5. Pengembangan dan penguatan ekonomi Kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan.
6. Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah.
7. Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Tulungagung.
8. Sinergi dan harmonisasi pembangunan kewilayahan Kabupaten Tulungagung melalui pemantapan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup.

Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 ini telah dilaksanakan dengan konsisten oleh lembaga perangkat daerah, yang didukung peran aktif seluruh *stakeholders* dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung periode berikutnya.

Secara garis besar, pembangunan yang berlangsung lima tahun ke depan bukan saja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, terutama di bidang pendidikan, dan kesehatan, perekonomian rakyat yang semakin berdaya, makin berkurangnya jumlah penduduk dan keluarga miskin, dan berkurangnya jumlah pengangguran, tetapi sekaligus mampu mewujudkan masyarakat Kabupaten Tulungagung yang memiliki kepedulian terhadap sesama, berkualitas dan beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, dalam periode lima tahun ke depan, diharapkan kesenjangan atau disparitas antara wilayah yang tertinggal dan wilayah yang sudah maju dapat berkurang secara signifikan, dan berbagai fasilitas layanan publik yang ada di Kabupaten Tulungagung juga diharapkan dapat berjalan dengan baik, karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.

Program transisi tahun 2019 sudah barang tentu akan dirumuskan dengan tetap berusaha menjamin keberlanjutan dari apa yang telah dilaksanakan dan dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk periode selanjutnya, program pembangunan yang dikembangkan dapat lebih banyak berorientasi pada upaya memfasilitasi dan memberi berbagai kemudahan ekonomi (*economic facilities*) yang benar-benar nyata, dan peluang-peluang sosial (*social opportunities*) yang adil kepada masyarakat. Kemudahan ekonomi adalah kesempatan dan makin terbukanya akses masyarakat terhadap berbagai sumber-sumber produksi dan pasar. Sedangkan peluang-peluang sosial adalah upaya meningkatkan kesempatan masyarakat melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal didukung kualitas pendidikan dan

kesehatan yang baik, serta makin meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih
2. Badan/dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2014-2018 ini dengan sebaik-baiknya.
3. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2014 hingga 2018.
4. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja masing-masing, dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018.
5. Renstra SKPD merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
6. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 dengan Rencana Strategis, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.
7. Konsepsi prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 ini baik mengenai aspek program maupun wilayah, hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas, baik dalam

kerangka anggaran maupun kegiatan, dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non-prioritas.

8. Konsepsi deskripsi program prioritas dan program penunjang beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas pentingnya sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan.
9. Hal-hal yang terkait dengan rencana alokasi anggaran pada dasarnya tidak bersifat mutlak namun akan menyesuaikan dengan kondisi serta kemampuan pendanaan tahun berjalan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung berkewajiban melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 kedalam Renstra-SKPD maupun ke dalam RKPD serta Renja SKPD.

BUPATI TULUNGAGUNG

ttd

SYAHRI MULYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



SAIFUL BAKRI, SH.,MH.

Pembina TK I

NIP. 19621020 199003 1 011